

BAB V

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan data hasil penelitian dengan sistematika penulisannya disesuaikan dengan fokus utama penelitian sebagaimana yang tersaji pada bab-bab sebelumnya yaitu “perencanaan pembangunan destinasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan daerah di Kota Tidore Kepulauan”. Melalui fokus utama tersebut kemudian melahirkan tujuh sub fokus yaitu: Penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan; Fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan; Pembangunan fasilitas umum pendukung di Kota Tidore Kepulauan; Kelembagaan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; Koordinasi dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; dan Menemukan model inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan ketujuh sub fokus tersebut akan disajikan dengan cara deskriptif, interpretatif dan elaboratif.

5.1. Penyiapan Objek dan Daya Tarik Destinasi Wisata

Pendekatan yang digunakan oleh daerah untuk melihat dan menilai ketersediaan sumberdaya sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi di daerah adalah melakukan *mapping* atau identifikasi terhadap potensi sumberdaya yang tersedia di daerah. Identifikasi terhadap potensi dan sumberdaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan ekonomi. *Mapping* dan identifikasi terhadap

potensi dan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah penting dilakukan. Upaya tersebut dalam kerangka untuk mengetahui seberapa besar ketersediaan sumberdaya yang dimiliki, dan akan dipergunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang direncanakan tersebut. Dalam konteks perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, *mapping* dan identifikasi terhadap potensi sumberdaya kepariwisataan yang tersedia dan dimiliki daerah harus dilakukan oleh daerah sebagai bagian terpenting dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata daerah.

Kota Tidore Kepulauan secara *youridis* sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan oleh berbagai regulasi tentang pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut harus melakukan *mapping* dan identifikasi terhadap potensi dan daya dukung pembangunan yang akan dilakukan secara cermat dan tepat. Berkaitan dengan salah satu fokus dari studi yang dilakukan ini yaitu: penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan. Agar terarah dan terstruktur dalam penyajian data hasil penelitian ini, maka penulis mempetakan sub fokus ini kedalam empat tema, yaitu penyiapan objek pariwisata, dan objek pariwisata unggulan di Kota Tidore Kepulauan, kesiapan masyarakat dan lingkungan, dan tatalaksana infrastruktur. Keempat tema tersebut disajikan data-data dan dideskripsikan sebagai berikut.

5.1.1 Objek Wisata Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan secara geografis merupakan daerah dengan ciri kepulauan yang terdiri dari 12 (dua belas) pulau (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014), (data pulau-pulau di Kota Tidore Kepulauan tersaji dalam tabel 3.1, pada

bab III). Dengan ciri daerah kepulauan ini lah yang memperkaya objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, husunya wisata bahari dan alam. Selain itu, Kota Tidore Kepulauan secara historis merupakan salah satu daerah kerajaan (Kerajaan Islam) di Indonesia yang sampai sekarang masih tetap eksis. Pada sisi yang lain, Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu daerah tujuan kedatangan parah penjajah dari Eropa (Portigis, Spanyol, dan Belanda) pada masa penjajahan, karena kekayaan rempah-rempah (cengkeh dan pala) yang dimilikinya.

Berdasarkan realitas tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, Kota Tidore Kepulauan yang ditakdirkan sebagai daerah kepulauan yang kemudian menjadi sumber kekayaan objek wisata bahari dan alam. Selian itu, Kota Tidore Kepulauan diperkaya dengan berbagai warisan peradaban seni dan budaya masyarakat sebagai warisan peradaban Kerajaan Tidore. Pada ruang yang lain, berbagai peninggalan para penjajah yang kemudian menjadi kekayaan objek wisata sejarah di Kota Tidore Kepulauan. Dengan kekayaan pariwisata tersebut, kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan. Keragaman dan kekayaan pariwisata Kota Tidore Kepulauan tersebut dimeping oleh BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan (2015: 31-40) sebagai berikut:

1. Wisata alam, terdiri dari: Pantai Pulau Maitara, Pantai Ake Sahu (Air Panas), Pantai Cobo, Kalaodi, Gurabunga, Pantai Rum, Air Terjuan Goheba, dan Air Terjuan Sigela.
2. Wisata sejarah, terdiri dari: *Kedato* (Keraton) Kesultanan Tidore, Masjid Keslutanan Tidore, Musium Sonyinge Malige, Benteng Toreh, Benteng

Tahula, Tugu Peringatan Kedatangan Bangsa Spanyol, Dermaga Kesultanan Tidore, dan Makam Sultan Nuku.

3. Wisata budaya, terdiri dari: Acara Lufu Kie, Acara Paji Dama Nyili-nyili, Bambu Gila “Baramasuwen”, Tarian Soya-soya, Ratib Taji Besi (Badabus), dan Salai Jin.

Selain kekayaan objek pariwisata yang dimeping oleh BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, pada bagian Kawasan Peruntukan Pariwisata, Pasal 42 yang menjebutkan potensi-potensi objek pariwisata di Kota Tidore sebagai berikut:

- a. Daya tarik wisata budaya terdiri atas:
 1. Lufu Kie di Pulau Tidore;
 2. Legu Gam di Pulau Tidore;
 3. Dabus;
 4. Mandi Safar di Mafututu;
 5. Salai Jin;
 6. Barang masuwen (bambu gila); dan
 7. Tari-tarian adat.
- b. Daya tarik wisata sejarah terdiri atas:
 1. Kedaton Kesultanan di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 2. Masjid Sultan di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 3. Benteng Tahula di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 4. Museum Malige Sonyine di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 5. Makam Sultan Nuku di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 6. Makam Habib Umar Al’Faroek Rahmatullah di Kelurahan Seli Kecamatan Tidore;
 7. Makam Sultan Djamaluddin di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
 8. Makam Cililiyati di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
 9. Makam Jou Kota di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
 10. Kedaton Biji Nagara di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
 11. Pandai besi di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan; dan
 12. Tugu Spanyol di Kelurahan Rum Balibuga Kecamatan Tidore Utara.
- c. Daya tarik wisata bahari/tirta terdiri dari:
 1. Danau Gurua Marasai di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara;
 2. Air Terjun Luku Celeng di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;

3. Air Terjun Bay Rorai di Desa Woda Kecamatan Oba;
4. Air Terjun Sigela di Desa Sigela Kecamatan Oba;
5. Air Terjun Havo di Desa Koli Dusun Tayawi Kecamatan Oba;
6. Pantai Ake Sahu di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
7. Pantai Taman Cobo di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
8. Pantai Cobo di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
9. Pantai Rum di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;
10. Pantai Loko di Desa Akesai Kecamatan Oba Tengah;
11. Pantai Gamgau Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
12. Pantai Tugulufa di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore;
13. Pulau Woda di Desa Woda Kecamatan Oba;
14. Pulau Maitara di Kecamatan Tidore Utara;
15. Pulau Mare di Kecamatan Tidore Selatan; dan
16. Rumah Adat Sowohi di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore.

Merujuk pada kedua dokumen daerah di depan maka dapat dijelaskan bahwa menurut BAPPEDA objek wisata alama yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan terdiri atas 8 (delapan) objek wisata, sedangkan menurut Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, potensi objek pariwisata alam atau wisata bahari di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 16 (enam belas) objek. Untuk objek wisata sejarah menurut BAPPEDA potensi wisatanya terdapat 8 (delapan) objek, namun menurut Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, potensi wisata sejarah terdapat 12 (dua belas) objek. Objek wisata budaya menurut BAPPEDA terdapat 6 (enam) objek yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan, namun menurut Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, Kota Tidore Kepulauan memiliki 7 (tujuh) objek wisata budaya.

Deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa Kota Tidore Kepulauan memiliki ketersediaan objek pariwisata yang cukup banyak. Selain rincian data kekayaan objek pariwisata tersebut, menurut Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda) Kota Tidore Kepulauan tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030 menyebutkan bahwa objek pariwisata daerah Kota Tidore Kepulauan meliputi: pariwisata bahari; pariwisata alam; pariwisata sejarah; pariwisata seni dan budaya; agrowisata; dan makanan dan panganan khas (Pasal 7). Keenam potensi pariwisata tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Potensi wisata bahari meliputi (Pasal 8):
 1. Pantai Ake Sahu, terletak di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur;
 2. Pantai Gamgau, terletak di Lingkungan Gamgam Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
 3. Pulau Failonga, terletak di Kecamatan Tidore Timur;
 4. Pantai Tugulufa, terletak di Kecamatan Tidore;
 5. Pantai Cobo, terletak di Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur;
 6. Pulau Mare, terletak di Kecamatan Tidore Selatan;
 7. Pantai Tahua, terletak di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara;
 8. Pantai Rum, terletak di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;
 9. Pantai Rum Balibunga, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
 10. Pulau Maitara, terletak di Kecamatan Tidore Utara;
 11. Pulau Tamong, terletak di Kecamatan Oba;
 12. Pulau Woda, terletak di Kecamatan Oba;
 13. Pulau Joji, terletak di Kecamatan Oba;
 14. Pulau Guratu, terletak di Kecamatan Oba;
 15. Pulau Sibul, terletak di Kecamatan Oba Utara;
 16. Pantai Paceda, terletak di Desa Paceda Kecamatan Oba Tengah;
 17. Pantai Somahode, terletak di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara;
 18. Pantai Noramaake, terletak di Desa Noramaake Kecamatan Oba Tengah;
 19. Pantai Loko, terletak di Kecamatan Oba Tengah; dan
 20. Spot Diving, terletak di Pulau Maitara, Mare, Failonga, Pantai Ake Sahu, Toloa, Mareku, Kaiyasa, Gugusan Pulau Woda dan Pantai Jiko Cobo.
- b. Potensi wisata alam meliputi (Pasal 9):
 1. Mata air Ake Bai, terletak di Kelurahan Seli Kecamatan Tidore;
 2. Mata air Goyoba, terletak di Kelurahan Fabaharu Kecamatan Tidore Utara;
 3. Talaga, terletak di Lingkungan Talaga Kelurahan Rum Balibung Kecamatan Tidore Utara;
 4. Mata air Luku Celeng, terletak di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;

5. Taman rekreasi Cobo, terletak di Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur;
 6. Mata air Ake Lada, terletak di Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur;
 7. Air terjun Sigela, terletak di Desa Sigela Kecamatan Oba;
 8. Taman Nasional Aketajawe, terletak di Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Utara; dan
 9. Danau Gurua Marasai, terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.
- c. Potensi wisata sejarah meliputi (Pasal 10):
1. Kedaton Kesultanan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore
 2. Masjid Sultan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 3. Dermaga Sultan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 4. Museum Sonyine Malige, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 5. Benteng Tahula, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 6. Benteng Thorre, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 7. Makam Kapita Lau, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 8. Makam Sultan Nuku, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 9. Makam Sultan Zainal Abidin Syah, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 10. Makam Imam Jawa Konora, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 11. Makam Mahdum Abd. Kadir, terletak di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur;
 12. Makam Aulia Gamgau, terletak di Kelurahan Mafu Tutu Kecamatan Tidore Timur;
 13. Makam Sultan Saifuddin Syah (Jou Kota), terletak di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
 14. Makam Al'Habib Umar Farook Rahmatullah, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 15. Goya Salawati, terletak di Kelurahan Topo Kecamatan Tidore;
 16. Makam Sultan Muhammad Taher, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 17. Makam Lufu Doraba, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 18. Makam Jou Guru, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 19. Eks Kantor Gubernur Provinsi Irian Barat, terletak di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore;
 20. Bekas Kedaton Biji Negara, terletak di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
 21. Makam Sultan Djamaluddin (Ciliriaty) dan Sultan Al'Mansyur, terletak di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
 22. Tugu Pendaratan Spanyol, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
 23. Benteng Ts Tjobbe, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;

24. Benteng Maresku, terletak di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara;
 25. Makam Jere Toroka, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
 26. Makam Ebamadoa, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara; dan
 27. Eks Kediaman Gubernur Irian Barat, terletak di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore.
- d. Potensi wisata seni dan budaya meliputi (Pasal 11):
1. Seni kerajinan bambu, terletak di Kelurahan Fobaharu Kecamatan Tidore Utara, Kelurahan Doyado, Cobodoe, dan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;
 2. Seni kerajinan gerabah, terletak di Pulau Mare Kecamatan Tidore Selatan;
 3. Kadato Gimalaha Tomayou, terletak di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;
 4. Rumah adat Tidore, terletak di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;
 5. Rumah adat Soaromtoha, terletak di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore;
 6. Pandai besi Tola, terletak di Kelurahan Tola Kecamatan Tidore Selatan;
 7. Upacara adat Legu Gam;
 8. Upacara adat Legu Dou;
 9. Upacara adat Paca Goya;
 10. Upacara hari jadi Tidore;
 11. Upacara ritual Tobo Safar;
 12. Tarian Soya-soya;
 13. Tarian Dana-dana;
 14. Dabus;
 15. Baramasuwen; dan
 16. Maitara Festival.
- e. Potensi wisata agro meliputi (Pasal 12):
1. Agrowisata Gurabunga, terletak di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore;
 2. Agrowisata Lada Ake, terletak di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara;
 3. Agrowisata Kalaodi, terletak di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;
 4. Agrowisata Dusun Talaga, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
 5. Agrowisata Jaya, terletak di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara;
 6. Agrowisata Transmigrasi Kosa, terletak di Dsea Kosa Kecamatan Oba; dan
 7. Agrowisata Maidi, terletak di Dsea Maidi Kecamatan Oba Selatan.
- f. Potensi objek wisata makanan dan panganan (kuliner) Khas Tidore meliputi (Pasal 13):

1. Makanan: Popeda, Gibi Soru, Tela gule, Uge ake, Gohu nyao, Rica tutu; dan
2. Panganan: Lapis tidore, Mam raha, Mam satu.

Merujuk pada data kekayaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang disajikan dalam Ranperda Kota Tidore Kepulauan tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030 tersebut di atas, tergambar bahwa ketersediaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan terlihat lebih banyak di bandingkan dengan yang terdapat dalam Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, dan data yang dibuat oleh BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 5.1 Perbandingan Ketersediaan Objek Pariwisata di Kota Tidore Kepulauan Menurut BAPPEDA, Perda RTRW dan Ranperda RIPPDA

No.	Potensi Pariwisata	Sumber Data			Keterangan
		BAPPEDA	RTRW	RIPPDA	
1.	Bahari	-	-	20	1. BAPPEDA dan RTRW menggabungkan potensi wisata bahari, alam dan agro.
2.	Alam	8	16	9	
3.	Sejarah	8	12	27	
4.	Seni & Budaya	6	7	16	2. BAPPEDA dan RTRW tidak menyebutkan potensi wisata kuliner.
5.	Agrowisata	-	-	7	
6.	Kuliner Khas	-	-	9	
		22	35	88	

Sumber: Diolah dari BAPPEDA (2015); Perda RTRW; dan Ranperda RIPPDA Kota Tidore Kepulauan

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan data tentang kekayaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan menurut ketiga dokumen daerah tersebut yaitu: BAPPEDA, Perda tentang RTRW dan Ranperda tentang RIPPDA. Idealnya pada setiap dokumen daerah yang menyajikan data tentang ketersediaan sumberdaya dan kekayaan daerah yang kemudian menjadi modal pembangunan daerah harus sama. Dalam artian bahwa setiap dokumen resmi daerah yang menjadi sumber rujukan daerah

dalam proses pembangunan, dalam menyajikan datanya harus konsisten anatar satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Terkait dengan perbedaan data antara dokumen daerah tersebut, Bapak Fas menjelaskan bahwa:

“....saya ingin mengatakan seperti begini. Kita belum memiliki data yang akurat tentang objek wisata di Kota Tidore, yang menyebabkan jumlah objek wisata di daerah ini dari berbagai dokumen yang berbeda-beda.... berkaitan dengan perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan perencanaan pembangunan sektoral, khususnya pembangunan pariwisata. Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut kami berkoordinasi dengan BAPPEDA sebagai badan perencanaan daerah dan beberapa instansi daerah. Selain itu, kami juga menggunakan dokumen dan data dari BAPPEDA seperti Perda Tata Ruang, RPJPD, RPJMD dan lainnya. Tetapi data dari BAPPEDA tersebut kami verifikasi dan analisis kembali....” (Wawancara, 15 Oktober 2015).

Lebih lanjut Bapak Fas menjelaskan:

“....dalam kerangka penyusunan dan pembuatan rencana induk pembangunan pariwisata Kota Tidore Kepulauan, tim kami mencoba memverifikasi dan menganalisa data potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim kami yang kemudian kami susun dan kami sajikan dalam Draf Ranperda.... dan ternyata hasil verifikasi tentang potensi pariwisata di daerah ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah disusun oleh BAPPEDA dan yang ada dalam Perda RTRW. Tetapi ini bukan berarti bahwa data potensi pariwisata yang dibuat oleh BAPPEDA dan yang ada di Perda RTRW itu salah, tetapi mungkin mereka belum melakukan verifikasi secara keseluruhan.” (Wawancara, 15 Oktober 2015).

Penjelasan informen di atas dapat dipahami bahwa, terjadi perbedaan data secara kuantitatif tentang jumlah objek wisata yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan dari berbagai dokumen daerah tersebut dikarenakan, BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan sebagai lembaga perencanaan daerah belum memiliki data yang akurat tentang objek wisata di daerah tersebut. Dalam hal ini, BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan pembangunan di daerah seharusnya mempunyai data yang akurat

dan *up date* tentang potensi dan sumber-sumber daya pembangunan (ekonomi) daerah.

Ketersediaan dan keakuratan data dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan, ketersediaan data yang akurat dan *up date* sebagai informasi awal dalam proses perencanaan. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, secara sektoral mempunyai tugas melakukan perencanaan pada bidang kepariwisata, berusaha melakukan perencanaan pembangunan pariwisata di daerah tersebut berupaya untuk mengidentifikasi kembali ketersediaan dan keberadaan berbagai objek wisata yang ada di daerah tersebut. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan untuk menganalisis dan mengembangkan data objek wisata yang dimiliki oleh daerah melalui tim yang dibentuknya. Melalui proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan menghasilkan penambahan berbagai objek wisata yang belum teridentifikasi oleh BAPPEDA. Berdasarkan data yang tersaji di depan menunjukan bahwa, hasil identifikasi objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang disajikan dalam dokumen Ramperda RIPPDA lebih banyak dari data BAPPEDA dan Perda RTRW.

Dengan menggunakan data keberadaan objek pariwisata yang bersumber dari ketiga dokumen tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan cukup banyak, walaupun terjadi perbedaan secara kuantitatif dan varian serta objeknya. Terlepa dari berbagai perbedaan tersebut, namun data tersebut telah memberikan penjelasan tentang ketersediaan berbagai objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Terkait dengan kekayaan objek pariwisata yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan, Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman menjelaskan bahwa.

“Dengan adanya kecenderungan peningkatan kunjungan wisatawan ini, maka kejayaan Tidore masa lalu harus diangkat kembali, karena orang Eropa telah mengenal Tidore sejak 900 tahun lalu. Tidore dari sisi perdagangan telah go-international melalui perdagangan cengkeh dan pala sejak 900 tahun yang lalu. Upaya untuk bagaimana orang datang di Tidore maka budaya dan rempah-rempah, kuliner dan kekayaan budaya lainnya diangkat ke permukaan.... sebagai instansi yang menangani langsung sektor pariwisata, pihaknya tetap berupaya untuk menjadikan Tidore dengan daya tariknya agar orang-orang semakin datang ke Tidore.” (nationalgeographic.ci.id, National Geographic Indonesia, 2 Februari 2014).

Terkait dengan kekayaan potensi pariwisata tersebut dijelaskan juga oleh bapak Aim sebagai berikut:

“....kita mengakui bahwa Kota Tidore Kepulauan memiliki kekayaan objek wisata yang sangat banyak. Baik wisata bahari dan alam, karena daerah ini adalah daerah kepulauan, sehingga kita punya banyak objek wisata alam dan bahari. Selain itu, Tidore ini kan salah satu daerah kerajaan di *Moluku Kie Raha* (Kerajaan Maluku Empat Pulau, yaitu Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo), dengan daerah kerajaan tersebut membuat Tidore mempunyai banyak objek wisata sejarah, seni dan budaya yang berkaitan dengan kerajaan tersebut.... Tidore ini sendiri pada masa penjajahan dulu merupakan salah satu daerah kedatangan para penjajah, diantaranya seperti Portugis dan Spanyol. Untuk Spanyol yang telah dibangun monumen pendaratannya di Rum.” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Penjelasan inforem di atas memberikan gambaran bahwa Kota Tidore Kepulauan memiliki kekayaan objek pariwisata yang cukup banyak dan beragam, sebagaimana yang tersaji pada berbagai dokumen daerah di depan. Selain itu, berdasarkan amatan penulis, secara empiris Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah kepulauan sebagaimana nomenklatur penamaan dari daerah tersebut yaitu Kota Tidore Kepulauan. Realitas empiris Kota Tidore sebagai daerah kepulauan terlihat pada peta geografi daerah tersebut (peta Kota Tidore Kepulauan terdapat pada bab III tentang gambaran geografi daerah). Artinya,

dengan daerah kepulauan tersebut membuat Kota Tidore Kepulauan memiliki hamparan laut, pantai dan hutuan yang kemudian memperkaya objek wisata bahari dan alam. Berbagai objek wisata bahari dan alam tersebut diantaranya yang paling terkenal adalah Pantai Ake Sahu di Kelurahan Tosa, Pantai Tahu di Kelurahan Rum Balibunga, Pantai Coba di Kelurahan Cobo, Pulau Maitara, Pulau Failongo, Pulau Mare.

Selain objek wisata bahari dan alam, Kota Tidore Kepulauan memiliki berbagai objek wisata sejarah. Terkait dengan objek wisata sejarah, berdasarkan amatan penulis, di Kota Tidore Kepulauan memiliki berbagai warisan sejarah kerajaan yang masih terjaga hingga sekarang. Warisan sejarah tersebut berupa warisan sejarah kerajaan Islam Tidore seperti Masjid Kesultanan yang terdapat di Kelurahan Soasio, Al Quran Tulis Tangan dan Mahkota Sultan Tidore yang tersimpan di Kadato (Kraton) Kesultanan. Selain warisan sejarah kesultanan, di Kota Tidore terdapat beberapa benteng peninggalan sejarah para penjajah Eropa (Spanyol, Portugis dan Belanda), seperti Benteng Torre dan Tahula yang berada di Kelurahan Soasio.

Untuk objek wisata seni dan budaya, berdasarkan amatan dan observasi penulis menunjukkan bahwa di Kota Tidore Kepulauan terdapat berbagai kampung adat seperti Kalaodi, Gurabunga, Afa-Afa, Jaya (Jai), Talaga dan Maitara. Pada kampung adat tersebut pada momen dan belan tertentu selalu diadakan upacara adat. Sebagai contoh, masyarakat Kalaodi melakukan upacara adat *Paca Goya* (pembersihan tempat-tempat kramat). Upacara adat tersebut biasanya dilakukan pada saat menjelang musim panen cengkeh, pala dan durian. Selain upacara adat *Paca Goya*, di masyarakat Kalaodi melakukan upacara adat *Ruahan Doro* (mengena para leluhur). Upacara adat tersebut

dilakukan setelah pengangkatan dan pelantikan pimpinan adat yang biasa disebut *Sowohi*. Pada komunitas masyarakat Gurabunga melakukan upacara adat *Legu Gam* (adat negri). Adalah suatu ritual untuk mengingat para leluhur dan doa sukuran serta perlindungan untuk masyarakat.

Selain kekayaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang telah disajikan melalui dokumen daerah di depan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informen di lokasi yang berbeda dan pengamatan penulis, terungkap beberapa objek pariwisata yang tidak terdapat dalam dokumen daerah sebagaimana yang disebutkan di depan. Berikut adalah beberapa objek pariwisata yang diungkapkan oleh para informen yang belum terdapat dalam dokumen daerah, seperti objek wisata di Pulau Maitara, di Pulau Tidore dan di Daratan Oba (Pulau Halmahera).

Pulau Maitara memiliki objek pariwisata yang layak di kunjungi, Ahmad (2014: 5) menjelaskan bahwa, "Pulau yang diapit oleh dua kota (Tidore dan Ternate) ini, kedepan akan menjadi kawasan yang sangat strategis bagi pengembangan pariwisata bahari. Sebab keelokan pulau ini mampu menarik wisatawan lokal maupun manca negara yang doyan wisata bahari."

Terkait dengan kekayaan objek pariwisata di Pulau Maitara tersebut, Bapak Nua menjelaskan bahwa:

"...husunya di Pulau Maitara ini terdapat objek wisata yang dikunjungi oleh orang, diantaranya Pantai Kailupa atau Pantai Seribu Rupiah, karna disana dibangun monumen uang Seribu Rupiah.... dan juga puncak Maitara. Di Puncak Maitara itu terdapat kuburan, yang menurut cerita orang tua kami, kuburan itu adalah makam leluhur kami.... di puncak Maitara kita dapat melihat pemandangan sekeliling kita secara 360 derajat. Kita bisama melihat perkempungan di maitara secara keseluruhan, pemandangan laut disekitar, pemandangan di Pulau Tidore dan Kota Ternate." (Wawancara, 18 Agustus 2015).

Selain objek wisata alam puncak Maitara tersebut, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Maitara sebagai masyarakat nelayan, terdapat upacara adat yang berkaitan dengan tradisi masyarakat nelayan yaitu “*Ito Oti se Hadola Oti*” (melepaskan perahu dan menjemput perahu). Berkaitan dengan tradisi upacara adat tersebut dijelaskan oleh Bapak Ahd sebagai berikut:

“....mata pencaharian utama masyarakat Maitara ini kan nelayan, jadi ada tradisi yang selalu *torang* (kami) lakukan sebagai masyarakat nelayan pada saat melepaskan perahu untuk berlayar mencari ikan itu selalu dilakukan dengan upacara adat yang bisa *torang* (kami) sebut *ito oti* (melepaskan perahu). Upacara tersebut bisanya *torang* (kami) lakukan pada bulan Safar.... pada saat perahu pulang dari berlayar mencari ikan, *torang* (kami) juga melakukan upacara adat dan sukuran atas kepulangan perahu dengan acar *hadola oti* (menjemput perahu). Upacara ini kami lakukan pada bulan Syaban, karena rata-rata *torang pe* (kami punya) perahu melakukan mencari ikan di Bacan (Kabupaten Halmahera Selatan).... jadi kedua upacara yang biasa *torang* (kami) lakukan itu *torang* (kami) sebut upacara *Ito Oti se Hadola Oti* (melepaskan perahu dan menjemput perahu)....” (Wawancara, 18 Agustus 2015).

Lebih lanjut bapak Bapak Ahd menjelaskan bahwa:

“....menurut saya kedua acara tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata di Maitara, selain *torang* (kami) punya acara *Salai Jin* (upacara adat sukuran) dengan *Badabus* (debus) yang selalu *torang* (kami) lakukan.... (Wawancara, 18 Agustus 2015)”

Penjelasan Bapak Ahd tersebut dibenarkan juga oleh Bapak Alh sebagai berikut:

“....secara sosial ekonomi, masyarakat Maitara adalah masyarakat nelayan, dan saya suda pernah melakukan penelitian tentang masyarakat pesisir di Pulau Maitara.... dengan latar belakan kehidupan ekonomi sebagai masyarakat nelayan tersebut, maka secara sosial kultural terdapat tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Maitara yang berkaitan dengan sumber kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan tersebut, yaitu upacara adat *Ito Oti se Hadola Oti* (melepaskan perahu dan menjemput perahu). Acara ini dilakukan pada dua momen yang berbeda yaitu pada saat memberangkatkan perahu dan para nelayan untuk berlayar mencari ikan, dan kedua, pada saat menjemput perahu nelayan pada saat mereka pulang dari berlayar.... kedua acara adat tersebut sebagai bentuk manivestasi atas rasa syukur masyarakat atas rezki yang Allah berikan kepada mereka. Dan menurut amatan saya, kedua acara tersebut selalu dilakukan hinga saat ini, dan menurut keyakinan saya acara tersebut akan tetap hidup terus karena berkaitan

dengan filosofi kehidupan masyarakat Tidore.” (Wawancara, 17 Oktober 2015).

Penjelasan dari berbagai informen tersebut memeberikan gambaran bahwa di Pulau Maitara selain terdapat berbagai objek wisata sebagaimana yang terdapat dalam dokumen BAPPEDA, Perda tentang RTRW dan Ranperda tentang RIPPDA. Ternyata masih terdapat beberapa objek pariwisata seperti wisata alam Puncak Maitara dan wisata budaya *Ito Oti se Hadola Oti*. Selain potensi pariwisata di Pualau Maitara tersebut, di Pulau Tidore terdapat beberapa potensi pariwisata yang menarik dan dapat dikembangkan yang tidak teridentifikasi oleh BAPPEDA dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Potensi-potensi pariwisata yang terdapat di Pulau Tidore belum teridentifikasi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh beberapa informen sebagai berikut, menurut Bapak Sas.

“....puncak Kie Matubu (Puncak Tidore) itu selalu di datangi oleh orang-orang. Ada orang yang naik ke Kie Matubu karena keperluan acara adat seperti *sabaka paji* (mengibarkan bendera).... sama seperti dengan *torang* (kami) dari Masjid Sultan itu hari, setelah selesai melakukan pemugaran Masjid Sultan *torang* (kami) melakukan ritual *tagi kie sbaka paji* (pergi ke puncak mengibarkan bendera) yang dilakukan oleh sembilan orang, dan salah satunya adalah saya.... selain untuk keperluan acara adat seperti itu, ada juga orang-orang yang naik ke *kie matubu* (puncak Tidore) untuk rekreasi atau berlibur. Banyak sekali orang ke puncak, dan tidak hanya orang-orang Tidore, ada juga orang dari luar Tidore.... kalau orang yang ke puncak itu bukan orang Tidore atau orang Tidore sendiri tetapi bukan untuk acara adat harus minta izin ke pihak kelurahan Gurabunga.” (Wawancara, 12 September 2015).

Penjelasan informen tersebut di atas, hususnya berkaitan dengan kunjungan atau perjalanan masyarakat Tidore ke puncak Tidore untuk kepentingan upacara adat, juga sebagaimana yang diamati oleh penulis pada saat upacara adat *Legu Gam* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Afa-Afa Kota Tidore Kepulauan. Dalam upacara adat *Legu Gam* tersebut salah satu ritual yang harus dilakukan adalah perjalanan ke puncak Tidore untuk mengambil air

yang biasa disebut “*ake kalfano*”. Air yang diambil dari puncak Tidore tersebut yang kemudian digunakan pada acara tersebut dalam ritual “*tofo dango*”. Ritual *tofo dango* merupakan sebuah ritual penandaan dimulainya upacara *Legu Gam* yang dilakukan selama tiga hari tiga malam. Di Kelurahan Afa-Afa, selain upacara adat *Legu Gam*, terdapat juga upacara adat *Legu Dou*. Upacara adat *Legu Dou* yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Afa-Afa sebagai bentuk rasa syukur atas berbuahnya hasil perkebunan mereka seperti durian, cengkeh dan pala. Upacara *Legu Dou* tersebut dilakukan pada saat awal musim panen.

Kedua upacara adat tersebut merupakan salah satu objek wisata budaya potensial yang dapat dikembangkan oleh daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, pada saat kedua upacara adat tersebut digelar terlihat masyarakat Tidore dan Ternate sangat antusias untuk yang mengunjungi ke lokasi upacara, dan juga terlihat turis asing. Untuk menjaga terpeliharanya eksistensi kedua acara adat tersebut maka Bapak Hsy mengungkapkan sebagai berikut:

“....menurut saya acara adat seperti ini perlu dijaga dan dilestarikan agar budaya seperti ini tidak hilang, karena ini menyangkut dengan tradisi dan budaya kita.... dan menurut saya, acara-acara seperti ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah, karena ini adalah salah satu aset budaya daerah yang dapat dikembangkan menjadi objek pariwisata.... *torang* (kita) lihat saja, misalnya pada saat acara *legu dou*, khususnya *legu dou durian* (acara adat untuk syukuran musim durian) terdapat banyak orang yang datang kesini....” (Wawancara, 13 September 2015).

Selanjutnya, berkaitan dengan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, dan objek wisata puncak Tidore Bapak Ara menjelaskan bahwa.

“....menurut saya di Tidore ini banyak sekali objek pariwisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saya sendiri mempunyai konsep untuk pengembangan pariwisata di Kota Tidore, cuman sayangnya saya bukan orang Dinas Pariwisata.... diantara destinasi pariwisata yang saya kunjungi bersama wisatawan misalnya Ake Sahu, Kalaodi, Gurabunga, Pulau Mare, Failonga dan lain-lain. Tempat yang kami kunjungi itu biasanya diminta oleh parawisatawan, khususnya wisatawan asing, karena memang semua wisatawan yang datang ke saya adalah wisatawan asing.... mereka telah mengetahui tempat-tempat tersebut,

memang tidak semua wisatawan, tetapi secara umum mereka telah mengetahui.” (Wawancara, 6 September 2015).

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

“....hampir 80-90 persen wisatawan asing yang bersama-sama dengan saya itu mereka meminta saya untuk mendaki puncak Tidore.... Dan menurut saya puncak Tidore adalah salah satu objek wisata alam yang sangat potensial, karena tidak hanya wisatawan lokal yang berkunjung kesana tetapi juga wisatawan asing. Cuma itu, pemerintah kita yang kurang memperhatikannya.” (Wawancara, 6 September 2015).

Berkaitan dengan keberadaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, lebih lanjut Bapak Ara menjelaskan bahwa:

“....masih banyak sebenarnya objek pariwisata di Kota Tidore yang tidak diketahui oleh banyak orang termasuk pemerintah daerah, misanya sopt diving di Tanjung Putus. Di Tanjung Putus itu pemandangan bawah lautnya sangat luar biasa indah dan bisah mengalhkan Bunaken, dan di sekitar tempat tersebut banyak terdapat habitat ikan-ikan besar seperti hiu, paus dan lumba-lumba. Dan menurut para bule (wisatawan asing), di perairan sekitar Pulau Failong itu terdapat sejins ikan hiu yang sirip samping yang diguakan oleh ikan untuk berenang itu tidak di samping tetapi di bawah perut dan bentuknya seperti kaki dan mereka berjalan seperti hewan di darat, yang biasa mereka sebut *Walking Shark*, dan spesies tersebut hanya ada di perairan halmahera. Selain itu, terdapat spot diving di sekitar perairan Pulau Mare yang dikenal dengan *Kahia Masolo* (tempat berkumpul dan munculnya ikan lumba-lumba). Dan ada juga spot diving di Tanjung Konde, di depan Rum.... ini adalah potensi pariwisata yang sangat luarbiasa yang harus dijual menurut saya....” (Wawancara, tanggal 6 September 2015).

Selain di Pulau Tidore, di Kecamatan Oba Utara terdapat objek wisata bahari Pantai Guraping dan Pulau Sibu di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. Objek wisata bahari tersebut dijelaskan oleh Bapak Rus sebagai berikut.

“....di Oba Utara ini, husunya di Kelurahan Guraping ini orang dan pemerintah daerah hanya tau danau Gurua Marasai, tetapi mereka tidak tau kalau di Guraping ini ada potensi pariwisata di pantai, yaitu tanjung Guraping dan Pulau Sibu, itu pulau kecil satu di depan sana itu, pulau kecil itu sering orang-orang berlibur kesana, tetapi belum ada fasilitas apa-apa di sana, tetapi saya berusaha untuk mengembakannya menjadi salah satu tujuan wisata karena cukup bagus.... pada saat presiden menjungi kator gubernut dan beliau melihat pulau tersebut beliau sangat kagum.... dan di tanjung Guraping itu, saya belum menyelam, tetapi menurut orang yang suda pernah menyelam di tanjung itu, mereka menceritakan bahwa di depan tanjung itu pemandangan bawah lautnya

cukup indah karena terdapat terumbu karang. Dan kurang lebih 50 meter dari tepi pantai masuk ke laut itu sudah terdapat tebing yang curam kebawah dan langsung laut dalam, dan itu unik sekali....” (Wawancara, 30 September 2015).

Lebih lanjut Bapak Rus menjelaskan bahwa:

“....di danau itu (danau Gurua Marasai) terdapat hutan mangrove yang selalu kami jaga. Saya sebagai lurah selalu meminta kepada masyarakat agar menjaga hutan mangrove tersebut agar tetap terjaga.... dan saya mengusulkan agar hutan mangrove tersebut menjadi salah satu objek wisata ilmiah, karena berdasarkan hasil penelitian, hutan mangrove yang ada di danau itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan hutan mangrove di tempat lain....” (Wawancara, 30 September 2015).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penjelasan Bapak Rus memang benar, bahwa di lepas Pantai Keluarahan Guraping terdapat sebuah pulau kecil yang penduduk lokal menyebutnya “*Gura Mangofa Sibü*” (anak pulau, dan anak pulau tersebut diberinama Sibü sehingga masyarakat menyebutnya *Gura Mangofa Sibü*). Pulau Sibü dilihat dari kantor gubernur Provinsi Maluku Utara sangat indah, dan di pulau tersebut terlihat Kantor Gubernur dan rumah dinas gubernur yang sangat megah. Selain itu, berdasarkan penjelasan Bapak Rus di depan, di tepi danau Gurua Marasai terdapat hutan mangrove, dan hutan mangrove tersebut tumbuh mengelilingi danau yang kemudian menambah keindahan dan keasrian danau tersebut. Keunikan lain dari danau ini adalah danau memiliki muara langsung ke laut sehingga air di danau tersebut mengalami pasang surut mengikuti pasang surutnya air laut dan mempunyai arus yang deras pada titik-titik tertentu.

Menyimak penjelasan dari para informen dan hasil pengamatan yang dideskripsikan di depan memberikan gambaran bahwa masih terdapat beberapa objek pariwisata yang belum teridentifikasi dan terdata oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Objek pariwisata yang belum teridentifikasi tersebut merupakan objek pariwisata yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika

dikembangkan oleh daerah, dikarenakan objek-objek wisata tersebut telah banyak dikenal oleh para wisatawan asing atau manca negara. Beberapa objek pariwisata yang belum terdata dan teridentifikasi tersebut adalah:

1. Wisata alam Puncak Maitara di Pulau Maitara, berada di Kecamatan Tidore Utara;
2. Wisata budaya upacara adat *Ito Oti se Hadola Oti*, berada di Pulau Maitara Kecamatan Tidore Utara;
3. Wisata budaya *Legu Dou* di Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara
4. Wisata alam puncak Kie Matubu, berada di Pulau Tidore;
5. Wisata bahari Tanjung Putus, berada di Kecamatan Tidore Timur;
6. Wisata bahari Kahiya Masolo, berada di Kecamatan Tidore Selatan;
7. Wisata bahari Tanjung Konde, berada di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara
8. Wisata bahari Tanjung Guraping, berada di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara; dan
9. Wisata bahari Pulau Sibu, berada di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara; dan
10. Wisata alam hutan mangrove danau Gurua Marasai berada di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.

Objek wisata tersebut tidak teridentifikasi di dalam berbagai dokumen daerah yang dimiliki oleh BAPPEDA maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Hal ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai objek pariwisata potensial yang ada di masyarakat dan alam Kota Tidore Kepulauan yang tidak terdeteksi oleh pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan peran dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder daerah

untuk mendata dan mengidentifikasi berbagai objek pariwisata yang di Kota Tidore Kepulauan.

Merujuk pada berbagai data yang tersaji di depan maka dapat ditangkap beberapa gambaran sebagai berikut: pertama, secara kuantitatif, berdasarkan data sekunder dari BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) objek. Menurut Perda RTRW, jumlah objek wisata di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 35 (tiga puluh lima) objek. Sedangkan menurut Ranperda tentang RIPPDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 88 (delapan puluh delapan). Selain jumlah objek wisata berdasarkan ketiga sumber tersebut. Berdasarkan data primer yang penulis himpun, terdapat 10 (sepuluh) objek wisata potensial yang belum teridentifikasi dan terkover oleh ketiga dokumen tersebut. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa, Kota Tidore Kepulauan memiliki ketersediaan objek dan daya tarik wisata yang banyak dan keragaman jenis.

Kedua, sumber kekayaan objek wisata adalah: pertama, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah kepulauan. Dengan daerah kepulauan ini lah yang kemudian Kota Tidore Kepulauan dianugrahi berbagai potensi alam yang kaya, termasuk objek wisata alam; kedua, eksistensi Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan warisan peradaban sejarah Kerajaan Islam Kesultanan pada masa lampau. Dengan demikian Kota Tidore Kepulauan saat ini telah mewarisi berbagai peradaban seni dan budaya, dan peradaban seni dan budaya tersebut masih hidup dan dijaga oleh masyarakat hingga saat ini, yang kemudian memperkaya objek wisata sejarah kerajaan, dan seni dan kebudayaan masyarakat; ketiga, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah kedatangan para penjajah pada zaman penjajahan, karena kekayaan alam dan

hasil perkebunan pala dan cengkeh. Sebagai daerah penjajahan tersebut membuat Kota Tidore Kepulauan memiliki beberapa peninggalan para penjajah seperti benteng. Dengan peninggalan sejarah tersebut memperkaya objek wisata sejarah di daerah tersebut.

Ketiga, BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan belum memiliki data yang akurat tentang objek-objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut terlihat perbedaan data dari berbagai dokumen yang menyajikan data tentang potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Keempat, perencanaan pembangunan sektoral pariwisata merupakan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Namun dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sektoral tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan BAPPEDA sebagai institusi perencana daerah dan berbagai organisasi perangkat daerah.

Kelima, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan menggunakan dokumen daerah dan data terkait dari BAPPEDA, namun data tersebut diverifikasi dan dianalisis kembali sesuai dengan kebutuhan perencanaan dinas. Keenam, hasil identifikasi objek pariwisata di Kota Tidore yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih banyak dari sisi jenis objek dan varian wisata. Hasil identifikasi ini berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap berbagai data dan informasi tentang potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

5.1.2 Objek Wisata Unggulan Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah yang paripurna dalam ketersediaan objek pariwisata. Kota Tidore Kepulauan ditakdirkan memiliki

seluruh objek pariwisata yang terdiri dari objek wisata alam, bahari, agrowisata, sejarah, serta objek wisata seni dan budaya. Kepariwisata objek pariwisata yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan dikarenakan: pertama, Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan. Dengan ciri daerah kepulauan inilah terdapat beberapa tempat menarik secara alamiah yang kemudian menjadi kekayaan objek wisata bahari dan alam di Kota Tidore Kepulauan.

Kedua, secara topografi Kota Tidore Kepulauan memiliki daerah dan area pegunungan dan perbukitan. Pada sisi lain, secara iklim Kota Tidore Kepulauan bertipe iklim tropis. Dengan tipe iklim tropis inilah yang menyebabkan curah hujan yang terjadi sebesar 2.570–3.050 mm/tahun atau rata-rata 2000 mm, sehingga daerah ini termasuk dalam tipe iklim A atau beriklim basah yang dalam klasifikasi agroklimat termasuk dalam klasifikasi zona E1, dimana bulan basah terjadi dalam 3 bulan per tahun, sedangkan bulan kering berlangsung kurang dari 2 bulan. Suhu udara rata-rata wilayah Kota Tidore Kepulauan berkisar rata-rata maksimum 31,3°C dan rata-rata minimum 21,2°C, kelembaban rata-rata 83,5%, penyinaran matahari rata-rata 67,5% per tahun, dan tekanan udara rata-rata 1001,9 Bar (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014). Dengan keadaan cuaca seperti inilah yang menyebabkan daerah Kota Tidore Kepulauan sangat subur. Dengan adanya topografi daerah pegunungan dan berbukitan, serta iklim dan kesuburan tanah tersebut yang kemudian sangat mendukung keberadaan agrowisata dan sekaligus memperkaya objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Ketiga, Kota Tidore Kepulauan secara historis merupakan daerah kerajaan, dan eksistensi kerajaan di Tidore masih tetap ada hingga sekarang yang dikenal dengan Kesultanan Islam Tidore. Sebagai daerah kesultanan tersebut yang kemudian memperkaya hasanah peradaban seni dan budaya masyarakat di Kota

Tidore Kepulauan. Selain itu, Tidore dalam konteks sejarah nasional merupakan salah satu daerah tempat bercokolnya para penjajah yang dibuktikan dengan berbagai peninggalan seperti benteng-benteng. Melalui eksistensi sejarah, baik eksistensi sejarah daerah dan sejarah nasional tersebut menambah daftar kekayaan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Eksistensi Kota Tidore Kepulauan yang dianugrahi secara alamiah ketersediaan kekayaan sumberdaya objek pariwisata. Dengan kekayaan objek pariwisata tersebut maka sangat layak Kota Tidore Kepulauan dikembangkan menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata kawasan Timur Indonesia. Ihtiar yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah sebagaimana yang dikonsepskan dalam dokumen daerah, baik RPJPD dan RPJMD adalah suatu ihtiar yang tepat. Dikarenakan berdasarkan daya dan secara empirik Kota Tidore Kepulauan adalah daerah yang sangat terbatas ketersediaan sumberdaya alam yang dijadikan modal modal dalam pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan dan memberikan manfaat maksimal terhadap daerah, maka Kota Tidore Kepulauan harus mendorong dan mengembangkan kekayaan objek pariwisata yang dimiliki dalam pembangunan ekonomi daerah. Agar harapan dan usaha tersebut dapat terrealisasi diperlukan perencanaan yang baik dan holistik. Dalam konteks perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, diantara proses yang harus dilakukan adalah penyiapan objek wisata. Salah satu aktifitas dalam proses penyiapan objek wisata adalah penyiapan objek wisata unggulan daerah yang akan diprioritas untuk dikembangkan. Aktifitas penyiapan objek wisata unggulan daerah untuk dikembangkan perlu dilakukan, dikarenakan daerah dengan

keterbatasan sumberdaya anggaran, manusia dan lainnya, dapat mengembangkan seluruh objek wisata yang dimilikinya dalam ruang waktu yang bersamaan. Untuk melakukan mengatasi keterbatasan tersebut maka daerah perlu melakukan perencanaan. Salah satu proses perencanaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan objek wisata unggulan daerah yang diprioritaskan dalam pengembangannya.

Terkait dengan keberadaan berbagai objek pariwisata unggulan daerah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan menjelaskan sebagai berikut.

“Wisata budaya yang diandalkan untuk menarik wisatawan di antaranya kekhasan adat istiadat Tidore serta berbagai ritual, baik yang terkait dengan keagamaan maupun kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan wisata sejarah di Tidore Kepulauan yang diandalkan untuk menarik wisatawan di antaranya keberadaan Kesultanan Tidore dengan berbagai peninggalan pusakanya dan sejumlah benteng peninggalan Spanyol. Wisata sejarah lainnya di Tidore adalah perannya dalam pembebasan Papua yang saat itu menjadi Irian Barat untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta sejumlah gedung yang dulu menjadi kantor ibu kota Provinsi Irian Barat.... di Tidore Kepulauan juga memiliki potensi wisata bahari yang dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan, di antaranya panorama pantai Pulau Maitara yang pernah diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp1000 serta atraksi lumba-lumba di sekitar perairan Pulau Mare.” (antaranews.com, 28 September 2016).

Dengan keberadaan berbagai objek pariwisata unggulan yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan tersebut membuat sangat wajar dan layak jika daerah ini mengembangkan daerahnya sebagai daerah pariwisata di kawasan Timur Indonesia. Pada sisi yang lain, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah yang sangat strategis di Provinsi Maluku Utara, dimana Kota Tidore Kepulauan berada di tengah-tengah Provinsi Maluku Utara, dan menjadi gerbang masuk-keluar arus manusia, barang dan jasa di kawasan Maluku Utara. Hal tersebut

sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015: 54) sebagai berikut:

“Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam berupa kawasan objek wisata yang cukup beragam dan menakjubkan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dimana potensi yang dimiliki sangat didukung oleh letak geografis Kota Tidore Kepulauan yang sangat strategis sebagai wilayah kepulauan, sehingga Kota Tidore Kepulauan disebut sebagai wilayah pusat pelayanan pariwisata Provinsi Maluku Utara.”

Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai rencana pembangunan objek-objek wisata unggulan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil *mapping* objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah disajikan di depan. Berbagai objek pariwisata tersebut dikaji dan dianalisis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Melalui hasil kajian dan analisis tersebut yang kemudian terseleksi beberapa objek pariwisata yang dianggap unggulan, dan objek wisata unggulan tersebut yang akan dikembangkan oleh daerah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015: 54) sebagai berikut:

“Dengan beragam dan bervariasi objek dan daya tarik wisata yang dimiliki, mulai dari jenisnya, tingkat keindahan/daya tariknya, dan nilai spesifiknya maupun aksesibilitas. Berdasarkan hasil analisis, maka tidak semua objek dapat dikembangkan secara bersamaan, namun dipilih objek dan daya tarik yang dapat menjadi emberio perkembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu perlu ditetapkan dan dikembangkan objek dan daya tarik wisata yang dapat diunggulkan.”

Dalam upaya melakukan pengembangan objek wisata unggulan yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015: 54) menyebutkan tiga kriteria yang harus diperhatikan, yaitu: “1) mempunyai daya tarik yang spesifik; 2) tidak terdapat atau jarang terdapat di daerah lain; dan 3) ciri dan karakteristik alam sekitar relatif indah”. Dengan menggunakan ketiga kriteria tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai objek wisata unggulan di Kota Tidore Kepulauan. Objek wisata unggulan tersebut yang disiapkan untuk dikembangkan. Hasil kajian dan analisis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2015: 54-59) melahirkan objek wisata unggulan yang siap dikembangkan oleh Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

- a. Wisata bahari/tirta, terdiri dari:
 1. Pantai Ake Sahu, di Kecamatan Tidore Timur;
 2. Pantai Noramake-Paceda, di Kecamatan Oba Tengah;
 3. Pantai Cobao, di Kecamatan Tidore Timur;
 4. Pulau Maitara, di Kecamatan Tidore Utara;
 5. Pulau Mare, di Kecamatan Tidore Selatan;
 6. Pulau Woda, di Kecamatan Oba; dan
 7. Pantai Tugulifa, di Kecamatan Tidore.
- b. Wisata alam, terdiri dari:
 1. Danau Gurua Marasai, di Kecamatan Oba Utara;
 2. Air Terjun Sigela, di Kecamatan Oba; dan
 3. Taman Nasional Aketajawe, di Kecamatan Oba, Oba Tengah, dan Oba Utara;
- c. Wisata sejarah, terdiri dari:
 1. Kadato Sultan Tidore, di Kecamatan Tidore;
 2. Benteng Tahula, di Kecamatan Tidore;
 3. Benteng Tore, di Kecamatan Tidore;
 4. Masjid Sultan, di Kecamatan Tidore;
 5. Makam Sultan Nuku, di Kecamatan Tidore; dan
 6. Musium Sonyine Malige, di Kecamatan Tidore.
- d. Wisata budaya dan seni, terdiri dari:
 1. Hari Jadi Tidore; dan
 2. Legu Gam;
- e. Agrowisata, terdiri dari:
 1. Agrowisata Gurabunga; dan
 2. Agrowisata Kalaodi.

Hasil analisis dan kajian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang melahirkan beberapa objek wisata unggulan yang siap dikembangkan oleh daerah. Hasil analisis dan kajian sebagaimana tersebut di atas maka dapat dijumpai bahwa di Kota Tidore Kepulauan terdapat 7 (tujuh) objek wisata bahari unggulan, 3 (tiga) objek wisata alam unggulan, 6 (tujuh) objek wisata sejarah unggulan, 2 (dua) objek wisata budaya dan seni unggulan, dan 2 (dua) objek agrowisata unggulan. Untuk memberikan gambaran tentang

objek wisata unggulan tersebut, maka objek-objek wisata tersebut didiskripsikan sebagai berikut.

(1). Pantai Ake Sahu

Objek wisata Pantai Ake Sahu terletak di timur Pulau Tidore. Secara administrasi objek wisata Pantai Ake Sahu berada di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur. *Ake Sahu* yang berarti “Air Panas”, penamaan tersebut diberikan oleh masyarakat setempat dikarenakan di pantai tersebut terdapat sebuah kolam air panas alami yang berdiameter ± 4 meter dengan kedalaman air satu meter lebih. Kolam air panas *Ake Sahu* berair tawar meskipun berada di tepi pantai, dan airnya cukup jernih (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 1).



Gambar 5.1 Atraksi Alam di Pantai Ake Sahu, Kota Tidore Kepulauan
Sumber: Foto Penulis, 2015

Sumber mata air panas *Ake Sahu* berasal dari mata air yang muncul dari sela-sela batu dan akar pohon beringin yang tumbuh di sebelah timur dari kolam tersebut. Pohon beringin dan kolam *ake sahu* tersebut diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat mistik yang dikeramatkan, dan air panas ini diyakini oleh masyarakat setempat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Keyakinan masyarakat tentang nilai mistik yang terdapat pada *ake sahu* dan pohon beringin tersebut dibuktikan dengan banyaknya sobekan kain-kain yang diikatkan pada akar pohon beringin. Ikatan tersebut sebagai tanda bagi

pengunjung yang berkunjung dan mandi di air panas tersebut dengan niat tertentu. Hal tersebut sebagaimana diceritakan oleh Bapak Kah sebagai berikut:

“....*Ake Sahu* itu salah satu tempat keramat di Tidore.... *dulu* (masa sebelumnya) itu orang pergi ke sana itu dengan tujuan tertentu, misalnya orang sakit gatal-gatal yang *tara* (tidak) bisa ilang (sembuh) atau orang luka yang lukanya lama *tapi tara bisa ilang* (tetapi tidak bisa sembuh), *dorang* (mereka) pergi mandi di *ake sahu* dengan niat agar penyakit yang *dorang dapa* (mereka derita) bisa sembuh, dan itu bisa terjadi.... tetapi sekarang saya suda tidak tau kalau kebisaan seperti itu masi *dorang biking* (mereka lakukan), karena sekarang ini suda banyak mantri dan dokter....” (Wawancara, 25 Oktober 2015).

Amatan penulis, atraksi alam Pantai Ake Sahu cukup indah, dikarenakan di pantai ini terdapat hamparan pasir halus dan air laut yang jernih. Didukung dengan pemandangan laut yang terhampar luas dan membiru. Pada bagian daratan Pantai Ake Sahu dilatari oleh perbukitan dengan hutan yang menghijau di seberang jalan.

Objek wisata Pantai Ake Sahu telah dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Fasilitas yang tersedia di Pantai Ake Sahu adalah kamar mandi, toilet, tempat parkir dan gazebo. Akses untuk menuju ke tempat ini sangat mudah dengan menggunakan jalan darat dari pusat kota Tidore dengan fasilitas jalan yang cukup baik. Jarak tempuh untuk mencapai Pantai Ake Sahu dari pusat kota ± 8 km (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 1).

(2). Pantai Noramake-Paceda

Pantai Noramake-Paceda secara administrasi berada pada wilayah Desa Noramake dan Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah. Destinasi wisata Pantai Noramake-Paceda memiliki atraksi alam yang cukup indah dengan kondisi pantai yang bersih dan suasana alam yang sejuk dengan hembusan angin pantainya. Pantai Noramake-Paceda memiliki garais pantai yang cukup panjang didukung

dengan adanya tumbuhan pepohonan yang memberikan suasana alami di sekitar pantai yang memberikan kesan yang menarik setiap pengunjung. Daya tarik lain dari Pantai Noramake-Paceda adalah dengan adanya berbagai spesies ikan yang hidup di sekitar pantai, dan bermainnya ikan-ikan di dasar laut terlihat dengan indah karena air laut yang cukup jernih (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 5).

Namun demikian, pengamatan penulis, Pantai Noramake-Paceda berpotensi rusak dan tercemar jika tidak dijaga dan dirawat, dikarenakan pada lokasi ini terdapat pemukiman penduduk. Oleh karena itu, menurut Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015: 6) "Potensi alam yang dimiliki Pantai Noramake-Paceda harus tetap dijaga. Pantai Noramake-Paceda merupakan salah satu pantai yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata yang menarik dan unggulan".



Gambar 5.2 Atraksi Alam Pantai Noramake-Paceda
Sumber: Foto Penulis, 2015

Akses untuk mencapai pantai tersebut dapat dilalui dengan dua alternatif transportasi, yaitu akses jalur laut dan darat. Perjalanan laut dari Pulau Tidore ke Pantai Noramake-Paceda dapat ditempuh dalam waktu ± 35 menit. Sedangkan untuk akses darat dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan

roda empat (mobil) dari Kota Sofifi ± 1 (satu) jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup baik (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, (2015: 5).

(3). Pantai Cobo

Destinasi wisata bahari Pantai Cobo secara administrasi berada di wilayah Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur. Pantai Cobo merupakan tempat wisata yang menarik, karena Pantai Cobo terhampar pasir halus, dan luas Pantai Cobo ± 5 hektar serta pantai yang cukup bersih. Pemandangan alam Pantai Cobo semakin asri dengan didukung oleh pemandangan laut selat Halmahera yang luas, dan di belakang pantai terdapat bukit dan hutan-hutan produktif, serta di kejauhan terlihat puncak Gunung Gamalama Ternate (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 2).



Gambar 5.3 Atraksi Alam Pantai Cobo
Sumber: Foto Penulis, 2015

Untuk mencapai Pantai Cobo, menurut amatan penulis dapat dilakukan melalui darat dan laut. Akses melalui jalur laut biasanya digunakan oleh pengunjung dari luar pulau Tidore seperti pengunjung dari Ternate. Pantai Cobo relatif ramai didatangi pengunjung pada saat hari libur. Namun di pantai tersebut belum terdapat fasilitas pendukung pariwisata. Untuk jalur darat dapat ditempuh melalui jalur lingkaran timur dan lingkaran barat Pulau Tidore. Jarak tempuh dari pusat kota ke Pantai Cobo melalui jalur lingkaran timur ± 18 km (Dinas Pariwisata Kota

Tidore Kepulauan, 2015), untuk jalur lingkaran barat, jarak tempuh dari pusat kota ke Pantai Cobo ± 24 km (BAPPEDA, 2015: 31).

(4). Pulau Maitara

Pulau Maitara adalah sebuah pulau kecil yang secara geografis berada diantara Pulau Tidore dan Ternate, dengan titik koordinat $00,44^{\circ}$ - $2,3^{\circ}$ LU dan $127,21^{\circ}$ - $57,29^{\circ}$ BT. Pulau Maitara memiliki luas 14 km^2 , secara administratif Pulau Maitara masuk dalam wilayah Kecamatan Tidore Utara, dan di Pulau Maitara terdapat 4 (empat) desa, yaitu Desa Maitara, Maitara Selatan, Maitara Utara, dan Maitara Tengah (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014).



Gambar 5.4 Atraksi Alam Pulau Maitara
Sumber: Foto Penulis, 2015

Pulau Maitara memiliki objek wisata seperti wisata bahari pantai Maitara dan wisata alam Puncak Maitara. Masing-masing objek tersebut memiliki daya tarik tersendiri yang layak dikunjungi. Daya tarik dari pantai Maitara adalah hamparan pasir pantai dengan panorama alam yang sangat indah. Dari pantai Maitara pengunjung dapat menikmati pemandangan Puncak Kie Matubu (Puncak Tidore) dan Puncak Gamalam (Puncak Ternate). Selain itu, di Pulau Maitara terdapat objek Puncak Maitar. Dari puncak Maitara para wisatawan dapat melihat keindahan alam disekitar Pulau Maitara secara 360° , dimana terlihat indahnya pemandangan Pulau Tidore, Kota Ternate dengan latar belakan Gunung

Gamalamanya, dan aktifitas lalulintas transportasi laut speed boot dari Tidore ke Ternate dan sebaliknya dan juga kapal fery sebagai penghubung antara kedua pulau tersebut. Pulau Maitara semakin dikenal oleh para wisatawan dikarenakan pulau tersebut terdapat dalam gambar uang kertas seribu rupiah (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 10).

Selain objek wisata bahari dan alam tersebut, di Maitara terdapat objek wisata budaya seperti Debus dan upacara adat *Ito Oti se Hadola Oti*. Di Pulau Maitara juga selalu dilakukan acara Maitara Festival yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Pulau Maitara memiliki buah khas yaitu buah sukun. Di Provinsi Maluku Utara terdapat beberapa daerah penghasil buah sukun yang sering dipasarkan, seperti Pulau Moti, Tahu (Tidore), dan Pulau Maitara. Namun buah sukun dari Pulau Maitara memiliki rasa yang khas, sehingga Pulau Maitara juga dikenal sebagai Pulau *Amo* (Sukun).



Gambar 5.5 Pantai Pulau Maitara dan Monumen Seribu Rupiah
Sumber: Foto Penulis, 2015

Akses ke Pulau Maitara sangat mudah dengan menggunakan transportasi laut. Untuk menuju ke Pulau Maitara, pengunjung dapat melakukan melalui Pelabuhan Rum dari Pulau Tidore, dan juga melalui Pelabuhan Basting dari Ternate. Jarak tempuh dari Rum Tidore $\pm$ 2-3 menit dan dari Basting Ternate $\pm$ 6-7 menit dengan menggunakan speed boat. Selain speed boat, pengunjung juga menggunakan pelayaran rakyat perahu bermotor yang selalu melayani

masyarakat yang menuju ke Pulau Maitara (Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 11).

(5). Pulau Mare

Pulau Mare secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Tidore Selatan. Pulau Mare merupakan salah satu pulau yang telah dihuni di Kota Tidore Kepulauan dengan luas 19 km², dimana di pulau tersebut terdapat dua desa, yaitu Desa Mare Gam dan Desa Mare Kofo dengan jumlah penduduk 918 jiwa (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014). Secara geografis Pulau Mare terletak pada titik koordinat 00,34-7,7 LU dan 124,22-46,24 BT (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015:10).



Gambar 5.6 Pulau Mare Dilihat Dari Pulau Tidore
Sumber: Foto Penulis, 2015

Daya tarik dari Pulau Mare adalah terdapat batu yang berbentuk raksasa oleh masyarakat setempat keberadaan dari batu tersebut dikaitkan dengan legenda dan cerita rakyat tentang penyebutan Pulau Mare. Panorama alam Pulau Mare sangat indah dengan hamparan pasir putih di pantainya. Pemandangan bawah laut perairan disekitar Pulau Mare sangat indah utamnay spot diving *Kahia Masola* (tempat berkumpulnya ikan lumba-lumba). *Kahia Masola* adalah tempat berkumpul dan munculnya ikan lumba-lumba ke permukaan laut. Selain itu, di Pulau Mare terdapat hewan rusa yang hidup secara liar di

pegunungan Pulau Mare, sehingga masyarakat di pulau tersebut sering melakukan perburuan terhadap hewan tersebut. Di pulau mare sendiri terdapat seni kerajian gerabah, dan biasa yang dibuat oleh masyarakat Pulau Mare adalah peralatan dapaur seperti periuk yang biasa disebut oleh masyarakat Tidore *Boso Mare*, *Cobe* (wadah untuk menghaluskan bumbu masakan), *Boso Hula Keta* (wadah untuk membakar/mencetak sagu, makanan khas Tidore) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 10).



Gambar 5.7 Panorama Munculnya Ikan Lumba-lumba di Perairan Pulau Mare
Sumber: Foto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore (2014)

Untuk mencapai Pulau Mare dapat ditempuh dengan menggunakan speed boat dari pelabuhan Goto selama $\pm$ 15 menit perjalanan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 10). Selain itu, menurut amatan penulis, untuk menyebrang ke Pulau Mare dapat dilakukan melalui pelabuhan yang berada di Kelurahan Tomolou Kecamatan Tidore Selatan. Menurut Ibu Ija “....Pelabuhan Tomolou sesungguhnya adalah pelabuhan pendaratan ikan (PPI), namun pelabuhan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Mare dan orang-orang yang berkunjung ke Pulau Mare sebagai pelabuhan penyeberangan....” (Wawancara, 7 Oktober 2015). Penyebarangan ke Pulau Mare melalui pelabuhan Tomolou dilayani oleh pelayaran rakyat dengan menggunakan perahu bermotor dengan tarif sekali jalan Rp. 10.000,- (sepuluh

ribu rupiah), dan jadwal pelayarannya 3 (tiga) kali sehari, yaitu pada pagi, siang dan sore hari.

(6). Pulau Woda

Pulau Woda adalah sebuah pulau dengan laus daratan 0,30 km², yang secara adminisitratif berada dalam wialayah Kecamatan Oba (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014). Secara geografis Pulau Woda terletak pada titik koordinat 00,43⁰-54,10⁰ LU dan 127,34⁰-40,37⁰ BT. Menurut cerita rakyat, nama Pulau Woda berasal dari kata *wohoda* yang artinya “dia melihat”. Artinya dia melihat dari kejauhan ada daratan yang tidak berbukit tetapi ditumbuhi tanaman bakau yang hijau. Cerita tersebut secara faktual sangat sesuai dengan topografi pulau tersebut yang memang tidak berbukit (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 9).

Pulau Woda memiliki aktraksi alam yang cukup indah sebagai objek wisata. Daratan kecil Pulau Woda tersebut ditumbuhi hutan bakau secara alami, dan juga terdapat pohon kelapa yang ditanam oleh masyarakat. Selain itu, di pulau tersebut ditumbuhi banyaknya rumput spons sehingga nampak terlihat daratan yang menghijau. Suasana alam tersebut yang membuat Pulau Woda semakin asri dan suasana alam yang sangat sejuk. Di pulau tersebut terdapat banyak tambak ikan yang dibuat oleh masyarakat sehingga sangat potensial sebagai spot untuk melakukan memancing (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 9).

(7). Pantai Tugulufa

Pantai Tugulufa merupakan pantai yang berada di pusat kota, yang juga merupakan salah satu *icon* Kota Tidore Kepulauan, dan memiliki daya tarik

tersendiri. Secara administratif Pantai Tugulufa berada dalam wilayah Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore. Pantai Tugulufa pada saat sekarang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan melakukan penghijauan dengan menanam pohon sehingga menambah daya tarik dari kawasan tersebut (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 16).



Gambar 5.8 Pemandangan Pantai Tugulufa
Sumber: Foto Penulis, 2015

Amatan penulis, pemerintah daerah dalam pengembangan Pantai Tugulufa dengan melakukan duplikasi konsep pengembangan Tanjung Bunga di Kota Makassar dan Taman Nukila di Kota Ternate. Hal ini terlihat dari konsep pengembangan wilayah dan pembangunan fisiknya seperti melakukan reklamasi pantai dan penanaman pohon-pohon serta pembangunan taluk penahan ombak.

(8). Danau Gurua Marasai

Danau Gurua Marasai merupakan salah satu objek wisata alam yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan. Danau tersebut berada di Kota Sofifi, Ibukota Provinsi Maluku Utara. Secara administratif Danau Gurua Marasai berada pada wilayah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. Luas secara keseluruhan Danau Gurua Marasai adalah ± 10 Ha., danau ini terbentuk akibat terjadinya intrusi air laut, sehingga air dari Danau Gurua Marasai berasa asin dan mengalami pasang surut mengikuti pasang surutnya air

laut (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 17). Menurut amatan penulis, pada titik-titik tertentu dalam perairan Danau Gurua Marasai terdapat arus yang cukup deras. Terjadinya arus yang deras tersebut disebabkan mengalirnya air danau akibat pasang-surutnya air di danau tersebut.



Gambar 5.9 Atraksi Alam Danau Gurua Marasai
Sumber: Foto Penulis, 2015

Daya tarik dari Danau Gurua Marasai adalah posisi danau yang tidak jauh dari pantai Guraping dan di belakang danau tersebut terdapat perbukitan dengan hutan yang lebat dan masih alami. Selain itu, Danau Gurua Marasai dikelilingi hutan mangrove yang membuat danau ini semakin indah dan asri (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 17). Menurut amatan penulis, Danau Gurua Marasai berada pada posisi yang cukup strategis untuk sebuah destinasi wisata, dimana Danau Gurua Marasai berada di kawasan perkotaan dan di tengah-tengah perkantoran pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Akses menuju Danau Gurua Marasai cukup mudah dikarenakan keberadaan danau di tengah kota dan berada di tepi jalan regional Kota Sofifi. Untuk akses dari Pulau Tidore, perjalanan ke Danau Gurua Marasai dapat ditempuh dengan *speed boat* dalam waktu $\pm$ 45 menit, dan dari Ternate $\pm$ 60 menit (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 17). Untuk akses ke Danau Gurua Marasai ini, menurut amatan penulis, posisi danau

ini cukup strategis dikarenakan jalan trans/lintas Pulau Halmahera melewati Danau Gurua Marasai. Di atas Danau Gurua Marasai dibangun jembatan, dan menjadi jalan menuju pusat Kota Sofifi dari arah utara Pulau Halmahera. Artinya, orang-orang yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur yang hendak ke Kota Ternate dan Tidore harus melalui jalur tersebut, jalan tersebut sebagai salah pintu masuk ke Kota Tidore Kepulauan. Pada sisi lain, Danau Gurua Marasai berdekatan dengan pelabuhan penyeberangan kapal feery Sofifi-Ternate dan Sofifi-Tidore.

(9). Air Terjun Sigela

Air Terjun Sigela berada di Desa Sigela Kecamatan Oba. Untuk mencapai objek wisata tersebut pengunjung harus melakukan perjalanan darat dari Kota Sofifi dengan menggunakan mobil atau sepeda motor dengan jarak tempuh $\pm$ 20 km ke Desa Sigela, setelah berada di Desa Sigela, pengunjung harus berjalan kaki menuju Air Terjun Sigela. Daya tarik dari Air Terjun Sigela adalah air yang mengalir dari ketinggian dengan volumen yang cukup besar. Selain itu, Air Terjun Sigela memiliki dua kolam yang beringkat, dan dibet airnya tidak pernah berkurang walaupun pada musim kemarau. Pada sisi lain, secara fisik keberadaan Air Terjun Sigela dan kawasan hutan disekitarnya masih alami yang membuat panorama alam pada kawasan tersebut sangat indah dan sejuk (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 19-20).

Kawasan wisata alam Air Terjun Sigela sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya wisatawan lokal pada saat hari-hari libur. Oleh karena itu, objek wisata Air Terjun Sigela dapat dikatakan sebagai objek wisata primadona untuk masyarakat Kecamatan Oba dan Oba Selatan. Namun objek wisata tersebut belum dibangun dan dikelola secara baik sehingga belum ada

fasilitas pariwisata di kawasan tersebut (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 20).

(10). Taman Nasional Aketajawe

Taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan taman nasional tersebut dilindungi untuk kepentingan perlindungan ekosistem alam hayati dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya serta pariwisata. Kota Tidore Kepulauan memiliki kawasan taman nasional yang diberi naman “Taman Nasional Aketajawe”. Taman Nasional Aketajawe secara administratif berada pada Desa Lolobata, atau bisa juga disebut Desa Koli oleh masyarakat setempat, desa tersebut masuk dalam Kecamatan Oba Utara. Kawasan Taman Nasional Aketajawe merupakan salah satu potensi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 21).



Gambar 5.10 Gerbang dan Atraksi Alam Kawasan Taman Nasional Aketajawe
Sumber: Foto Penulis, 2015

Daya tarik Taman Nasional Aketajawe diantaranya hamparan hutan yang masih alami dengan berbagai jenis vegetasi endemik Pulau Halmahera seperti pohon kenanga, ngatotangon dan lainnya. Selain itu, terdapat habitat hewan liar seperti babi dan rusa, kupu-kupu, serta berbagai jenis burung endemik Pulau

Halmahera, burung maleu, berbagai jenis burung kakatua, dan burung bidadari. Topografi Taman Nasional Aketajawe adalah berbukit dan berlembah yang ditumbuhi pohon-pohon dan hutan lebat yang masih sangat alami (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 21).

Dalam kawasan Taman Nasional Aketajawe terdapat sebuah danau yang diberi nama oleh masyarakat setempat bendungan “Kahoho”. Nama tersebut diambil dari nama kepala suku Tugutil yang hidup di dalam kawasan hutan tersebut. Suku Tugutil adalah suku asil Pulau Halmahera yang kehidupannya masih primitif dan nomaden. Keberadaan bendungan Kahoho menambah daya tarik Taman Nasional Aketajawe. Bendungan Kahoho memiliki air yang jernih dan mempunyai panorama alam yang cukup indah, sehingga berpotensi sebagai salah satu destinasi wisata yang harus layak dikunjungi. Untuk mencapai kawasan Taman Nasional Aketajawe dapat ditempuh dengan melakukan perjalanan dari Kota Sofifi dalam lama perjalanan ± 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 22).

(11). Kadato (Keraton) Kesultanan Tidore

Kadato (Keraton) Kesultanan Tidore merupakan salah satu warisan peradaban budaya dan seni arsitektur Kesultanan Tidore yang masih terjaga dan terpelihara hingga saat ini, walaupun mengalami perubahan dalam sisi material bangunan yang digunakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015: 23) menjelaskan tentang sejarah Kesultanan dan pusat pemerintahan beserta Kadato Kesultanan Tidore mengalami beberapa kali perpindahan.

“Catatan Kesultanan Tidore menjelaskan bahwa, kerajaan ini berdiri sejak *Jou Kolano* (Tuan Sultan) Sahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 H (1108 M). Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan pada saat itu.... Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Barulah pada era *Jou Kolano* (Tuan Sultan) Bunga Mabunga Balibung, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak, itupun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan dimana sebenarnya Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore, dan adapula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore selatan.... Pada tahun 1495 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara.... selanjutnya ibukota dipindahkan ke Toloa di selatan Tidore oleh Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah yang berkuasa pada 1626-1631), beliau membangun Kadaton Biji Negara.... Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore oleh Sultan Saifudin alias Jou Kota, yang berkuasa pada 1657-1674, dan beliau membngnaguan Kadaton Salero. Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Selanjutnya pada masa Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah yang berkuasa pada masa 1821-1856, beliau membangun Kadatan Kie.”



Gambar 5.11 Kadaton Kesultanan Tidore
Sumber: Foto Penulis, 2015

Daya tarik dan keunikan Kadatan Kesultanan Tidore adalah dari sisi asitekturnya yang mengandung nilai-nilai filosofi yang tinggi, diantaranya: pertama, secara fisik bangunan Kadataon menyerupai orang yang sedang duduk bersilah mempunyai makna menyembah kepada Allah; Kedua, kuba kadatan yang berbentuk kerucut bermakna kedamaian; dan ketiga, sentuhan arsitektur

bangunan yang disebut “*Jiko Sarabi*”, dimana *Jiko* bermakna memanjang seperti gunung/pulau, dan *Sarabi* berarti ruang tamu. Konstruksi bangunan kadaton yang memanjang dan mempunyai ruang tengah untuk menemui tamu (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 23).

(12). Benteng Tahula

Benteng Tahula merupakan bangunan peninggalan sejarah yang dibangun oleh Bansa Spanyol pada tahun 1521 M. Benteng tersebut berada pada posisi yang cukup strategis dikarenakan letaknya di atas bukit Tanjung Soasio. Benteng Tahula dipergunakan oleh Bangsa Spanyol untuk penyimpanan senjata dan sebagai benteng pertahanan pada saat pertempuran melawan Bangsa Belanda. Saat keberadaan Benteng Tahula secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Kondisi fisik Benteng Tahula pada saat ini masih dalam keadaan utuh 80%, dan telah dipugar oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan tanpa merubah konstruksi bangunan aslinya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 27).



Gambar 5.12 Benteng Tahula dan Atraksi Alam di Sekitarnya
Sumber: Foto Penulis, 2015

Menurut amatan penulis, daya tarik dari Benteng Tahula adalah selain sebagai peninggalan sejarah yang penuh dengan nilai sejarah dan sumber pengetahuan. Benteng Tahula yang dibangun di atas bukit dan pesisir pantai

membuat bangunan benteng dan pemandangan di sekitarnya sangat indah. Di atas bangunan Benteng Tahula pengunjung dapat melihat hamparan laut dan melintangnya Pulau Halmahera di seberang lautnya. Pemandangan sudut Kota Tidore dengan latarbelakan Gunung Kie Matubu (gunung dan puncak Tidore). Selain itu, di belakang Benteng Tahula terhampar bukit dan pepohonan dan hutan yang hijau.

Keberadaan Benteng Tahula di atas bukit tersebut yang membuat para pengunjung harus mendaki 126 anak tangga untuk mencapai benteng tersebut. Tangga tersebut dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari revitalisasi objek wisata Benteng Tahula. Benteng Tahula berada di tengah Kota Tidore Kepulauan dan tepat di sisi jalan dalam kota sehingga akses untuk mencapai benteng tersebut sangat mudah. Dari Ternate, pengunjung dapat melakukan perjalanan dari pelabuhan Rum dengan berbagai kendaraan, baik umum maupun pribadi dengan jarak tempuh $\pm$ 20 km (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 27).

(13). Benteng Torre

Benteng Torre adalah salah satu bukti sejarah kedatangan Bangsa Eropa di Nusantara, utamanya di Tidore pada masa penjajahan. Menurut buku "*Dokumenta Malucensi*" di Kota Soasio terdapat sebuah benteng yang dibangun oleh Bangsa Portugis. Benteng tersebut dibangun atas perintah Sanco de Vasconcelos telah mendapat izin dari Sultan Gapi Baguna pada tanggal 6 Januari 1578. Izin tersebut diberikan akibat Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah setelah Portugis membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570. Nama Torre disebutkan pada benteng tersebut karena pimpinan Portugis

yang memimpin membangun benteng tersebut adalah Kapten Hernando de la Torre (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 28).



Gambar 5.13 Benteng Torre dan Atraksi Alam di Sekitarnya
Sumber: Foto Penulis, 2015

Kondisi fisik Benteng Torre pada saat ini telah direnovasi oleh pemerintah daerah namun tinggal 60% yang utuh, sebelum direnovasi kondisi benteng rusak berat dan tertinggal 30% yang utuh. Benteng Torre berada di atas bukit sekitar kawasan Kadato Kesultanan Tidore dan makam Kapita Lau serta Makam Sultan Zainal Abidin Syah. Secara administratif Benteng Torre berada di wilayah Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Panorama alam di sekitar Benteng Torre sangat indah, di mana pengunjung dapat melihat sudut Kota Tidore, Dermaga Sultan Tidore, dan hamparan Selat Halmahera. Pada sisi barat atau di belakan bangunan benteng, pengunjung dapat melihat indah perbukitan yang hijau dan gunung/puncak Kie Matubu (Puncak Tidore) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 27-28).

Amatan penulis, Benteng Torre cukup strategis dari sisi akses. Keberadaan Benteng Torre berada di tengah atau diapit oleh Benteng Tahula dan Kadaton Kesultanan Tidore. Oleh karena itu, untuk mengunjungi Benteng Torre pengunjung hanya berjalan kaki $\pm$ 500 meter dari Benteng Tahula atau dari Kadaton Kesultanan.

(14). Masjid Sultan

Masjid Sultan adalah masjid yang dibangun oleh Kesultanan Tidore sebagai sarana ibadah dan siar Islam. Secara organisatoris para imam dan pengurus masjid merupakan bagian dari struktur pemerintahan kesultanan. Secara historis, Masjid Sultan dibangun pada tahun 1700 M, dan masjid tersebut telah beberapa kali direnovasi. Pada saat pertama kali masjid dibangun, masjid Sultan beratapkan alang-alang, dan pada tahun 1884 masjid renovasi dan atapnya diganti dengan menggunakan daun rumbia. Terakhir kali masjid Sultan di renovasi pada tahun 2014 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 23).

Masjid Sultan yang telah mengalami beberapa kali renovasi, namun bentuk arsitektur masjid tidak pernah dirubah. Dari sisi bentuk atap, antara bentuk atap masjid dan karaton kesultanan mengalami kesamaan yaitu berbentuk kerucut, perbedaannya adalah kubuah masjid yang bersusun tiga. Pada bagian dalam masjid terdapat empat 4 (empat) pilar yang bermakna 4 (empat) *Khulafaurasidin* yaitu: Khalifa Umar bin Khatab, Abubakar Assidiq, Usman bin Affan dan Ali bin Abithalib. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sas:

“....Masjid Sultan itu sejak dibangun sampai sekarang telah beberapa kali diperbaiki, tetapi bentuk badan bangunan dan atapnya *tara* (tidak) pernah dirubah modelnya tetap seperti itu.... di dalam Masjid Sultan terdapat empat tiang yang artinya empat khalifa sahabat Nabi.... dan di dalam masjid itu juga terdapat empat arah kiblat yang sama dengan di Makkah, cuman arah kiblat yang biasa di pakai sambayang sekarang ya ke tempat matahari terbenam.” (Wawancara, 26 September 2015).

Lebih lanjut Bapak Sas menjelaskan bahwa:

“....imam yang bawa (memimpin) sambayang (sholat) di Masjid Sultan itu *tara* (tidak) sabarang orang. Yang bisa bawa sambayang di situ (Masjid Sultan) cuma imam-imam yang diangkat dari marga keturunan Togubu, Imam Ngofa, Jawa Konora, Fabanyo, dan Jawa Turu.... selain dari

keturunan marga-marga tersebut *tara* (tidak) bisa diangkat menjadi imam di Masjid Sultan.... waktu jaga *dorang* (meraka para imam) satu bulan....(maksudnya adalah masa tugas memimpin sholat para imam bergantian, dan satu orang imam memimpin sholat selama satu bulan dan setelah itu diganti oleh imam yang lain secara bergiliran, pen.)” (Wawancara, 26 September 2015)



Gambar 5.14 Masjid Kesultanan Tidore
Sumber: Foto Penulis, 2015

Amatan penulis, Masjid Sultan selalu digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat 5 (lima) waktu, husnya masyarakat Soasio yang berada di sekitar masjid. Secara administratif, keberadaan Masjid Sultan berada di wialayah Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Untuk mengunjungi Masjid Sultan, tidak mengalami kesulitan dikarenakan masjid berada dijalan utama Kota Tidore yang dilewati kendaraan umum. Selian itu, seluruh masyarakat Kota Tidore sangat familiar dan mengetahui keberadaan masjid tersebut.

(15). Makam Sultan Nuku

Sultan Nuku adalah salah satu Pahlawan Nasional, dan Beliau merupakan satu-satunya Pahlawan Nasional dari Provinsi Maluku Utara saat ini. Sultan Nuku lahir pada tahun 1738 dan Beliau menutup usianya pada tanggal 14 November 1805. Sultan Nuku mempunyai nama lengkap “Sultan Syaedul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El Mabus Kaicil Paparangan Jou Barakati”, yang sering juga dipanggil “*Jou Barakati*” yang bermakna “Sultan yang mempunyai keilmuan spiritual yang tinggi dan mempunyai keberkatan”. Sultan

Nuku merupakan Sutan Tidore yang ke 30, dan Beliau berkuasa pada tahun 1797-1805 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 29-30).



Gambar 5.15 Makam Sultan Nuku
Sumber: Foto Penulis, 2015

Dalam catatan sejarah, Sutan Nuku adalah Sultan yang berhasil membangun kesadaran nasionalisme dan kekuatan untuk berjuang membela dan mempertahankan daerah kekewasaan Kesultanan Tidore serta Maluku Kie Raha dari para penjajah Eropa. Kemampuan kepemimpinan dan daya juangnya sehingga Sutan Nuku merupakan Sultan yang berhasil mengusir para penjajah dari daerah kekewasaan Maluku Kie Raha pada masa kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinannya Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan dan keemasannya. Beliau membangun sistem pemerintahan moderen dengan para dewan wazir yang biasa disebut “*Kolano Sei Bobato Pehak Raha*” (Sultan dan keempat kementriannya), yaitu: 1). *Pehak Lebee* atau Urusan Agama/Syari’ah yang bisa juga disebut *Bobato Aherat* (Urusan Ahirat) dikepalai oleh seorang Kadhi; 2). *Pehak Bobato* atau Urusan Pemerintahan dikepalai oleh *Jou jau* (Perdana Menteri); 3). *Pehak Kompania* atau Urusan Pertahanan dan Keamanan dikepalai oleh *Kapita* (Panglima); dan 4). *Pehak Juru tulis* atau Urusan Tata-Usha dikepalai oleh *Tullamo* (Sekretaris Negara). Dewan wazir tersebut mempunyai empat tugas pokok, yaitu: menetapkan undang-undang; menentukan

garis kebijakan pemerintahan; mengesahkan peperangan dan perdamaian; dan mengangkat Raja, Sangaji, Hukum, Gimalah (semacam gubernur dan bupati) di daerah kekuasaan Kesultanan Tidore (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 30).

Amatan penulis, Makam Sultan Nuku sangat mudah dijangkau oleh pengunjung dan pejiarah. Keberadaan Makam Sultan Nuku di tengah pemukiman penduduk Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Makam Sultan Nuku berada di tepi jalan lintas regional Kota Tidore dan dilalui oleh kendaraan umum, sehingga untuk berkunjung ke makam tersebut sangat mudah.

(16). Musium Sonyine Malige

Musium *Sonyine Malige* merupakan satu-satu musium di Kota Tidore Kepulauan. Musium tersebut dibangun oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah pada masa sebelum pembentukan daerah otonom Kota Tidore Kepulauan, dan status Kota Tidore (Soasio) sebagai Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah. Tujuan pembangunan Musium *Sonyine Malige* sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Kesultanan Tidore. Dari bentuk arsitekturnya, Musium *Sonyine Malige* dibangun dengan mengadopsi bentuk rumah adat Tidore. Adapun benda-benda koleksi yang dipajang di Musium *Sonyine Malige* diantaranya: Mahkota Sultan Tidore, Tandu Sultan, Stempel Kesultanan, Al Quran Tulis Tangan, Alat-alat Perang, Pakayan Kebesaran Kesultanan, dan lainnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 30). Namun pada saat ini benda-benda yang berkaitan dengan kesultanan telah dipindahkan ke Kadaton Kesultanan, dan yang tertinggal di musium tersebut hanya benda-benda koleksi seni dan kebudayaan Tidore.

Berkaitan dengan benda-benda kesultanan tersebut di atas yang memiliki daya tarik dan mempunyai nilai sejarah tinggi adalah koleksi Al Quran Tulis Tangan dan Mahkota Sultan. Al Quran tulis tangan merupakan Al Quran hasil karya tulisan tangan dari Sultan Kiyai Manus atau yang dikenal dengan sebutan Kalem Mansur. Sultan Kiyai Manus adalah sultan ke 14 yang berkuasa pada tahun 1535-1569 M (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 30). Al Quran tulis tangan tersebut sebagai bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kesultanan Tidore adalah Kerajaan Islam, dan Al Quran tersebut masih terjaga hingga sekarang namun nampak kusam dan sedikit rusak. Mahkota Sultan adalah Mahkota Kesultanan Tidore yang biasa di paka pada saat upacara pelantikan Sultan. Mahkota Sultan Tidore memiliki rambut dan rambut tersebut bertumbuh panjang, dan jika sudah terlalu panjang maka akan diadakan upacara pemotongan rambut mahkota, yang biasa dilakukan pada bulan Rabiul awal tahun hijriah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sas sebagai berikut:

“....di Tidore ini kan ada Al Quran tulis tangan. Al Quran itu ditulis oleh Sultan Kalem Mansur.... Al Quran tulis tangan itu yang menjadi bukti sejarah bahwa Kesultanan Tidore adalah daerah Islam, dan Al Quran itu masi ada sampe sekarang, di simpan di Kadaton. Cuman so ada yang *ta robe* (suda sobek) karena mungkin *so talalau lama* (suda terlalu lama)....” (Wawancara, 26 September 2015).



Gambar 5.16 Musium *Sonyine Malige*, Al Quran Tulis Tangan dan Mahkota Sultan Tidore
Sumber: Fota Penulis, 2015

Berkaitan dengan Mahkota Sultan Bapak Sas menjelaskan bahwa:

“....Mahkota Sultan Tidore dan Ternate itu sama. Dua mahkota itu punya rambut, dan rambut yang ada di mahkota itu tumbuh. Kalau dia (rambut mahkota) sudah panjang pihak kesultanan melakukan upacara potong rambut mahkota. Kalau untuk di Tidore, upacara potong rambut tersebut dilakukan pada bulan Rabiul Awal.... upacara potong rambut pada masa sebelumnya saya *tara* (tidak) tau, tetapi setelah saya basar (besar) yang saya *inga* (ingat) itu pertama dilakukan pada saat mahkota masi disimpang (sisimpan) di *Fola Mafu* (rumah batu) di Soasio, yang kedua di musium....” (Wawancara, 26 September 2015).

Amatan penulis, Musium *Sonyine Malige* berada di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, dan seluruh masyarakat Kota Tidore telah familiar dan mengetahui keberadaan musium tersebut. Dengan demikian, untuk mengunjungi Musium *Sonyine Malige*, pengunjung tidak mengalami kesulitan dikarenakan musium telah diketahui oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan musium di jalan utama Kota Tidore dan dilewati oleh kendaraan umum.

(17). Hari Jadi Tidore

Kesultanan Tidore merupakan salah satu institusi politik yang telah hadir dan ada sejak berabad-abad yang lalu, dan hingga saat ini institusi tersebut masih tetap eksis. Kehadiran dan keberadaan Kesultanan Tidore tersebut tidak hanya sebagai institusi politik biasa sebagai sebuah bangsa, tetapi pada sisi yang lain Kesultanan Tidore memiliki dan mewariskan berbagai berbagai peradaban. Untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi peradaban tersebut kemudian dibuat sebuah serimoni yang bernilai tinggi dalam sebuah acara hari jadi Tidore untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang eksistensi Kesultanan Tidore pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Abd sebagai berikut:

“....keberadaan Kesultanan Tidore merupakan salah satu warisan peradaban politik manusia pada masa lalu yang terus terjaga hingga saat ini. Secara politik eksistensi Kesultanan Tidore mempunyai andil dan

memberikan kontribusi yang cukup signifikan atas perjalanan negeri ini, baik dari sisi sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan. Untuk mengenang Tidore masa lalampau, dan menata Tidore saat ini serta membangun Tidore Kedepan, kita harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat Tidore secara husus dan masyarakat umum tentang apa dan bagaimana itu Kesultanan Tidore melalui acara hari jadi Tiodre yang dibuat oleh pihak Kesultanan....” (Wawancara, 29 Agustus 2015).



Gambar 5.17 Karnaval dan Lufu Kie (Mengelilingi Pulau Tidore Lewat Laut) Pada Acara Hari Jadi Tidore
Sumber: Foto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015

Dalam acara Hari Jadi Tidore dilakukan berbagai ritual dan upacara yang dilakukan oleh Kselutanan sperti: *Akedango*, *Ratib Siraj*, *Karnaval*, *Ratib Taji Besi*, *Malam Setanggi Timur*, *Lufu Kie*, *Paji Nyili-Nyili*, *Kirab Agung* dan Upacara di Kadaton Kسلutanan. Seluruh rangkaina rital tersebut dilakukan dalam waktu 1 (satu) pekan lebih. Upacara puncak hari jadi Tidore dilakukan di halaman Kadato Kesultanan pada tanggal 12 April setiap tahunnya. Pada upacara puncak tersebut dipertemukan dua kutub pucuk pimpinan di Tidore, yaitu Sri Sultan sebagai pimpinan dan penguasa pemerintahan pada alam nyata, yang biasa disebut “*Jou Sita-siat*” dengan *Sowohi* atau pemimpin dan penguasa alam gaib atau supranatural, yang bisa disebut “*Jou Kornono*” (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 42).

Ritual yang dilakukan oleh Kesultanan dalam acara hari jadi Tidore sebagaimana disebutkan di atas, dibenarkan dan dijelsakan oleh Bapak Sas sebagai berikut:

“....acara hari jadi Tidore itu dilakukan kurang lebih satu minggu karena ritual-ritual yang harus dilakukan itu banyak seperti yang tadi ngana (kamu) bilang itu.... ritual *Akedango* itu suatu ritual pengambilan air di Gurabunga (Kelurahan Gurabunga). Air itu diambil dari lima rumah adat marga *Tomayou Soa Romtoha*, Marga *Tosofu Malamo*, *Kipu*, *Toduho*, *Sowohi*, *Matia*. Air yang diambil dari lima rumah tersebut kemudian dibawa ke Kadato (Keraton), dan digunakan untuk berbagai ritual seperti *Ratib* (Tahlilan), *Taji Besi* (Debus) dengan (dengan) ritual-ritual lainnya.... *Ratib Siraj* itu *dong biking* (mereka buat) tahlilan dan pembacaan doa di malam hari untuk mendoakan para leluhur.... *Ratib Taji Besi* itu kan badabus yang bisa *torang* (kita) lihat orang *biking di kampung-kampung* (buat di desa-desa).... dorang (mereka) zikir dan tahlil yang diiringi oleh rabana dan ada orang yang menikam badannya dengan besi tajam (senjata tajam)....” (Wawancara, 26 September 2015).



Gambar 5.18 *Paji Nyili-Nyili* (Pengarakan Bendera Kesultanan) dan Kirab Agung Pada Acara Hari Jadi Tidore

Sumber: Foto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2014

Selanjutnya Bapak Sas menjelaskan:

“....Malam Setanggi Timur itu pada malam itu *dorang* (mereka) mabakar kemanyan dan dupa. Dupa yang *dorang* (mereka) bakar itu dibuat dari rempah-rempah dari Tidore seperti pala, cengkeh, kayu manis, *deng* (dengan) lain-lain, makanya *dong* (mereka) kasena nama Malam Setanggi Timur.... karnaval itu acara pawai mengelilingi Kota Tidore yang pesertanya perwakilan dari masing masing desa dan kelurahan di Kota Tidore dengan masing-masing adat dan budaya.... *Lufu Kie* itu ritual tawaf keliling pulau Tidore lewat laut dengan menggunakan perahu atau motor yang *dong* (mereka) hias.... ritual *Lufu Kie* itu dimulai dari dermaga Kesultanan dan berakhir disitu.... kalau *Paji Nyili-Nyili* itu ritual yang kirab membawa empat bendera kesultanan dari empat arah. Dari barat, timur, utara, dan selatan.... empat bendera tersebut dibawa pada malam hari, dan pada malam itu lampu di Pulau Tidore ini dimatikan. Pada saat bendera itu dibawa diterangi oleh iringan obor sebagai alat penerang, dan di jalan-jalan di Kota Tidore ini dipasang obor sepanjang jalan.... keempat bendera kesultanan itu bertemu di perempatan jalan menuju ke *Kadato* (keraton) pada pagi tanggal 12 April itu.... selanjutnya keempat bendera itu dibawa dan dikawal oleh pasukan kesultanan menuju ke *Kadato*

(keraton) yang *dong kase nama* (mereka beri nama) Kirab Agung. Jadi Kirab Agung itu pengiringan dan pengawalan bendera kesultanan menuju Kadato....” (Wawancara, 26 September 2015).

(18). *Legu Gam* (Adat Negeri)

Legu Gam adalah suatu upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tidore untuk mengingat dan mendoakan para leluhurnya. *Legu Gam* yang artinya “Adat Negeri”, upacara *Legu Gam* biasanya dilakukan kurang lebih satu pekan, dan dalam upacara tersebut terdapat beberapa prosesi ritual yang dilakukan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore, 2015: 42).



Gambar 5.19 Prosesi Upacara Adat *Paca Goya* (Pembersihan Tempat Keramat) Masyarakat Kalaodi

Sumber: Foto Hakim Abdullah (2014)

Amatan penulis, menunjukan bahwa dalam masyarakat Tidore terdapat beberapa bentuk upacara *Legu Gam* yang dilakukan oleh masyarakat di masing-masing *Soa Se Gama* (daerah dan negeri). Diantara upacara adat *Legu Gam* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tidore adalah: *Legu Gam Gam Tufkange* (Adat Delapan Negeri) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gamtufkange, Gurabunga, Tambula dan Folarora. *Legu Gam Gam Tufkange* dilakukan di rumah adat *Toam You Soa Romtoha* di Kelurahan Gamtufkange. Selain itu, pada komunitas masyarakat Kalaodi terdapat upacara seperti ini yang biasa disebut *Legu Buku Se Doau* (Adat Bukit dan Gunung). Upacara adat *Legu Buku Se Doau* yang dilakukan oleh masyarakat Kalaodi dilakukan di rumah adat *Fola Sou* di

Kelurahan Kalaodi. Selain acara adat *Legu Buku Se Doau*, pada komunitas masyarakat Kalaodi terdapat juga upacara *Ruahan Doro* dan *Paca Goya*.

Selain itu, terdapat juga *Legu Gam Afa-Afa* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Afa-Afa. Pada masyarakat Afa-Afa, selain acara *Legu Gam*, terdapat juga acara lain yaitu *Legu Dou*. Upacara adat *Legu Dou* juga biasa dilakukan oleh komunitas masyarakat Fobaharu, Jaya, Tomayou dan Lada Ake. Seluruh upacara adat yang dilakukan oleh masing-masing komunitas masyarakat Tidore tersebut menunjukkan keragaman dan kekayaan adat serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tidore.

(19). Agrowisata Gurabunga

Agrowisata Gurabunga berada di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore. Secara administratif, Kelurahan Gurabunga mempunyai luas wilayah 7,84 km², dan berada pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Secara epistomologi kata "*Gurabunga*" berasal dari kalimat "*Garua Toma Banga*" yang artinya "Danau di Tengah Hutan" (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015). Menurut tuturan masyarakat Gurabunga, pada zaman sebelum perkampungan Gurabunga seperti saat sekarang terdapat sebuah danau di perbukitan Gurabungan yang dekat permukiman masyarakat. Dalam danau tersebut terdapat ikan-ikan tetapi ikan yang hidup di danau tersebut bukan air tauar tetapi ikan air laut. Danau tersebut mengalami pasang surut mengikuti pasang surutnya air laut. Selain itu, air yang terdapat di danau tersebut bisa bergelombang seperti air laut, dan kejadian tersebut bersamaan dengan terjadi musim angin dan air laut mengalami musim gelombang. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sas, dan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“....iya kampung ini nama yang sebenarnya itu *Gurua Toma Banga*, cuman oarng biasa sebut Gurabunga.... cerita tentang *Gurua Toma Banga* itu, menurut *torang pe orang tua* (orang tua kami), dulu di dekat kampung ini ada sebuah danau yang unik. Di danan itu hidup ikan air laut, bukan ikan air tawar.... air di danau itu mengamai *nae deng turun* (pasang dan surut) sama dengan air laut di pante. *Deng dia pe ane* (dan anehnya) air di danau itu baomba (bergelombang) sama dengan air laut....” (Wawancara, 26 September 2015).

Lebih lanjut Bapak Sas menjelaskan.

“....tapi sekarang, danau itu suda tidak ada lagi. Danau itu kering bersamaan dengan dong (mereka) bangun masjid di kampung ini. Dan masjid tersebut merupakan masjid pertama yang ada di Tidore ini.... bekas dana itu kalau tidak salah ada persisi di belakang sekolah SD (Gurabunga) itu....” (Wawancara, 26 September 2015).



Gambar 5.20 Perkampungan dan Atraksi Alam di Kawasan Agrowisata Gurabunga

Sumber: Foto Penulis, 2015

Menurut sejarah, Gurabunga merupakan tempat tempat berkumpulnya suku-suku yang ada di Pulau Tidore. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat dua unit rumah adat yang disebut rumah ada “*Mahifa*” yang berarti “Ma’rifat” dan rumah adat “*Kie Matiti*” yang disebut juga “*Jou Tina*” yang artinya “Penguasa di Darat”. Kedua rumah adat tersebut masih ada hingga sekarang dan masih terjaga keasliannya, baik bentuk dan konstruksinya. Selain itu, pada masyarakat Gurabungan terdapat 5 (lima) marga, yaitu *Mahifa*, *Toduho*, *Tosofu Malamo*, *Tosofu Makena* dan *Fola Sowohi*, dan marga tersebut memiliki rumah adat tersendiri (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015).

Daya tarik dari Gurabunga, selain kebudayaannya, pada kawasan ini terdapat panorama alam pegunungan dan perbukitan yang hijau, indah dan juga cukup asri. Pemukiman penduduk Kelurahan Gurabunga yang bersih dan asri membuat pengunjung sangat nyaman. Lingkungan pemukiman yang bersih tersebut yang kemudian pada tahun 2007 Kelurahan Gurabunga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kelurahan terbersih kedua di Indonesia. Selain itu, di Kelurahan Gurabunga terdapat banyak jenis buah-buahan seperti alfokat, dan sayur-sayuran yang ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat. Akses untuk menuju kawasan Agrowisata Gurabunga sangat baik. Untuk mencapai kawasan Agrowisata Gurabunga dapat dilakukan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan jarak tempuh ± 5 km dari pusat kota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015).

(20). Agrowisata Kalaodi

Kawasan Agrowisata Kalaodi berada di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur. Keberadaan kawasan ini 700 meter di atas permukaan laut, dan berada ± 4 km dari pusat Kota. Kawasan Agrowisata Kalaodi dapat di akses oleh pengunjung dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun empat dengan kondisi jalan yang cukup baik. Secara ekonomi, sumber kehidupan masyarakat Kalaodi adalah petani (Kelurahan Kalaodi, 2014). Dalam sisi populasi, komunitas Kalaodi merupakan salah satu komunitas terbesar di Pulau Tidore yang tersebar di Kecamatan Tidore Timur hingga ke Pulau Halmahera. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ari:

“....komunitas masyarakat Kalaodi merupakan salah satu komunitas terbesar di Tidore.... orang Kalaodi tersebar di Kecamatan Tidore Timur, dan bahkan bisa dikatakan penduduk Kecamatan Tidore Timur itu 70-80% adalah orang Kalaodi. Dan bahkan orang Kalaodi tersebar sampai ke Pulau Halmahera.... di Halmahera itu terdapat 2 (dua) kampung besar

yaitu Garojou di Kecamatan Oba Utara dan Paceda di Kecamatan Oba Tengah, di kedua kampung itu semuanya orang Kalaodi.... mereka kesana itu karena trans lokal yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin Syah pada tahun 60-an....” (Wawancara, 5 November 2015).



Gambar 5.21 Perkampungan dan Buah Durian Kalaodi
Sumber: Foto Penulis, 2015

Daya tarik dan ciri khas dari Agrowisata Kalaodi adalah buah durian yang rasanya sangat enak dan empuk. Rasah buah durian Kalaodi sangat berbeda dengan rasa buah durian yang berada di tempat lain di Pulau Tidore dan bahkan di Maluku Utara. Selain itu, suasana sejuk dengan pemandangan alam yang indah dan hamparan tanaman pala dan cengkeh serta durian yang rindang. Dalam kawasan Agrowisata Kalaodi terdapat objek wisata alam Air Terjun *Luku Celeng*. Air Terjun *Luku Celeng*, merupakan salah satu objek wisata yang selalu di kunjungi oleh para wisatawan lokal (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 37).

Menurut amatan penulis, dari kawasan Agrowisata Kalaodi, pemandangan di bagian timur, pengunjung dapat melihat pemandangan Kota Tidore, perairan Selat Halmahera, Pulau Halmahera, dan Kota Sofifi. Pada bagian barat, pengunjung dapat melihat Pulau Maitara, Kota Ternate, dan Gunung Gamalama Ternate. Atraksi alam di kawasan Agrowisata Kalaodi merupakan sajian alam yang sangat indah.

Amatan penulis, pada masyarakat Kelurahan Kalaodi terdapat usaha rumahan (*home industry*) kerepek malinjo. Namun usaha rumahan tersebut belum berkembang dengan baik terkendala pada masalah manajemen dan pemasarannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ari sebagai berikut:

“....masyarakat kita ini secara umum adalah masyarakat petani. Tetapi ada usaha-usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sampingan, tetapi menurut saya itu sangat baik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut misalnya ada membuat kerajinan tangan dari ayaman bambu dan juga usaha membuat kerepek malinjo.... misanya kerepek malinjo, dari sisi bahan baku saya pikir di sini cukup banyak. Di daerah ini kan kawasan hutan, dan banyak sekali pohon malinjo yang tumbuh secara liar.... kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah masala manajemen dan pemasaran. Masyarakat membuat produk, dan setelah produk jadi tidak tau harus pasarkan kemana.... yang saya liat paling dipesan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik Kota Tidore maupun Provinsi pada saat acara pameran.... ahirnya usaha masyarakat ini tidak bisa berkembang dengan baik....” (Wawancara, 5 November 2015).



Gambar 5.22 Atraksi Alam Agrowisata Kalaodi
Sumber: Foto Penulis, 2015

Data tentang wisata unggulan hasil analisis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang telah dideskripsikan di

depan memberikan informasi dan gambaran bahwa, Kota Tidore Kepulauan memiliki ketersediaan objek pariwisata unggulan yang cukup kaya dan dapat dijadikan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Dengan menggunakan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di depan tergambar bahwa objek wisata unggulan yang siap dan dapat dikembangkan di Kota Tidore Kepulauan cukup beragam, dimana terdapat objek wisata bahari, alam, sejarah dan seni dan kebudayaan. Secara kuantitas, jumlah keseluruhan objek unggulan Kota Tidore Kepulauan yang siap dan dapat dikembangkan adalah 20 (dua puluh) objek.

Selain menggunakan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, hasil amatan dan wawancara penulis menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa objek wisata potensial yang jika dikembangkan menjadi objek wisata unggulan di Kota Tidore Kepulauan. Objek wisata tersebut adalah: kawasan Pantai Tahua dan Tanjung Konde; kawasan Tanjung Putusan dan Pulau Failonga; dan Puncak Kie Matubu (Puncak Tidore). Ketiga objek wisata tersebut belum teridentifikasi oleh pemerintah daerah. Belum teridentifikasinya beberapa objek wisata potensial yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata unggulan tersebut, dikeranakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam proses identifikasi dan analisi terhadap ketersediaan dan keberadaan objek wisata potensial tidak melibatkan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan objek wisata potensial yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata unggulan daerah yang belum diidentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Maka berikut, penulis mendeskripsikan objek wisata potensial tersebut.

(1). Pantai Tahua dan Tanjung Konde

Pantai Tahua dan Tanjung Konde secara administratif berada dalam wilayah Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara. Pantai Tahua memiliki daya tarik yang cukup indah, dimana di Pantai Tahua terdapat hamparan pasir halus dengan suasana pantai yang sejuk. Selain itu, di depan pantai ini terlihat pemandangan Kota Ternate dengan berlatarkan Gunung Gamalam yang sangat menawan. Pemandangan di Pantai Tahuan terasa semakin indah pada saat sang surya telah menyingsing, dimana gemerlap lampu Kota Ternate yang indah terlihat dari kejauhan cukup menarik dan memberikan kesan tersendiri.

Sedangkan Tanjung Konde merupakan spot diving dengan pemandangan bawah laut yang cukup indah. Tanjung Konde atau biasa dikenal oleh masyarakat Tidore dengan sebutan Tanjung *Mafu Gogo*. Pemberian nama tanjung konde terhadap tanjung tersebut dikarenakan bentuk tanjung bulat seperti konde jika dilihat dari kejauhan. Sedangkan sebutan *Mafu Gogo* terhadap tanjung ini dikarenakan bentuk konstruksi alami dari tanjung tersebut adalah tumpukan batu-batu besar dan terjadi hataman ombak sehingga permukaan batu yang berpori besar dan berduri, sehingga orang Tidore menyebutnya *Mafu Gogo* yang artinya “Batu Berbulu/Berduri”.



Gambar 5.23 Atraksi Alam Pantai Tahua dan Tanjung Konde
Sumber: Foto Penulis, 2015

Tanjung Konde dan Pantai Tahua berada dalam satu kawasan wisata di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara. Pada kawasan wisata tersebut terdapat juga objek wisata Tugu Pendaratan Bangsa Spanyol. Tugu tersebut dibangun oleh Pemerintah Spanyol pada Tanggal 30 Maret 1993. Pembangunan tugu tersebut untuk memperingati Juan Sebastian De Elcano beserta awak kapal Trinidad dan Victoria yang berlabuh di Tidore pada Tanggal 8 November 1521 dan melanjutkan pelayarannya ke Spanyol pada Tanggal 18 Desember 1521 dalam misi pelayaran mengelilingi dunia yang pertama. Pada kawasan wisata tersebut terdapat juga Benteng Ts Tjobe yang dibangun oleh Bangsa Spanyol pada Tahun 1530. Melihat realitas objek wisata yang berada dalam kawasan Pantai Tahua dan Tanjung Konde tersebut maka hemat penulis, jika dikembangkan dan dikelola secara baik maka kawasan wisata tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup strategis bagi daerah dan juga masyarakat.

(2). Tanjung Putus dan Pulau Failonga

Tanjung Putus dan Pulau Failonga secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Tidore Timur. Tanjung Putus merupakan sebuah masyarakat Tidore terhadap sebuah tanjung di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur. Penamaan atau penyebutan tersebut dikarenakan tanjung tersebut terlihat terpisah dari daratan Pulau Tidore pada saat terjadi air laut pasang. Tanjung tersebut merupakan tumpukan batu-batu besar, dan di depan pantai tanjung tersebut terdapat lautan dalam, serta di hapan Tanjung Putus terdapat Pulau Failonga.

Pulau Failonga adalah sebuah pulau kecil dengan luas darat 1,10 km² dengan topografi berbukit, dan bebatuan besar. Pulau ini tidak berpenghuni (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2014). Secara geografis Pulau Failonga terletak pada titik

koordinat 00,42⁰-50,9⁰ LU dan 127,28⁰-24,60⁰ BT. Kata Failonga berasal dari dua kata yaitu *Fai* yang artinya “Gali” dan *Longa* yang artinya “Angkat untuk dipindahkan”. Daya tarik dari Pulau Failonga adalah terdapat pepohonan besar yang rindang dan alami, membuat pulau tersebut terasa sejuk dan nyaman. Pemandangan bawah laut pada perairan sekita Pulau Failonga sangat indah, dimana terdapat terumbu karang dan berbagai biaota laut dan ikan-ikan besar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 8). Hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Ara sebagai berikut:

“....di Tidore ini terdapat banyak objek wisata *snorcling* termasuk salah satunya adalah perairan Failonga dan Tanjung Putus.... menurut saya, wisata bahari Pulau Failonga itu satu paket dengan Tanjung Putus, kerana perairan di depan Tanjung Putus itu, kalau kita tarik garis lurus ke Pulau Failonga itu, pemandangan bawah laut di sekitar itu sangat indah dan saya bisa katakan lebih indah dari Bonaken.... di sekitar itu terdapat banyak sekali habitat ikan-ikan besar seperti hiu, paus, lumba-lumba dan yang lain.... saya tau ini karena saya sering membawa orang bule (turis asing) yang menyelam di sekitar itu....” (Wawancara, Tanggal 6 September 2015).

Lebih lanjut Bapak Ara menjelaskan.

“....menurut para bule (wisatawan asing), di perairan sekitar Pulau Failong itu terdapat sejenis ikan hiu yang sirip samping yang diguakan oleh ikan untuk berenang itu tidak di samping tetapi di bawah perut dan bentuknya seperti kaki dan mereka berjalan seperti hewan di darat, yang biasa mereka sebut *Walking Shark*, dan spesies tersebut hanya ada di perairan halmahera....” (Wawancara, Tanggal 6 September 2015).

Penjelasan informen tersebut memberikan gambaran bahwa objek wisata *snorcling* yang berada di Tanjung Putus dan Pulau Failonga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan. Potensi keindahan alam bawah laut yang terdapat pada destinasi wisata Tanjung Putus dan Pulau Failonga dan ditopang oleh telah diketui oleh para wisatawan mancanegara menjadikan objek wisata ini sangat bernilai ekonomis tinggi jika dikembangkan dan dikelola secara baik. Amatan penulis, permasalahan yang berkaitan dengan

objek wisata Tanjung Putus dan Pulau Failonga adalah belum tersedianya fasilitas *snorcling* yang memadai.



Gambar 5.24 Tanjung Putus, Pulau Failonga dan Pemandangan Alam di Sekitarnya

Sumber: Foto Penulis, 2015

Berdasarkan amatan penulis, Keindahan lain yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari Pulau Failonga adalah di sebelah timur pulau tersebut pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan perairan Selat Halmahera dan terbentangny Pulau Halmahera dan Kota Sofifi. Pada bagian barat Paulau Failonga wisatawan dapat menikmati indahnya berjejeran kepulauan *Moloku Kie Raha* (Maluku Empat Pulau) yang terdapat dalam sejarah awal Kerajaan *Moloku Kie Raha* (Kerajaan Maluku Empat Pulau) yaitu: Pulau Ternate, Tidore, Moti dan Mara (Makean).

(3). Puncak *Kie Matubu* (Tidore)

Puncak Kie Matubu (Puncak Tidore) merupakan gunung tertinggi di gugusan kepulauan Maluku. Secar umum topografi pulau Tidore dalam kategori curam, dan bahkan pada daerah-daerah tertentu memiliki tingkat kemiringan lebih dari 40°. Puncak Kie Matubu memiliki ketinggian ± 1731 meter di atas permukaan laut (BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, 2015: 5).

Amatan penulis, Puncak Tidore memiliki keindahan alam cukup menajubkan. Dari puncak gunung Tidore pengunjung dapat menikmati

keindahan laman sekitar pulau Tidore secara 360°. Artinya, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam secara keseluruhan di sekitar Pulau Tidore, baik arah barat, timur, utara dan selatan. Di arah barat pengunjung dapat menikmati pemandangan lautan luas dan pulau Ternate dan Hiri serta Maitara. Pada bagian timur, pengunjung dapat menikmati hamparan selat Halmahera dan panjangnya Pulau Halmahera di sebarang lautan. Di bagian utara, pengunjung dapat menikmati lautan luas dan disebarnya terdapat perbukitan pulau Halmahera dan gunung Jailolo. Pada bagian selatan, pengunjung diseguihi pemandangan berbarisnya pulau-pulau dibagian selatan pulau Tidore, yaitu: pulau Mare, Moti, Makean, dan Kayoa.



Gambar 5.25 Puncak Kie Matubu (Tidore)

Sumber: Foto Penulis, 2015

Puncak Tidore merupakan objek dan destinasi pariwisata yang cukup potensial dikembangkan menjadi objek wisata unggulan daerah. Amatan penulis, pengembangan Puncak Tidore menjadi objek wisata unggulan tidak mengalami kesulitan dikarenakan secara umum masyarakat Maluku Utara cukup familiar dengan puncak tersebut, dan bahkan Puncak Tidore selalu dikunjungi oleh banyak orang baik masyarakat lokal Tidore, Maluku Utara dan juga wisatawan manca negara. Kunjungan wisatawan dan masyarakat Tidore ke Puncak Tidore tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sas sebagai berikut.

“....puncak Kie Matubu (Puncak Tidore) itu selalu di datangi oleh orang-orang. Ada orang yang naik ke Kie Matubu karena keperluan acara adat.... selain untuk keperluan acara ada.... ada juga orang-orang yang naik ke *kie matubu* (puncak Tidore) untuk rekreasi atau berhibur. Banyak sekali orang ke puncak, dan tidak hanya orang-orang Tidore, ada juga orang dari luar Tidore.... kalau orang yang ke puncak itu bukan orang Tidore atau orang Tidore sendiri tetapi bukan untuk acara adat harus minta izin ke pihak kelurahan Gurabunga.” (Wawancara, Tanggal 12 September 2015).



Gambar 5.26 Atraksi Alam Yang Dilihat Dari Puncak Tidore
Sumber: Foto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore (2014)

Minat wisatawan untuk mengunjungi puncak Tidore, husunya wisatawan asing sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ara sebagai berikut:

“....hampir 80-90 persen wisatawan asing yang bersama-sama dengan saya itu mereka meminta saya untuk mendaki puncak Tidore.... Dan menurut saya puncak Tidore adalah salah satu destinasi wisata alam yang sangat potensial, karena tidak hanya wisatawan lokal yang berkunjung kesana tetapi juga wisatawan asing. Cuman itu, pemerintah kita yang kurang memperhatikannya.” (Wawancara, tanggal 6 September 2015).

Menyimak penjelasan kedua informen di atas maka tergambar bahwa Puncak Tidore merupakan salah satu objek dan destinasi yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Namun potensi pariwisata tersebut belum diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya oarng yang mengunjungi Puncak Tidore tersebut, selain faktor keindahan lama yang dapat dinikmati, Puncak Tidore cukup mudah diakses. Amatan penulis, akses ke Puncak Tidore dapat dilaukan melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Melalu jalur barat pengunjung dapat menggunakan

kendaraan melalui Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara hingga sampai di Kelurahan Gurabunga dan meminta izin di pihak kelurahan, dan melakukan pendakian ke puncak dengan jalan kaki $\pm$ 3 jam perjalanan. Sedangkan melalui jalur timur, maka pengunjung berkendara melalui Kelurahan Tambula Kecamatan Tidore hingga sampai ke Kelurahan Gurabunga. Kondisi jalan pada dua jalur tersebut sangat baik, dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun empat.

Berdasarkan data wisata unggulan daerah yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang telah disebutkan dan dideskripsikan di depan memberikan gambaran bahwa: pertama, di Kota Tidore Kepulauan terdapat berbagai potensi objek pariwisata unggulan. Secara kuantitatif, menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, terdapat 20 objek wisata unggulan. Selain itu, berdasarkan data primer yang penulis himpun, terdapat 3 (tiga) objek wisata unggulan yang tidak teridentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Berbagai objek wisata unggulan yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan tersebut siap dan layak dikembangkan.

Kedua, berbagai objek wisata unggulan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bila dikembangkan dan dikelola secara profesional dan industrial. Nilai ekonomis yang terdapat dalam objek wisata tersebut dikelola secara profesional dan industrial maka akan berdampak pada perekonomian daerah dan masyarakat. Namun demikian, di beberapa objek wisata unggulan yang diidentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan belum dikelola secara baik dan belum ada fasilitas sebagaimana objek wisata pada umumnya.

Ketiga, terdapat beberapa objek wisata unggulan tidak terjaga dan terlindungi dengan baik sehingga berpotensi rusak. Kerusakan yang timbul tersebut akibat ulah manusia (masyarakat di sekitar objek wisata dan pengunjung), dan kerusakan akibat pemeliharaan lingkungan yang tidak baik.

5.1.3 Kesiapan Masyarakat dan Lingkungan

Penduduk merupakan sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini bisa terjadi bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi sebagai pengelola sumber daya. Dalam perspektif ekonomi, penduduk merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan sebagai produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu penduduk bisa dijadikan sebagai konsumen dari setiap produk yang dihasilkan. Oleh karena itu tidak menjadi heran jika suatu daerah atau kawasan yang memiliki jumlah penduduk tertentu selalu menjadi sasaran serbuan dari produk-produk industri besar.

Namun demikian, jumlah penduduk yang besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dalam proses pembangunan, jika potensi penduduk tersebut tidak dimenej dan mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Permasalahan tersebut seperti pengangguran, kemiskinan, konflik sosila-budaya dan politik, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dalam proses pembangunan utamanya pembangunan daerah harus dapat memposisikan masyarakat sebagai mitra yang sederajat dan bukan subordinat, bukan hanya menjadi objek dalam proses pembangunan. Proses tersebut diperlukan dikarenakan pemerintah sendiri dalam proses pembangunan memiliki keterbatasan, dan memerlukan dukungan dari *civil society* dan *private sector*.

Dalam pembangunan pariwisata dukungan masyarakat cukup penting. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kementrian Pariwisata RI (2016: 14) sebagai berikut, “Keberhasilan pembangunan kepariwisataan juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan masyarakat di destinasi pariwisata. Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata, namun tidak mampu berkembang baik dan cenderung stagnan karena masih terbatasnya dukungan dan kesiapan masyarakat sekitar.”

Data demografi Kota Tidore Kepulauan yang dirilis oleh BPS Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan pada saat daerah ini di mekarkan pada tahun 2003 sebanyak 78.966 jiwa yang terdiri dari 39.909 laki-laki dan 39.057 perempuan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan menjadi 94.036 jiwa, dan tahun 2013 meningkat menjadi 103.323 jiwa, dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan sebanyak 105.157. Dengan demikian, pada tahun 2015 dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan 2,25 persen, maka diperkirakan tahun 2015 jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan akan menjadi 108.305 jiwa (BPS, 2015). Laju pertumbuhan penduduk Kota Tidore Kepulauan didominasi oleh migrasi penduduk antar daerah yang datang ke wilayah ini, terutama dari wilayah Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan lebih disebabkan oleh faktor migrasi, dibanding penambahan secara alami (*natural increase*) atau kelahiran (BAPPEDA, 2011).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial-kultural, masyarakat Tidore sangat terbuka dan dapat menerima orang-orang yang secara sosial-kultural berbeda dengannya. Keterbukaan dan penerimaan

masyarakat Tidore terhadap masyarakat luar telah terjadi pada zaman kerajaan.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Abd sebagai berikut.

“....iya, masyarakat Tidore termasuk masyarakat yang memiliki peradaban yang baik, termasuk dalam peradaban sosial. Mungkin prinsip hidup orang Tidore yang tidak mau mencari musuh, tetapi juga tidak pernah gentar jika berhadapan dengan musuh. Dengan prinsip hidup itu lah, sehingga menurut saya, masyarakat Tidore adalah masyarakat humanis, toleran, dan sangat terbuka serta dapat menerima siapa saja.... keterbukaan masyarakat Tidore untuk dapat menerima siapa saja itu, tidak hanya terjadi saat sekarang, pada zaman kerajaan dulu pun, keramahan dan penerimaan masyarakat Tidore terhadap orang luar Tidore telah terjadi. Buktinya, *Soasio* (sembilan kampung) yang terkenal dari zaman kerajaan hingga sekarang (sekarang menjadi Kelurahan Soasio) tersebut, diantara sembilan kampung tersebut terdapat *Soa Cina* (Kampung Cina) untuk orang Cina dan *Soa Jawa* (Kampung Jawa) untuk orang Jawa....” (Wawancara, 29 Agustus 2015).

Penjelasan informen di atas memberikan gambaran bahwa masyarakat Tidore adalah masyarakat yang toleran dan sangat terbuka dalam pergaulan serta interaksi sosialnya. Sikap toleransi yang tinggi dan terbuka dalam interaksi sosial yang baik tersebut, sehingga dalam amatan penulis, di Kota Tidore Kepulauan hampir tidak terjadi konflik sosial antara sesama masyarakat dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Baik secara internal sesama orang Tidore, maupun eksternal dengan masyarakat etnis dan suku lain yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Pada sisi yang lain, dalam amatan penulis, konflik yang timbul di tengah-tengah masyarakat berupa perkelahian antara kampung disebabkan persoalan politik. Artinya, penyebab terjadinya konflik fisik atau perkelahian antara masyarakat, pemicunya adalah persoalan politik. Perbedaan pilihan dan pandangan politik yang timbul di tengah masyarakat, dan ketidakmampuan pemimpin dan tokoh politik daerah dalam mengelola isu dan pemahaman politik masyarakat pengikutnya sebagai penyebab lahirnya konflik. Fenomena tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Asm sebagai berikut.

“....secara umum saya melihat bahwa, masyarakat Tidore adalah masyarakat yang sangat toleran dan terbuka.... konflik sosial yang terjadi di daerah ini, menurut amatan saya pribadi kebanyakan pemicunya adalah masalah politik. Perbedaan pilihan dan pandangan politik yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat.... buktinya kan, setiap perkelahian antara masyarakat pasti terjadi pada momen-momen politik seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepada daerah (gubernur dan walikota). Dan yang berpotensi konflik besar adalah pemilihan walikota.... penyebabnya, karena pemilihan walikota itu banyak sekali kelompok yang berkepentingan di situ.... kepentingan keluarga, kepentingan proyek dan macam-macam....” (Wawancara, 29 Agustus 2015).

Lebih lanjut Bapak Asm menjelaskan bahwa.

“....masyarakat Tidore mudah tersulut dengan masalah-masalah politik. Pemahaman politik masyarakat belum terlalu terdidik, dan partai politik gagal melaksanakan fungsi pendidikan politiknya.... selain itu, masyarakat Tidore itu bertipe masyarakat loyal. Jadi, pada saat momen politik dan terjadi kampanye hitam terhadap kandidat atau calonnya, mereka mudah tersinggung, yang kemudian lahirnya kesalahpahaman dan lahirlah keributan dan perkelahian....” (Wawancara, 29 Agustus 2015).

Secara sosial keagamaan, dalam amatan penulis, masyarakat Kota Tidore Kepulauan merupakan masyarakat yang religius. Religiusnya masyarakat Kota Tidore Kepulauan merupakan warisan peradaban sejarah Kerajaan Islam Tidore. Selain itu, masyarakat Kota Tidore Kepulauan sangat kuat toleransi antara umat beragama. Berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), mayoritas penduduk Kota Tidore Kepulauan adalah beragam Islam dengan jumlah masjid sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) buah masjid, dan musolah 106 (seratis enam) buah. Dengan jumlah masjid dan musalah yang banyak tersebut sehingga Kota Tidore Kepulauan dijuluki “Negeri Seribu Masjid”. Selain agama Islam, di Kota Tidore Kepulauan terdapat penduduk beragama Kristen, baik Katolik dan Protestan. Gereja di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 35 (tiga puluh lima), yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) gereja Protestan dan 3 (tiga) gereja Katolik.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tindak pidana umum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat merupakan salah satu fenomena

gangguan sosial. Berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), tindak pidana umum yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2014 sebanyak 115 (seratus lima belas) kasus. Dari jumlah kasus tersebut yang diselesaikan pada tahun tersebut adalah 76 (tujuh puluh) kasus atau 66%. Jika jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2014 tersebut dirata-ratakan maka, Polres Kota Tidore Kepulauan pada setiap bulannya menerima laporan tindak pidana umum sebanyak 9-10 kasus. Melihat realitas tersebut, maka menurut hemat penulis, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah yang relatif aman secara sosial masyarakat.

Salah satu indikator penting dalam evaluasi pembangunan daerah adalah pendidikan. Hingga tahun 2013 jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Tidore Kepulauan adalah sebanyak 77 sekolah yang terdiri dari 22 TK negeri dan 55 TK swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 102 yang terdiri dari 101 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 37 sekolah yang terdiri dari 26 sekolah negeri dan 11 sekolah swasta. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tidore Kepulauan berjumlah 20 sekolah yang terdiri dari 12 SMA negeri dan 8 SMA swasta, sedangkan jumlah SMK di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 7 sekolah yang terdiri dari 5 SMK negeri dan 2 SMK swasta. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah 12 sekolah yang terdiri dari 6 sekolah negeri dan 6 swasta, Madrasah Tsanawiyah 11 sekolah yang terdiri dari 3 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta, sedangkan Madrasah Aliyah sebanyak 6 sekolah yang terdiri dari 1 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta (BPS, 2015).

Dengan jumlah sekolah yang relatif banyak dan tersebar secara merata pada seluruh kecamatan di Kota Tidore Kepulauan yang membuat angka

partisipasi anak usia sekolah di Kota Tidore Kepulauan relatif cukup tinggi. Dimana pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 99,20%, dan anak usia 13-15 sebesar 98,56%, serta anak usia 16-18 tahun mencapai 81-27% (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2015). Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka partisipasi anak usia sekolah di Kota Tidore Kepulauan sangat tinggi. Dengan terpelajar dan terdidiknya generasi sekolah tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat penyakit masyarakat pada lingkungan sosial kemasyarakatan.

Selain Sekolah-sekolah tersebut di atas, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 perguruan tinggi yaitu Universitas Nuku, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Tidore Mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), dan Universitas Bumi Hijrah (BPS, 2014). Keempat perguruan tinggi tersebut semuanya adalah perguruan tinggi swasta, dan dari sisi usia, keempat perguruan tinggi tersebut masih sangat muda. Universitas Nuku dan STIMIK Tidore Mandiri berdiri pada tahun 2001, dan STIKES berdiri pada tahun 2005, dan Universitas Bumi Hijrah berdiri pada tahun 2012. Dengan usia yang relatif muda tersebut, membuat keempat institusi perguruan tinggi tersebut masih memiliki keterbatasan, baik fasilitas infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Dengan demikian, keempat lembaga pendidikan tersebut sangat membutuhkan dukungan, dari masyarakat daerah untuk pengembangannya, utamanya dari pemerintah. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi tersebut perlu ditingkatkan dalam upaya untuk pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya manusia di Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara.

Dengan tersediannya fasilitas pendidikan dengan berbagai jenjang tersebut di atas merupakan salah satu modal sosial untuk pembangunan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Dalam artian, dengan semakin terdidiknya masyarakat Kota Tidore Kepulauan dengan hadirnya berbagai fasilitas pendidikan tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia masyarakat. Sumber daya manusia yang terdidik merupakan salah satu modal sosial pembangunan daerah.

Berbagai modal sosial kemasyarakatan berupa kehidupan masyarakat yang aman, toleransi antara umat beragama yang baik. Pada sisi yang lain, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, kemudian mendorong tingkat partisipasi sekolah yang tinggi, dan terciptanya sumber daya manusia yang baik, menjadi daya dukung pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, dari sisi keamanan dan kenyamanan sosial.

Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk pembangunan kepariwisataan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah merancang rencana strategi pembangunan pariwisata khususnya sektor peningkatan pariwisata yang harus dilakukan dan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.

Tabel 5.2 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Program	Sasaran Program	Indikator Program
Peningkatan pariwisata dan kesenian daerah	Meningkatnya kemampuan para pekerja wisata	Meningkatnya skill pemandu wisata
	Meningkatnya sanggar-sanggar budaya dan seni	Adanya sanggar budaya dan seni

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015

Namun demikian, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta dokumen daerah lainnya, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat lembaga pendidikan yang secara khusus membangun dan

menyiapkan sumberdaya manusia daerah tentang kepariwisataan. Realitas tersebut merupakan salah satu kelemahan pembangunan sumberdaya manusia daerah pada sektor pariwisata. Realitas tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yan sebagai berikut.

“....dalam usaha pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di daerah ini, salah satu kelemahan kita adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang profesional dalam bidang pariwisata. Lemahnya sumberdaya manusia kita di bidang pariwisata tersebut, salah satu faktornya adalah di daerah ini belum ada lembaga pendidikan yang secara khusus membuka jurusan yang berkaitan dengan pariwisata, baik pada tingkat lanjutan atas seperti SMK, maupun perguruan tinggi....” (Wawancara, 25 November 2015).

Dalam konsep pembangunan pariwisata, diperlukan daya dukung sosial budaya masyarakat yang kondusif, ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai sebagai modal sosial. Pada sisi yang lain, diperlukan daya dukung lingkungan alam. Daya dukung alam dalam konteks pembangunan pariwisata adalah adanya atraksi alam secara natural dan buatan menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

Kota Tidore Kepulauan dengan luas wilayah 13.862,86 km², dengan rincian luas darat 4.746 km² dan luas laut 9.116,36 km² (BPS, 2014). Kota Tidore Kepulauan adalah daerah dengan ciri kepulauan, di mana wilayahnya terdiri dari 12 (dua belas) pulau baik yang telah dihuni maupun yang tidak dihuni (data tentang pulau-pulau di Kota Tidore Kepulauan tersaji pada tabel 3.1). Lingkungan geografis Kota Tidore Kepulauan dengan ciri kepulauan tersebut membuat daerah ini semakin indah. Dengan daerah kepulauan tersebut membuat lingkungan pesisir dan pantai Kota Tidore Kepulauan terlihat sangat asri yang dilatari dengan perbukitan dan pegunungan yang hijau. Selain itu, secara topografi, pulau-pulau yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan yang berbukit dan lembah, serta dihiasi dengan hutan yang hijau menambah keindahan panorama

kepulauan Tidore. Keindahan alam yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan tersebut merupakan daya dukung lingkungan alam terhadap potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Merujuk pada berbagai data yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, secara sosial kultural, masyarakat Kota Tidore Kepulauan merupakan masyarakat yang majemuk. Namun kemajemukan tersebut tidak menghalangi masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam beraktifitas sosial dan ekonominya. Selain kemajemukan sosial kultural, masyarakat Kota Tidore Kepulauan memiliki kemajemukan sosial keagamaan. Namun keragaman kepercayaan tersebut tidak menghalangi aktifitas sosial keseharian masyarakat.

Kedua, keragaman sosial kultural dan keagamaan masyarakat Kota Tidore Kepulauan telah ada sejak zaman kerajaan. Keragaman dan kemajemukan kultur dan agama yang terdapat pada masyarakat Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan bagian dari warisan peradaban sejarah Kesultanan Tidore. Artinya, toleransi antara sesama yang tercipta dan terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Tidore Kepulauan saat ini telah ada pada zaman kerajaan dan par Indonesia.

Ketiga, dengan kehidupan yang penuh toleransi tersebut membuat Kota Tidore Kepulauan relatif aman dari berbagai kejahatan. Terjadinya konflik fertikal di tengah-tengah masyarakat tidak bersumber dari masalah yang bersifat suka, agama, ras, antara golongan (SARA), tetapi bersumber dari masalah politik. Rentannya konflik yang bersumber dari masalah politik tersebut disebabkan tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih minim, dan ketidak mampuan tokoh dan elit politik daerah memberikan pencerahan kepada masyarakat pengikutnya.

Keempat, Kota Tidore Kepulauan masih lemah dalam sisi ketersediaan sumberdaya manusia yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Selain itu, belum terdapat lembaga pendidikan, baik formal maupun non formasi yang terkait langsung dengan kepariwisataan.

Kelima, dalam sisi lingkungan alam, Kota Tidore Kepulauan ditakdirkan sebagai daerah kepulauan yang kemudian memperkaya potensi pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, pulau-pulau yang berada di Kota Tidore Kepulauan dengan topografi berbukit dan lembah dan dihiasi dengan hutan tropis yang hijau membuat daerah ini tampak asri dan indah.

5.1.4 Tata Laksana Infrastruktur

Dalam konsep pembangunan kepariwisataan, tata laksana dan tata letak infrastruktur kepariwisataan merupakan faktor penting untuk mendukung program pengembangan pariwisata di daerah destinasi wisata. Tata laksana infrastruktur kepariwisataan merupakan bagian dari manajemen pembangunan pariwisata. Artinya, tata laksana infrastruktur pariwisata adalah suatu desain yang mendukung fungsi sarana dan prasarana dari destinasi wisata, baik yang berupa manajemen sistem pengaturan maupun manajemen bangunan fisik. Dengan manajemen tersebut yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas berwisata di destinasi wisata yang dikunjungi. Pada sisi yang lain, tata laksana dan tata letak infrastruktur kepariwisataan merupakan faktor penting dan mendukung keindahan suatu objek atau kawasan pariwisata.

Sebagaimana data yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya, Kota Tidore Kepulauan memiliki objek wisata yang sangat kaya dan cukup potensial untuk dijual. Namun dalam sisi sarana pariwisata, Kota Tidore Kepulauan masih

memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut cukup berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di Kota Tidore Kepulauan. Dengan adanya keterbatasan tersebut membuat pemerintah daerah berusaha untuk melakukan penataan terhadap fasilitas infrastruktur ekonomi di daerah tersebut, yang secara tidak langsung juga menata fasilitas infrastruktur kepariwisataan. Pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan hingga pada saat ini masih dianggap dalam tahapan perencanaan maka daerah berusaha untuk menata seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan kepariwisataan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fas sebagai berikut.

“...kita mengakui bahwa pembangunan pariwisata di daerah ini masih dalam proses perencanaan. Walaupun sesungguhnya kita sudah jalan, tetapi perjalanan kita ini belum memiliki acuan, karena RIPPDA sementara masih di bahas oleh DPR (DPRD Kota Tidore Kepulauan)... sehingga berkaitan dengan penataan infrastruktur pariwisata kita masih dalam bentuk perencanaan. Harapan saya, semoga RIPPDA kita cepat di tetapkan dan kita bisa membangun pariwisata kita sesuai dengan rencana yang dibuat, dan mempunyai acuan rencana yang jelas....” (Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2015).

Berkaitan dengan penataan infrastruktur kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan, pemerintah daerah merencanakan tiga konsep besar berkaitan dengan hal tersebut. Ketiga konsep tersebut terdiri atas: rencana pengembangan kawasan wisata terpadu; rencana struktur tata ruang wisata; dan rencana rute perjalanan wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015: 60-81). Ketiga konsep rencana tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

(1). Rencana pengembangan kawasan wisata terpadu

Rencana kawasan wisata terpadu merupakan suatu bentuk rencana pengembangan kawasan pariwisata yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu kawasan pariwisata sebagai rujukan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis, di Kota Tidore Kepulauan terdapat beberapa kawasan

pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi pariwisata yang berada di wilayah kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan wisata terpadu. Adapun rencana pengembangan kawasan wisata terpadu di Kota Tidore Kepulauan meliputi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 60).

Pertama, kawasan wisata buatan terpadu. Kawasan wisata buatan terpadu direncanakan dengan tujuan untuk memberikan daya tarik tersendiri dan dimanfaatkan untuk tempat beraktivitas rekreasi maupun berolahraga. Rencana pengembangan kawasan wisata buatan terpadu meliputi pembangunan taman-taman kota, dan pengembangan objek wisata bahari. Kedua, kawasan wisata sejarah dan budaya terpadu. Pembangunan kawasan wisata sejarah dan budaya terpadu di Kota Tidore Kepulauan sebagai wujud dari kota pusat pengembangan kebudayaan dan sejarah yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Rencana pengembangan kawasan wisata sejarah dan budaya terpadu dengan membangun pusat kebudayaan, taman miniatur Tidore dan Maluku Utara. Ketiga, kawasan wisata alam terpadu. Kota Tidore Kepulauan adalah daerah yang berciri kepulauan dan memiliki keindahan alam yang sangat menarik. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kawasan wisata alam yang bersifat ekologis dan kapung wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 60-62).

(2). Rencana struktur tata ruang wisata

Rencana struktur tata ruang wisata adalah dalam upaya untuk meningkatkan sistem manajemen tata ruang infrastruktur pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan di destinasi wisata. Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan maka

pereintah daerah berusaha untuk mendesain tata ruang pariwisata di daerah tersebut. Terkait dengan rencana tata ruang pembangunan kepariwisataan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendesain rencana strategi pembangunan tata ruang wisata dan lingkungan daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Program Pembangunan Tata Ruang Wisata dan Lingkungan

Program	Sasaran Program	Indikator Program
Pengembangan Wisata	Meningkatnya kulaitas dan kuantitas daerah wisata	Tersediannya sarana infrastruktur pariwisata
	Meningkatnya sarana infrastruktur pariwisata	Tertatanya ruang kawasan pendukung
Pengembangan, pengendalian dan konservasi sumber daya air	Pemeliharaan sumber daya air	Tersediannya sumber daya air bersih
Pembangunan sarana dan prasarana pengairan, pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Pembangunan pengendalian banjir dan abrasi pantai	Banjir dan abrasi pantai tertangani
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan	Kualitas lingkungan terjaga

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015

Dalam rencana struktur tata ruang wisata di Kota Tidore Kepulauan dalam program pembangunan pariwisata sebagaimana terdapat pada tabel di atas, khusus pengembangan ruang wisata, pemerintah daerah mengembangkan rencana 5 (lima) zona pengembangan kawasan pariwisata. Kelima zoa wisata tersebut terdiri atas 1 (satu) zona pusat pengembangan dan 4 (empat) zona sub pusat pengembangan. Kelima zona pengembangan tersebut dipetakan sebagai berikut (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 67).

1. Zona Pusat berada di Pulau Tidore, dengan daya tarik utama adalah wisata sejarah, budaya, agrowisata, alam dan bahari, dengan daya tarik pendukung wisata kuliner.

2. Zona Sub Pusat pertama di Pulau Maitara, dengan daya tarik utama wisata bahari dan alam, dengan daya tarik pendukung wisata kuliner.
3. Zona Sub Pusat kedua di Pulau Mare, dengan daya tarik utama wisata bahari dan diving, dengan daya tarik pendukung wisata alam.
4. Zona Sub Pusat ketiga seluruh kecamatan di Sofifi, dengan daya tarik utama wisata bahari dan alam, dengan daya tarik pendukung wisata budaya.
5. Zona Sub Pusat keempat, gugusan Pulau Woda, dengan daya tarik wisata utama adalah wisata bahari dan diving, dengan daya tarik pendukung wisata alam dan budaya.

Dalam upaya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan, maka pemerintah Kota Tidore Kepulauan berencana membangun berbagai fasilitas pendukung pariwisata berupa: stasiun pengawasan taman laut; stasiun penjaga pantai; sistem transportasi wisata; dermaga wisata; akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran. Fasilitas-fasilitas tersebut disediakan di setiap zona pengembangan pariwisata. Khusus stasiun pengawasan taman laut dan stasiun penjaga pantai, akan dibangun pada setiap objek wisata bahari (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 61).

Terkait dengan sistem manajemen tata ruang infrastruktur pariwisata yang meliputi tata laksana dan tata letak infrastruktur kepariwisataan. Amatan penulis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dilakukan secara terencana dengan baik. Hal tersebut terlihat, pada kawasan objek wisata Pantai Rum Balibunga, di mana pada kawasan wisata tersebut terdapat objek wisata Pantai Rum, Tanjung Konde, Benteng Ts Tjobe, dan Tugu Pendaratan Bangsa Spanyol. Namun pada area kawasan wisata tersebut dibangun fasilitas umum Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dengan adanya PLTU tersebut mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata tersebut. Tidak hanya wisatawan, masyarakat di sekitar kawasan tersebutpun merasa terganggu dengan

keberadaan PLTU tersebut. Permasalahan tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak San sebagai berikut.

“....sebenarnya, saya tidak terlalu setuju dengan lokasi PLTU tersebut. Bukan cuman saya masyarakat yang ada disekitar PLTU ini juga merasa terganggu dengan PLTU tersebut. Bunyi mesin PLTU tersebut sangat besing dan mengganggu kita yang ada di sini. Selain itu, batur bara yang ditampung di ruang terbuka itu, debunya cukup mengganggu aktifitas masyarakat di sini....” (Wawancara, 10 Desember 2015).



Gambar 27. Keberadaan PLTU dan Pelabuhan di Kawasan Objek Wisata Pantai Rum Balibunga
Sumber: Foto Penulis, 2015

Selain masalah PLTU di kawasan Panatai Rum Balilunga di atas. Permasalahan yang tata letak infrastruktur pendukung kepariwisataan pada kawasan wisata Pulau Maitara terdapat dapat masalah yang sama. Pada kawasan wisata Pulau Maitara, dalam amatan penulis, keberadaan pelabuhan wisata yang dibangun pemerintah daerah tepat di tengah-tengah Pantai Kailupa atau Panatau Seribu Rupiah yang mengganggu keindahan objek wisata tersebut. Selain berdampak negatif terhadap keindahan pantai, keberadaan dermaga wisata tersebut mengganggu kenyamanan wisatawan dalam beraktifitas wisata.

Harapannya, tata letak atau keberadaan dermaga tersebut tidak berada di tengah-tengah panatai atau objek wisata tersebut, tetapi harus berada di sampaing objek wisata sehingga tidak mengganggu keindahan panatai dan dan juga kenyamanan aktifitas wisatawan. Harapan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Has sebagai berikut.

“....penjelasan pemerintah daerah tentang pembangunan dermaga tersebut adalah sebagai dermaga pariwisata. Namun menurut saya, keberadaan dermaga tersebut merusak keindahan pantai ini, dan mubajir. Karena dermaga ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kerena setiap orang yang berkunjung di Pulau Maitara ini dan aktifitas pelayaran masyarakat di pulau ini selalu menggunakan pelabuhan umum yang ada di sana....” (Wawancara, 18 Agustus 2015).



Gambar 28. Keberadaan Dermaga Wisata di Pulau Maitara
Sumber: Foto Penulis, 2015

(3). Rencana rute perjalanan wisata

Rute perjalanan wisata merupakan media petunjuk bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan di daerah destinasi wisata. Instrumen tersebut untuk memberikan informasi dan kemudahan kepada wisatawan. Pentingnya rute perjalanan tersebut, maka pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendesain rencana rute perjalanan wisata di Kota Tidore Kepulauan dengan dua alternatif rute, yaitu: (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2015: 78-79).

Pertama, wisatawan yang melalui perjalanan dari Pulau Ternate. Wisatawan yang melalui perjalanan dari Pulau Ternate langsung menuju ke Tidore melalui pintu masuk pelabuhan Rum. Di Tidore, wisatawan mendapatkan informasi tentang kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan. Setelah menikmati berbagai objek wisata di Pulau Tidore, Maitara dan Mare, wisatawan dapat melanjutkan perjalanannya ke Pulau Halmahera (Sofifi) untuk menikmati objek wisata di daerah Sofifi. Kedua, wisatawan melalui Pulau Halmahera. Pulau

Halmahera (Sofifi) merupakan salah satu pintu masuk untuk mendatangi Kota Tidore Kepulauan. Di Sofifi, wisatawan dapat mendatangi dan menikmati berbagai objek wisata di kawasan Sofifi dan sekitarnya. Selanjutnya, wisatawan melanjutkan perjalanannya ke Tidore dengan beberapa alternatif transportasi laut melalui beberapa pelabuhan yang ada di wilayah Sofifi.

Berkaitan dengan rencana rute perjalanan wisatawan tersebut, menurut amatan penulis, husus rute perjalanan melalui Pulau Halmahera idealnya dipetakan dalam dua pintu masuk, yaitu pintu masuk selatan dan utara. Ini penting dilakukan kerana, dikarenakan secara geografis keberadaan wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada di Pulau Halmahera berada di tengah sehingga akses masuk ke Kota Tidore Kepulauan di Pulau Halmahera berada di dua pitu, yaitu selatan dan utara. Selain itu, rentang kendali wilayah utara dan selatan cukup berjauhan. Dengan demikian, untuk mempermudah perjalanan wisata dari wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata di Kota Tidore Kepulauan, husunya di Pulau Halmahera (Sofifi), diperlukan 2 (dua) pusat informasi wisata di Pulau Halmahera, yaitu di utara berada di Sofifi dan selatan berada di Payahe.

Merujuk pada penyajian data tata laksana infrastruktur pariwisata yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pembangunan pariwisata yang dijalankan oleh Kota Tidore Kepulauan saat ini masa dalam tahap perencanaan. Hal tersebut dapat terlihat dimana, Kota Tidore Kepulauan belum mempunyai landasan yuridis berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Artinya, Kota Tidore Kepulauan belum mempunyai dokumen perencanaan sebagai landasan dan pijakan baik secara hukum maupun pengara dalam pelaksanaan pembangunan

pariwisata daerah. Namun demikian, Kota Tidore Kepulauan terus melakukan pembenahan, baik landasan hukum dan konsep pembangunan pariwisata, dan pada waktu yang bersamaan daerah tersebut melakukan pembangunan secara fisik prasarana dan sarana pariwisata.

Kedua, untuk menata ruang pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, maka daerah tersebut mendesain tata laksana infrastruktur pariwisata daerah dengan tiga konsep pembanguan yaitu, rencana pengembangan kawasan wisata terpadu; rencana struktur tata ruang wisata; dan rencana rute perjalanan wisata.

5.2 Fasilitas Penunjang dan Pendukung Pariwisata

Dalam konsep kepariwisataan, sarana penunjang dan pendukung pariwisata adalah fasilitas kebutuhan mendasar yang harus tersedia di daerah destinasi wisata. Selain sebagai fasilitas kebutuhan wisatawan, sarana pariwisata merupakan faktor pendukung dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian, sarana wisata merupakan fasilitas pendukung dari suatu destinasi wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Secara konseptual berbagai sarana pendukung dan pendukung wisata yang harus disediakan di daerah destinasi wisata dalam pembangunan kepariwisataan adalah hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Kota Tidore Kepulauan yang telah mengkonsepkan dirinya sebagai daerah destinasi pariwisata, dan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerah maka penyediaan fasilitas sarana pendukung dan pendukung pariwisata merupakan kebutuhan yang harus disediakan oleh daerah. Artinya, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kota

Tidore Kepulauan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan daerah sebagaimana yang dikonsepskan jika sarana pendukung dan pendukung pariwisata tidak dibangun dan disediakan oleh daerah.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah hotel di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1 (satu) buah, yang berada di Desa Gusale (Sofifi). Sedangkan penginapan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 5 (lima) buah, masing 2 (dua) berada di Kota Tidore dan 3 (tiga) berada di Sofifi.

Amatan penulis, fasilitas sarana pariwisata yang keberadaannya sebagai salah satu faktor pendukung pengembangan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan masih sangat kurang. Keterbatasan fasilitas penunjang pariwisata berupa sarana akomodasi dan restoran yang dialami Kota Tidore Kepulauan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar ketika berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan. Sapta Nirwandar menjelaskan bahwa “Kota Tidore kini memasuki usia 905 tahun (pada tahun 2013). Tidore yang masuk dalam Provinsi Maluku Utara ternyata sangat kaya obyek wisata, mulai dari budaya, sejarah, pulau dan pantai yang indah serta penduduk yang ramah” (Kompas.com, 21 April 2013).

Lebih lanjut Sapta Nirwandar menjelaskan “Tidore masih memiliki segudang PR (pekerjaan rumah) untuk membenahi fasilitas akomodasi, mempersiapkan SDM pariwisata, mendirikan pasar oleh-oleh, menyediakan kuliner khas setempat dan masalah transportasi”. Senada dengan Sapta Nirwandar, Achmad Mahifa, mantan Walikota Tidore Kepulauan menjelaskan bahwa “Tidore Kepulauan memiliki aset atraksi budaya yang beragam dan

menarik serta akses yang mudah. Namun, untuk sarana akomodasi hingga kini masih belum memadai” (Seruu.com, 25 Maret 2012).

Keterbatasan sarana pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fas sebagai berikut.

“...kita harus mengakui bahwa fasilitas sarana pariwisata di daerah ini masi sangat-sangat kurang, dan itu kita tidak bisa pungkiri, ini adalah masalah besar bagi daerah dalam upaya pengembangan pariwisata kita.... seharusnya kita punya fasilitas-fasiltas yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan ini, tetapi kenyataannya kita belum punya hotel berbintang. Yang ada cuman 1 (satu) hotel kelas melati dan 5 (lima) penginapan. 1 (satu) hotel itu ada di Sofifi dan 5 (lima) penginapan itu masing-masing 3 (tiga) di Sofifi dan 2 (dua) ada di Tidore (Pulau Tidore).... di Kota Tidore ini bari satu restoran, yaitu Restoran Seroja. Dan juga terdapat beberapa rumah makan yang di atas standar lah....” (Wawancara, 15 Oktober 2015).

Realitas tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sam sebagai berikut.

“....berkaitan dengan fasilitas sarana pariwisata seperti akomodasi, transportasi dan sebagainya, menurut saya di daerah ini masih sangat minim. Berdasarkan data yang kami miliki, di Kota Tidore Kepulauan belum ada hotel berbintang, yang ada baru 1 (satu) hotel kelas melati.... untuk restoran kita punya satu restoran, dan beberapa rumah maka, yang dapat menjamu tamu-tamu....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas, tergambar bahwa di Kota Tidore Kepulauan ketersediaan fasilitas sarana pariwisata sebagai salah satu pendukung pengembangan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan belum tersedia secara memadai. Berkaitan dengan keterbatasan sarana akomodasi di Kota Tidore Kepulauan tersebut Bapak Ara menjelaskan bahwa.

“....dalam satu bulan kurang lebih 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang wisatawan mancanegara datang ke Tidore melalui saya.... wisatawan asing tersebut hanya datang mengunjungi tempat-tempat wisata dan menikmati objek wisata di sini, dan setelah itu mereka kembali ke Ternate dan menginap di sana. Yang nginap di sini paling-paling 3 (tiga) atau 4 (empat) orang saja.... mereka tidak menginap di sini karena kita tidak punya hotel....” (Wawancara, 6 September 2015).

Selain ketersediaan hotel sebagai fasilitas pendukung kepariwistaan, keberadaan restoran merupakan fasilitas yang penting pada suatu destinas

pariwisata. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informen di depan, bahwa di Kota Tidore Kepulauan baru terdapat 1 (satu) restoran sebagai saran pendukung pariwisata. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015); dan BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah usaha rumah makan di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 14 (empat belas) buah.

Masih terbatasnya fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata seperti restoran dan rumah makan sebagaimana disebutkan dalam data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan amatan penulis menunjukkan bahwa secara realitas, Kota Tidore Kepulauan masih sangat terbatas ketersediaan restoran dan rumah makan sebagai fasilitas penunjang dan pendukung pengembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Memang terdapat berbagai usaha kuliner yang terpusat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah di lokasi objek wisata Panatai Tugulufa. Namun, usaha kuliner tersebut dalam amatan penulis belum dapat memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas serta layak untuk menjamu tamu-tamu resmi daerah (tamu VIP).

Pada sisi yang lain, telah dikonsepskan oleh pemerintah daerah dalam rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pada Pasal 7, Huruf F menyebutkan secara jelas bahwa “Makanan dan Panganan Khas” merupakan salah satu potensi pariwisata daerah. Selanjutnya pada Bagian Makanan Khas, Pasal 13 pada Ranperda tersebut menyebutkan secara jelas keanekaragaman jenis makanan dan panganan khas Tidore cukup banyak, diantaranya: Popeda,

Telagule (nasi jagung), *Gohu Nyao* (lauk yang terbuat dari ikan yang tidak dimasak), Lapis Tidore.

Secara konseptual, kuliner dan usaha atau industri kuliner merupakan salah satu objek wisata yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah destinasi wisata. Dengan demikian keberadaan restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai makanan dan panganan khas daerah, selain sebagai fasilitas penunjang pariwisata, ketersediaan usaha restoran dan rumah makan merupakan bagian dari objek wisata yang dapat menarik minat wisatawan. Namun, di Kota Tidore Kepulauan masih terbatas ketersediaan restoran dan rumah makan sebagai fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata di daerah tersebut.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa, pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Kota Tidore Kepulauan belum memiliki fasilitas akomodasi seperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan yang memadai. Kekurangan fasilitas penunjang pariwisata tersebut disadari oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman. Oleh karena itu, menurut Asrul Sani kedepan akan melakukan kerjasama dengan investor lokal untuk membangun fasilitas penunjang tersebut (Kompas.com, 21 April 2013).

Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman sebagaimana juga di sebutkan dalam rencana program Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dalam rencana program pengembangan pariwisata, khususnya program pengembangan kemitraan dan investasi pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan mempunyai rencana program

dengan sasaran “Meningkatkan peluang infestasi dan agen pariwisata”, dengan indikator parogramnya “Adanya investor pariwisata dan agen”.

Berdasarkan data yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah destinasi pariwisata masih memiliki keterbatasan sarana akomodari pariwisata seperti hotel dan penginapan. Selain keterbatasan sarana akomodasi, Kota Tidore Kepulauan memiliki keterbatasan sarana restoran dan rumah makan. Secara kuantitatif Kota Tidore Kepulauan baru memiliki satu buah restoran.

5.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotrasi

Konsep pembangunan pariwisata menjelaskan bahwa dalam sistem kepariwisataan sarana dan prasarana transportasi merupakan kebutuhan antara untuk orang berwisata. Secara konseptual sarana dan prasarana transportasi dalam pariwisata adalah sumberdaya yang telah tersedia secara alami, maupun sumber daya buatan manusia yang harus ada dan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya. Artinya, untuk menjaga agar perjalanan wisatawan tetap aman dan nyaman berada di destinasi wisata maka mempersiapkan daya dukung sarana dan prasarana transportasi yang akan digunakan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana transportasi perlu dibangun dan disesuaikan pada destinasi wisata dan akses menuju objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Maluku Utara. Dari sisi usia, pada tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan memperingati ulang tahunnya yang ke 12. Artinya, dari sisi usai Kota Tidore Kepulauan terbilang relatif cukup muda dibandingkan dengan daerah-daerah lain

yang berdekatan dengan Kota Tidore Kepulauan seperti, Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Tengah. Namun demikian, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimilikinya, Kota Tidore Kepulauan berusaha untuk membangun infrastruktur dasar ekonomi seperti, jalan jembatan, pelabuhan dan lainnya untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya.

Berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, salah satu prasyarat pembangunan pariwisata adalah kebutuhan akan parasarana yang mendukung berjalannya sistem pelayanan pariwisata. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi merupakan sebuah kebutuhan dalam konsep pembangunan pariwisata, dan merupakan daya dukung sehingga dapat berjalannya sistem pelayanan kepariwisataan. Prasarana dan infrastruktur dasar pembangunan ekonomi, yang juga sebagai daya dukung pembangunan kepariwisataan adalah tersedianya jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, beserta moda transportasinya.

Kota Tidore Kepulauan dalam usia yang relatif muda telah berusaha untuk membangun berbagai infrastruktur ekonomi tersebut, dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan pada seluruh bidang termasuk pariwisata. Berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang juga sebagai daya dukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan. Menurut amatan penulis, prasarana dan infrastruktur dasar tersebut telah dibangun, dan keberadaannya secara fisik cukup baik.

Kota Tidore Kepulauan dengan luas wilayah 13.862,86 km² dengan luas dataran 4.746 km² dan luas laut 9.116,36 km², dengan jumlah pemerintah kecamatan sebanyak 8 kecamatan, dan terdiri dari 89 dese/kelurahan (BAPPEDA, 2015; dan BPS Kota Tidore Kepulauan, 2015), dalam amatan penulis secara akses tidak ada kecamatan atau desa/kelurahan yang terisolir.

Artinya, dari sisi infrastruktur transportasi (darat maupun laut) di Kota Tidore Kepulauan relatif cukup baik. Hal tersebut, sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Aim sebagai berikut:

“....iya, berkaitan dengan kebutuhan prasarana pariwisata seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Menurut saya, di Kota Tidore Kepulauan ini, semua infrastruktur tersebut telah dibangun oleh pemerintah daerah, dan menurut saya, semuanya itu secara fisik cukup baik....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur dasar ekonomi dan prasarana pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, khususnya pada sektor transportasi telah terbangun dengan baik. Gambaran tentang jalan sebagai salah satu prasarana pariwisata di sektor transportasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.4 Panjang Jalan (km) di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014

No.	Kondisi Jalan	Status Jalan			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kab./Kota	
1.	Aspal	183.174,25	15.541,66	212.250,19	410.966,10
2.	Tanah	-	-	74.750,82	74.750,82
	Total	183.174,25	15.541,66	287.000,81	485.716,92

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2015

Dengan menggunakan data kuantitatif di atas tergambar bahwa secara keseluruhan panjang jalan di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2014 adalah 485.716,92 km. Dari jumlah panjang jalan tersebut hanya 74.750,82 km yang belum beraspal, dan jalan yang beraspal tersebut dari sisi kepemilikan atau status jalan adalah jalan milik pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian maka dari seluruh panjang jalan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, 84,61% telah diaspal dan tersisa 15,39% yang belum diaspal.

Pentingnya kersediaan dan keberadaan jalan untuk kegiatan perekonomian bagi daerah dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh BAPPEDA (2015: 69) sebagai berikut:

“Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersediannya sarana jalan, oleh karena jalan merupakan sarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalulintas barang dari satu daerah ke daerah lain.”



Gambar 5.29 Jalan dan Terminal di Kota Tidore Kepulauan
Sumber: Foto Penulis, 2015

Dalam upaya mempermudah dan memperlancar pelayanan transportasi darat masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan daerah-daerah disekitarnya, pemerintah daerah telah membangun 3 (tiga) terminal tipe C. Ketiga terminal tersebut masing-masing berada di pelabuhan Rum Kecamatan Tidore Utara, pasar Sarimalah Kecamatan Tidore (pusat kota), dan pelabuhan Sofifi (BAPPEDA, 2014: 24).

Pada sisi yang lain, Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan. Dengan demikian maka transportasi laut merupakan sektor transportasi yang cukup vital di Kota Tidore Kepulauan. Dalam upaya untuk menghubungkan pulau-pulau di wilayah Kota Tidore Kepulauan, pemerintah daerah telah membangun beberapa pelabuhan rakyat dan penyeberangan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh BAPPEDA (2015: 71) sebagai berikut:

“Sebagai daerah kepulauan, perhubungan laut merupakan transportasi utama untuk menghubungkan masyarakat antar pulau. Oleh karena itu pelabuhan merupakan sarana penting dalam transportasi laut. Sarana pelabuhan tersebut tersebar di semua kecamatan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, dan selalu diupayakan menyediakan sarana pendukung lainnya untuk dapat memudahkan mobilitas masyarakat antara pulau.”

Amatan penulis, dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan (2015), di Kota Tidore Kepulauan terdapat 3 (tiga) pelabuhan Penyebrangan Kapal Feery, yaitu pelabuhan penyebrangan Rum yang melayani penyebarangan Tidore-Ternate, pelabuhan penyebrangan Dowora yang melayani penyebarangan Tidore-Sofifi, dan pelabuhan penyebrangan Sofifi yang melayani penyebrangan Sofifi-Tidore dan Sofifi-Ternate. Melalui ketiga pelabuhan penyebrangan tersebut dipergunakan oleh ASDP Cabang Ternate melayani mobilisasi arus barang, jasa dan manusia di provinsi Maluku Utara. Amatan penulis, masyarakat Maluku Utara sangat terbantu dengan adanya ketiga pelabuhan penyebrangan tersebut. Hal tersebut terlihat dari antosianya masyarakat menggunkan model transportasi kapal feery untuk melakukan penyebrangan antara pulau di daerah tersebut.



Gambar 5.30 Pelabuhan dan Penyebrangan di Kota Tidore Kepulauan
Sumber: Foto Penulis, 2015

Selian pelabuhan penyebrangan, dalam upaya untuk membangun perekonomian daerah, dan memudahkan mobilisasi arus barang, jasa dan manusia. Kota Tidore Kepulauan membangun jembatan sebagai fasilitas transportasi lautu untuk memudahkan akses dan perubungan natar pulau dalam wisayah administrasi Kota Tidre Kepulauan dengan dengan daerah-daerah lain di Maluku Utara, maupun di kawasan Timur Indonesia.

Tabel 5.5 Pelabuhan di Kota Tidore Kepulauan

No.	Pelabuhan	Lokasi	Pelayaran
1.	Trikora	Kel. Goto, Kec. Tidore	Melayani kapal dari dan ke seluruh pelabuhan regional Maluku Utara dan Maluku serta Papua
2.	Pasar Goto	Kel. Goto, Kec. Tidore	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Sofifi dan Somahode
3.	Pasar Sarimalah	Kel. Goto, Kec. Tidore	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Sofifi, Somahode, dan Gita.
4.	Tomolou	Kel. Tomolou, Kec. Tidore Selatan	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Mare
5.	Rum	Kel. Rum Balibunga, Kec. Tidore Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Maitara dan Ternate
6.	Mafututu	Kel. Mafututu, Kec. Tidore Timur	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Ternate dan Sofifi
7.	Cobo	Kel. Cobo, Kec. Tidore Timur	Melayani pelayaran rakyat dari Tidore ke Ternate
8.	Maitara	Pulau Maitara, Kec. Tidore Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Maitara ke Tidore dan Ternate
9.	Mare	Pulau Mare, Kec. Tidore Selatan	Melayani pelayaran rakyat dari Mare ke Tidore dan Moti
10.	Kaiyasa	Desa Kaiyasa, Kec. Oba Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Kaiyasa ke Tidore dan Ternate
11.	Guraping	Kel. Guraping, Kec. Oba Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Sofifi ke Tidore dan Ternate
12.	Sofifi	Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Sofifi ke Tidore dan Ternate
13.	Sofifi Darko	Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Sofifi ke Tidore dan Ternate
14.	Somahode	Desa Somahode, Kec. Oba Utara	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba Utara ke Tidore
15.	Paceda	Desa Paceda, Kec. Oba Tengah	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba Tengah ke Tidore
16.	Loleo	Desa Loleo, Kec. Oba Tengah	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba Tengah ke Tidore dan Ternate
17.	Payahe	Kel. Payahe, Kec. Oba	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba dan Oba Tengah ke Tidore dan Ternate
18.	Gita	Desa Gita, Kec. Oba	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba dan Oba Tengah ke Tidore
19.	Maidi	Desa Maidi, Kec. Oba Selatan	Melayani pelayaran rakyat dari Kec. Oba dan Oba Selatan ke Tidore dan Ternate

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, 2015

Melalui data yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, dari sisi transportasi laut Kota Tidore Kepulauan memiliki fasilitas pelabuhan yang tersebar di setiap kecamatan. Dengan keberadaan pelabuhan tersebut yang kemudian memudahkan akses masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan daerah-daerah disekitarnya melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Melalui

pelabuhan-pelabuhan tersebut yang kemudian memperlancara arus barang, manusia dan jasa ke seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Berkaitan dengan sarana transportasi sebagai fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan pariwisata di daerah destinasi wisata, selain ketersediaan saran jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan. Diperlukan juga kebutuhan mendasar dari wisatawan adalah sarana model transportasi. Sarana model transportasi atau kendaraan sebagai salah satu fasilitas pendukung kegiatan berwisata di Kota Tidore Kepulauan harus tersedian secara memadai, baik dalam sisi kuantitas maupun kualitas. Hasil amatan penulis menunjukan bahwa ketersediaan fasilitas model transportasi di Kota Tidore Kepulauan cukup baik, baik transportasi darat maupun laut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rak sebagai berikut.

“....walaupun Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah kepulauan, tetapi secara umum tidak ada daerah di Kota Tidore Kepulauan yang terisolasi atau yang tidak terjangkau kendaraan, baik laut maupun darat.... transportasi darat misalnya, baik di Tidore ini dan di Sofifi, kita punya banyak model transportasi seperti oto (mobil) penumpang umum, kemudian ada bentor (becak bermotor) dan ojek.... sedangkan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah atau pulau-pulau di Kota Tidore Kepulauan dan juga daerah-daerah tetangga seperti Ternate. Kita punya beberapa alat transpotasi seperti *spedboot*, motor (kapal kayu), dan feery.” (Wawancara, 7 Oktober 2015).

Penjelasan informen tersebut di atas tergambar bahwa secara umum tidak ada daerah di Kota Tidore Kepulauan yang tidak terjangkau oleh sarana transportasi, baik darat maupun laut. Fasilitas transpotrasi tersebut telah digunakan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan daerah lain di Provinsi Maluku Utara untuk mobilisasi manusia, barang dan jasa di daerah Maluku Utara. Amatan penulis, terdapat beberapa model trasportasi (laut dan darat) yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk beraktifitas sesuai dengan kebutuhannya. Pada transportasi laut, terdapat kapal feery, *spedboot*, dan kapal kayu. Sedangkan

transportasi darat terdapat mobil umum dalam kota, becak bermotor (bentor), dan ojek. Untuk perjalanan antar kota dalam provinsi, terdapat mobil bus dan mobil taxi antar kota.

Selain, sarana infrastruktur dalam bentuk jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta model transportasi yang digunakan dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Dalam konsep pembangunan kepariwisataan, keberadaan biro perjalanan di daerah destinasi wisata adalah sebuah kebutuhan.

Berdasarkan amatan penulis, di Kota Tidore Kepulauan belum tersedia jasa biro perjalanan sebagai salah satu media pendukung pembangunan pariwisata. Realitas tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Sam sebagai berikut:

“....kalu untuk transportasi saya pikir cukup baik lah, karena selain kita punya transportasi umum, ada juga kendaraan-kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai taxi yang selalu menunggu penumpang seperti di terminal Rum, di terminal di pasar Sarimalaha, dengan di pelabuhan pasar Sarimalaha itu.... cuman kalau biro perjalanan, saya lihat di sini belum ada....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas terbaca bahwa di Kota Tidore Kepulauan belum terseda usaha jasa biro perjalanan sebagai salah satu sarana pendukung aktifitas kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan. Realitas tersebut merupakan salah satu kekurangan yang dihapai oleh Kota Tidore Kepulauan dalam konsep pengembangan kepariwisataan di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana pariwisata sebagai salah satu fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan relatif cukup tersedia dan baik, baik secara kualitas dan maupun kuantitasnya. Prasarana pendukung utama kegiatan pariwisata seperti akses dan transporasi, baik darat maupun laut telah tersedia dengan baik.

Walaupun Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun tidak ada daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan terisolasi dari transportasi. Semua daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan bisa dijangkau dengan berbagai model transportasi, baik laut maupun darat. Pada transportasi darat terdapat beberapa model transportasi seperti kendaraan umum mini bus, ojek dan becak bermotor (bentor). Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa alternatif kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi penyebarangan antar pulau, seperti kapal feri, kapal motor, dan speedboat.

Dalam konteks sarana dan prasarana transportasi sebagai fasilitas pendukung pariwisata telah tersedia dengan baik. Namun pada sisi yang lain, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat sarana pariwisata seperti biro perjalanan. Biro perjalanan sebagai salah satu media pendukung bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas berwisata.

5.4 Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung

Konsep pembangunan pariwisata menjelaskan bahwa dalam sistem kepariwisataan diperlukan fasilitas umum pendukung. Ketersediaan fasilitas umum pendukung dalam sistem kepariwisataan merupakan kebutuhan pendukung atau penunjang untuk para wisatawan. Fasilitas umum pendukung yang harus tersedia pada destinasi pariwisata adalah ketersediaan air bersih, sarana telekomunikasi, bank, rumah sakit, apotik, dan pusat perbelanjaan.

Ketersediaan fasilitas umum pendukung dalam pembangunan destinasi pariwisata agar perjalanan wisatawan tetap aman dan nyaman berada di destinasi wisata. Oleh karena itu, daerah destinasi wisata harus mempersiapkan fasilitas umum pendukung pariwisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan.

Keberadaan fasilitas umum pendukung wisata tersebut perlu dibangun dan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

Kota Tidore Kepulauan dalam usia yang relatif muda telah berusaha untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Upaya yang dilakukan oleh daerah tersebut, dalam amatan penulis, sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan pada seluruh bidang dan sektor termasuk pariwisata.

Dalam amatan penulis dan berdasarkan data dari BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan (2014), telah tersedia berbagai fasilitas prasarana umum yang merupakan kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan, dan juga sebagai daya dukung pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Berbagai fasilitas umum yang telah disediakan oleh daerah dalam kerangka pembangunan daerah diantaranya, penyediaan fasilitas air bersih, telekomunikasi, rumah sakit, bank, listrik dan lainnya.

Untuk fasilitas air bersih, di Kota Tidore Kepulauan telah tersedia fasilitas air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (BAPPEDA, 2014: 24). Namun demikian, berdasarkan amatan penulis, belum semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan menikmati fasilitas ini, khususnya masyarakat di 4 (empat) kecamatan di Pulau Halmahera (Kota Sofifi). Untuk di Pulau Tidore telah tersedia fasilitas air bersih dari PDAM, namun belum seluruh masyarakat di Pulau tidore menikmati fasilitas umum tersebut.

Realitas tersebut sebagaimana juga dijelaskan dalam dokumen RTRW Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut. “Prasarana air bersih masih sangat kurang. Hingga saat ini jaringan air bersih baru menjangkau sebagian daerah Pulau Tidore.” Artinya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui badan usaha

milik daerah pengelola air bersih telah berusaha menyediakan fasilitas air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Namun, belum semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan menikmati fasilitas umum yang bersifat mendasar tersebut.

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu parasarana pariwisata yang harus ada di destinasi wisata. Untuk fasilitas kesehatan, di Kota Tidore Kepulauan telah ada 2 (dua) rumah sakit (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2015). Amatan penulis, kedua rumah sakit tersebut berada di Kota Tidore dan Kota Sofifi masing-masing 1 (satu) rumah sakit. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah, dimana rumah sakit yang ada di Kota Tidore adalah milik pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, dan rumah sakit yang berada di Sofifi adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara.

Selain rumah sakit, berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2015) di Kota Tidore Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) puskesmas. Kesepuluh puskesmas tersebut tersebar pada setiap kecamatan di Kota Tidore Kepulauan. Dalam amatan penulis, Puskesmas yang ada di Kota Tidore Kepulauan tersebut memiliki fasilitas rawat inap untuk pasien. Pada sisi lain, apotek sebagai fasilitas pendukung kesehatan telah ada, dan di Kota Tidore Kepulauan terdapat 6 (enam) apotek. Keenam apotek tersebut terdiri dari 4 (empat) yang berada di Kota Tidore, dan 2 (dua) berada di Kota Sofifi.

Untuk sarana komunikasi, selain sarana telekomunikasi konvensional atau telepon kabel. Di Kota Tidore Kepulauan telah tersedia sarana komunikasi seluler. Saran komunikasi seluler tersebut dibangun oleh PT Telkomsel pada tahun 2002 (BAPPEDA, 2014: 25). Melalui fasilitas komunikasi tersebut yang

kemudian mempermudah akses informasi oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasinya.

Untuk mendukung aktifitas transportasi, husunya transportasi darat, maka diperlukan fasilitas stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di wilayah Kota Tidore Kepulauan telah terdapat 2 (dua) unit SPBU yang melayani kebutuhan bahan kendaraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Kedua SPBU tersebut masing-masing berada di Pulau Tidore dan Sofifi (Oba/Pulau Halmahera) (BAPPEDA, 2014: 23).

Untuk energi listrik, seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan telah terlayani energi listrik. Artinya, tidak ada daerah di Kota Tidore Kepulauan yang terisolasi dari fasilitas energi listrik. Fasilitas listrik yang digunakan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan dipasok oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Ranting Soasio, dengan didukung oleh Sub Ranting Sofifi dan Sub Ranting Payahe (BAPPEDA, 2014: 23).

Prasarana yang sangat penting harus ada dalam konteks pembangunan kepariwisataan adalah perbankan. Keberadaan bank dan fasilitas layanannya seperti anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan fasilitas penting dalam sistem pembangunan kepariwisataan di daerah. Berdasarkan amatan penulis, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 3 (tiga) bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Danamon. Ketiga bank tersebut melayani kebutuhan penyimpanan dan transaksi keuangan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Kota Tidore Kepulauan, bank BRI selain memiliki kantor cabang Soasio yang berada di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore. Bank BRI membangun beberapa unit di Kota Tidore Kepulauan, yaitu BRI Unit Tidore Utara di Kelurahan Rum

Balibunga, BRI Unit Tidore Selatan di Kelurahan Tomolou, BRI Unit Tidore di Kelurahan Indonesiana (kompleks pasar Sarimalaha), dan BRI Unit Sofifi yang berada di pusat Kota Sofifi. Sedangkan BNI, selain mempunyai kantor cabang Soasio yang berada di Kelurahan Indoneisana (pusat Kota Tidore), BNI mempunyai unit pelayanan di Kota Sofifi. Sedangkan Bank Danamon hanya memiliki kantor cabang di pusat Kota Tidore Kepulauan.

Selain kaontor cabang dan unit, BRI dan BNI telah menyediakan beberapa unit ATM sebagai fasilitas pelayanan transaksi keunagan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Unit-unit ATM yang disediakan oleh BRI dan BNI tersebut berada pada lokasi sebagai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Keberadaan Mesin ATM Bank di Kota Tidore Kepulauan

No.	Keberadaan ATM	Lokasi	Jumlah Unit	Bank
1.	Pelabuhan dan Terminal Rum	Kel. Rum Balibunga	1	BRI
2.	Toko Serba Ada Mareku	Kel. Mareku	1	BRI
3.	Kantor Unit BRI Tidore Selatan	Kel. Tomolou	1	BRI
4.	Kantor Cabang BRI Soasio	Kel. Gamtufkange	3	BRI
5.	Kantor Walikoat Tidore Kepulauan	Kel. Tuguwaji	1	BRI
6.	Rumah Sakit Daerah	Kel. Tuguwaji	1	BRI
7.	Kantor Cabang BNI Soasio	Kel. Indonesiana	2	BNI
8.	Minimarket Cantik	Kel. Indonesiana	1	BRI
9.	Kantor Unit BRI Pasar Sarimalah	Kel. Indonesiana	1	BRI
10.	Kantor Unit BRI Sofifi	Desa Balbar	1	BRI
11.	Kantor Unit BNI Sofifi	Kel. Sofifi	2	BRI
12.	Pasar Galal dan Pelabuhan Feery Sofifi	Desa Galal	3	BRI, BNI
13.	Kantor Gubernur Maluku Utara	Kel. Guraping	1	BRI

Sumber: Data diolah oleh penulis bersumber dari Bank BRI dan BNI (2015)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah mesin ATM bank sebagai fasilitas transaksi keuangan di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 15 (lima belas) unit. Dari kelima belas unit mesin ATM tersebut, 5 (lima) unit berada di Kota Sofifi dan 10 (sepuluh) unit berada di Kota Tidore. Data tersebut juga menunjukkan bahwa fasilitas ATM tersebut didominasi oleh ATM dari bank BRI dengan jumlah ATM sebanyak 12 unit, dan

sisanya adalah ATM bank BNI yaitu 3 unit. Dengan fasilitas ATM-ATM tersebut dapat memudahkan para wisatawan dapat melakukan transaksi keuangan di Kota Tidore Kepulauan, pada saat berwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Salah satu prasarana pariwisata sebagai fasilitas untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan pada saat berada pada suatu destinasi wisata adalah pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan merupakan salah satu fasilitas yang harus tersedia dalam konsep kepariwisataan. Melalui fasilitas ini lah para wisatawan membelanjakan kebutuhannya selama berada di destinasi wisata tersebut, dan juga sebagai tempat untuk membelanja souvenir atau cendera mata khas daerah destinasi wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil amatan penulis, Kota Tidore Kepulauan belum memiliki pusat perbelanjaan. Tempat perbelanjaan yang ada di Kota Tidore Kepulauan baru berupa pasar biasa. Hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Sam sebagai berikut.

“....untuk pasar sualayan, saya pikir di Kota Tidore Kepulauan ini belum ada. Yang ada di sini ya cuma seperti toko serba ada atau Toserba atau mungkin seperti minimarket, seperti Minimarket Cantik di Jalan Taman Sisiwa itu, kemudian satu di Kota Sofifi, di Desa Bukit Durian, ya cuma setingkat minimarket itu. Kalau yang besar-besar seperti Mall atau setingkat itu belum ada di sini.... sebenarnya kami mempunyai obsesi untuk berusaha membangun pusat perbelanjaan di daerah ini, tetapi belum ada investor yang mau berinvestasi untuk itu.... sebenarnya untuk pembangunan pariwisata, fasilitas seperti pasar sualayan atau seperti mall itu harus ada. Karena kita lihat sekarang ini, kalau orang berwisata itu pasti berkaitan dengan berbelanja, terutama belanja oleh-oleh atau cenderamata. Kalau tidak ada fasilitas itu kan orang mau belanja apa dan dimana. Itu sebenarnya harus dipikirkan oleh Pemda secara bersama-sama....” (Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2015).

Lebih lanjut Bapak Sam menjelaskan bahwa.

“....walau begitu, tetapi menurut saya, pasar Sarimalah yang telah dibongkar dan dibangun ulang oleh Pemda di sana itu merupakan fasilitas pemasaran yang cukup baik. Pasar tersebut mendapat penghargaan dari Pemda Provinsi (Maluku Utara) sebagai pasar terbaik di Maluku Utara.... tetapi berkaitan dengan pariwisata ya kita tetap berusaha untuk mendatangkan investor yang mau berinvestasi membangun pasar sualayan di Kota ini....” (Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas memberikan gambaran bahwa di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat fasilitas pendukung pariwisata berupa pusat perbelanjaan yang memadai. Namun demikian, pemerintah daerah telah membenahi infrastruktur pemasaran berupa pembangunan kembali Pasa Sarimalaha sebagai pusat pemasaran di Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan data yang telah disajikan di depan tergambar bahwa Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom, dengan usia yang relatif muda (berusia 12 tahun pada 2015), telah berusaha untuk membangun dan menyediakan berbagai fasilitas umum dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun demikian, berdasarkan Dokumen Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, menyebutkan bahwa “Secara umum sarana dan prasarana umum daerah di Tidore Kepulauan masih sangat minim”.



Gambar 5.31 Pasar dan Pusat Perbelanjaan di Kota Tidore Kepulauan
Sumber: Foto Penulis, 2015

Lebih lanjut, dokumen Perda RTRW menyebutkan bahwa “Dalam sisi perekonomian, Usaha untuk menjadikan perekonomian daerah yang berdaya saing belum ada. Sehingga kurang menarik investor, perbankan dan lembaga keuangan.” Sedangkan dalam sisi parsaran umum “Prasarana jalan masih membutuhkan perbaikan dan penambahan panjang jalan sehingga dapat

menjangkau seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan; Prasarana Telekomunikasi masih memerlukan pembenahan dan penambahan layanan; Prasarana listrik masih kurang memadai terutama untuk wilayah yang berada di bagian Pulau Halmahera dan pulau – pulau kecil di Wilayah Kota Tidore Kepulauan; Prasarana air bersih masih sangat kurang. Hingga saat ini jaringan air bersih baru menjangkau sebagian daerah Pulau Tidore.

Berdasarkan data yang tersaji di depan maka tergambar bahwa, Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya. Penyediaan berbagai fasilitas umum tersebut dalam upaya untuk membangun seluruh sektor dan bidang pembangunan di daerah, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim.

5.5 Kelembagaan Pengembangan Destinasi Wisata

Pembangunan negara dalam pelaksanaannya merupakan sebuah praktek sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artian bahwa, pembangunan merupakan instrumen yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam upaya untuk mencapai tujuan negara. Namun demikian, dalam konsep negara moderen pelaksanaan pembangunan terdapat juga domain masyarakat dan sektor bisnis (*private sector*).

Konsep yang bersifat umum menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan (mulai dari perencanaan hingga evaluasi), utamanya pembangunan daerah harus melibatkan *local goverment*, *private sector*, dan *NGOs* ataupun masyarakat secara individu. Artinya dalam proses pelaksanaan pembangunan, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi

diperlukan dukungan dan partisipasi swasta dan masyarakat, baik secara individual maupun secara institusional.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) sangat diperlukan. Untuk itu, dalam konsep pembangunan kepariwisataan, salah satu komponen yang harus dikaji dan dibahas adalah kelembagaan pengembangan atau pembangunan destinasi pariwisata. Proses ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja stakeholders yang memiliki perhatian dan tanggung jawab dalam pembangunan pariwisata di suatu destinasi pariwisata.

Secara konseptual, Kementerian Koperasi dan UKM RI (2016: 39), memetakan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata sebagai berikut:

1. Pemerintah, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: BAPPENAS, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM daerah. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Kementerian terkait dan Dinas terkait serta kantor dan lembaga terkait.
2. Swasta, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: Tour Operator, Bisnis unggulan, Bisnis pariwisata, dan Asosiasi Pengusaha Pariwisata. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Media dan Asosiasi Transpotrasi.
3. Masyarakat lokal, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: Lembaga pendidikan, Sekolah Pariwisata, *Destination Management*

Organization (DMO), Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan adat. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Sosial media, LSM, dan Lembaga donor.

Namun demikian, untuk membahas sub fokus dari studi ini yaitu “Kelembagaan pengembangan destinasi wisata”, penulis akan mengidentifikasi siap saja stakeholders yang memiliki perhatian dan tanggung jawab dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk melakukan penyajian data berkaitan dengan masalah tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil olahan data tentang stakeholder yang mempunyai perhatian dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

5.5.1 Pemerintah Daerah

Secara umum, pemerintah mempunyai peran yang signifikan dan strategis dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, utamanya pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, maka pemerintah daerah (*local government*) mempunyai kewenangan dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Dalam case Indoneisa, pemerintah daerah (*local government*) diberikan ruang oleh berbagai regulasi untuk melaksanakan pembangunan di daerah, termasuk perencanaan pembangunan.

Paraktek perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pelaku utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum kewilayahan, sedangkan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dilakukan oleh instansi atau oragnisasi perangkat daerah masing-masing sesuai bidang tugas. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tao sebagai berikut.

“....Secara umum, perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh BAPPEDA, itu berdasarkan aturan. Tetapi, BAPPEDA dalam pelaksanaan perencanaan tidak berjalan sendiri. Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi daerah.... BAPPEDA hanya melakukan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum, yang kemudian hasilnya dalam bentuk Perda RTRW, Perda RPJP daerah, RPJMD serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).... untuk perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dilakukan oleh setiap instansi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.... seperti perencanaan pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk melakukan perencanaan di bidang pariwisata ya, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tao di atas, Bapak Aim menjelaskan bahwa.

“....dalam konteks perencanaan umum pembangunan daerah dilakukan oleh BAPPEDA, dan itu merupakan tupoksinya mereka (BAPPEDA). Tetapi perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral itu selalu dilakukan oleh setiap SKPD. Oleh karena itu, untuk perencanaan pembangunan pariwisata maka kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melakukan itu. Dan hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Urusan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Penjelasan Bapak Aim tersebut di atas merujuk pada Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dalam Peraturan Walikota tersebut menyebutkan bahwa.

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah (Pasal 3); Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kebudayaan dan pariwisata (Pasal 4); Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungan tugasnya (Pasal 5.a); pembinaan, pengembangan serta pengawasan dibidang kebudayaan dan pariwisata (Pasal 5.c)”.

Melalui penjelasan informen dan Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan tersebut tergambar bahwa: pertama, perencanaan pembangunan yang bersifat umum dalam bentuk RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh BAPPEDA berkoordinasi dengan seluruh instansi organisasi perangkat

daerah. Kedua, untuk perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas setiap instansi tersebut. Ketiga, pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang bersifat sektoral, sehingga yang melakukan perencanaan pembangunan pariwisata dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Terkait dengan lembaga atau instansi pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang terlibat dan berperan dalam perencanaan pembangunan pariwisata, khususnya penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Tim Eksekutif Pemda Kota Tidore Kepulauan Dalam Penyusunan Naska Akademik Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030

No.	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Walikota Tidore Kepulauan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Tidore Kepulauan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Asisten Sekda Bidang Tata Pemerintahan	Wakil Koordinator
5.	Kepala Bidang Hukum dan HAM	Ketua
6.	Kasubag Perundang Undangan dan HAM	Sekretaris
7.	Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Inspektur Inspektorat	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	Anggota
13.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
15.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
17.	Kepala BPKAD	Anggota
18.	Kasubak Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum	Anggota
19.	Sekretaris Bappeda	Anggota
20.	Sekretaris Dispendap	Anggota
21.	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (2015)

Merujuk pada data yang tersaji pada tabel tersebut di atas terbaca bahwa, terdapat 20 (dua puluh) instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030. Namun demikian, jika merujuk pada konsep pembangunan kepariwisataan, maka terdapat beberapa aspek kepentingan yang seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata tidak dilibatkan.

Secara konseptual, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, merupakan salah satu instansi daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk ikutserta dalam pembangunan pariwisata di daerah. Melalui instansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM daerah, pembangunan dan manajemen industri dan perdagangan daerah dibangun dan dikembangkan.

Dalam konteks kepariwisataan keberadaan dan kehadiran sarana dan prasarana pariwisata merupakan bagian terpenting dalam pembangunan industri kepariwisataan. Terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari instansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, utamanya sarana pariwisata. Dengan demikian, keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam proses pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan merupakan suatu keharusan.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, Keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam proses pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut sangat penting. Keterlibatan instansi tersebut berkaitan dengan manajemen pengembangan industri dan

perdagangan di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dab sebagai berikut.

“....menyangkut dengan pengembangan usaha industri dan perdagangan, baik yang skala kecil, menengah dan besar, serta pengembangan usaha koperasi merupakan tanggungjawab kami (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan). Tanggungjawab kami tersebut dalam upaya memberdayakan dan memajukan berbagai kegiatan industri dan perdagangan agar lebih baik, dan hal itu merupakan Tupoksi kami.... terus menyangkut dengan pengembangan pariwisata di daerah ini, yang saya pahami adalah dalam upaya pembangunan pariwisata tersebut terdapat berbagai kegiatan yang melibatkan kegiatan industri dan perdagangan. Misalnya, ketika orang berwisata ke Tidore pasti memerlukan hotel untuk menginap atau rumah makan untuk makan dan sebagainya. Nah, untuk menyediakan sarana-saran tersebutkan menjadi urusan kami, bukan urusan Dinas Pariwisata....” (Wawancara, 11 November 2015).

Penjelasan informen tersebut tergambar bahwa, seluruh urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha industri dan perdagangan, baik yang skala kecil, menengah dan besar, serta pengembangan usaha koperasi merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.

Salah satu sektor penting dalam pembangunan pariwisata daerah adalah sektor perhubungan. Organisasi perangkat daerah yang mempunyai peran penting dan vital pada sektor tersebut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di tingkat daerah. Eksistensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai institusi yang bertanggungjawab atas kelancaran lalulintas arus barang, jasa dan manusia. Industri pariwisata daerah sangat membutuhkan fasilitas transportasi dan komunikasi sebagai media untuk mobilisasi dan aktifitas lalulintas barang, jasa dan manusia.

Kota Tidore Kepulauan yang secara konseptual telah mengopsesikan dirinya menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata di Provinsi Maluku Utara, dan bahkan kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, jaringan transportasi

untuk memudahkan akses wisatawan untuk mencapai objek wisata merupakan suatu kebutuhan infrastruktur daerah yang harus dipenuhi oleh daerah. Untuk membangun jaringan transportasi dan aksesibilitas tersebut merupakan ruang tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Kota Tidore Kepulauan yang secara konseptual telah mengopsesikan dirinya menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata di Provinsi Maluku Utara, dan bahkan kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, jaringan transportasi untuk memudahkan akses wisatawan untuk mencapai objek wisata merupakan suatu kebutuhan infrastruktur daerah yang harus dipenuhi oleh daerah. Untuk membangun jaringan transportasi dan aksesibilitas tersebut merupakan ruang tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan. Ruang kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Merujuk pada tugas pokok dan kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan tersebut di atas maka, eksistensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan dalam proses pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut sangat diperlukan. Pentingnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam proses pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rak sebagai berikut.

“....iya, berkaitan dengan masalah pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah ini merupakan kewenangan kami.... untuk pembangunan pariwisata di daerah ini merupakan kewenangannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi bicara berkaitan dengan perhubungan, transportasi dan informasi itu bukan kewenangannya mereka (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), itu tugas kami....” (Wawancara, 7 Oktober 2015).

Selain dinas-dinas terkait yang harus dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut. Sebaiknya instansi daerah seperti kecamatan dan kelurahan harus dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tao sebagai berikut.

“....Dalam proses pembangunan daerah, semua pihak yang dianggap terkait dengan sektor tersebut harus dilibatkan, baik dinas-dinas, maupun instansi-instansi lainnya.... misalnya yang saat ini kita bicarakan tentang pembangunan pariwisata. Maka semua dinas, instansi, dan kantor yang dianggap bersentuhan dengan pariwisata ya harus dilibatkan, tidak bisa tidak.... iyah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Karena tempat-tempat wisata tersebut ada di wilayah mereka....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Penjelasan informen tersebut di atas tergambar bahwa, selain dinas-dinas, pihak kecamatan dan kelurahan dimana tempat objek wisata berada harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Terkait dengan keberadaan Kantor Kecamatan dalam proses pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, Bapak Amu menjelaskan bahwa.

“....di wilayah kecamatan Tidore Utara ini terdapat beberapa objek wisata, yang menurut saya cukup potensial. Misanya, Pantai Rum yang di depan itu, kemudian Benteng Ts Tjobbe di Kelurahan Rum Balibunga, termasuk Tugu Pendaratan Spanyol, dan Pantai Tahua dan beberapa lainnya.... kami pihak kecamatan merasa bertanggungjawab terhadap berbagai situs sejarah yang berada di wilayah kecamatan ini, termasuk beberapa objek wisata yang saya sebutkan tadi. Karena menurut saya, situs sejarah dan objek wisata tersebut merupakan aset daerah. Oleh karena itu, saya selalu mendorong pihak kelurahan yang wilayahnya terdapat situs sejarah dan objek wisata untuk menjaga dan memeliharanya....” (Wawancara, 18 Oktober 2015).

Berkaitan dengan keterlibatan Kantor Kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Senada dengan Bapak Amu di atas, Bapak Hab menjelaskan bahwa.

“....Berbicara tentang pembangunan potensi pariwisata daerah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore, dalam amatan saya pribadi, hampir tidak ada perkembangan samasekali. Buktinya, objek-objek wisata di Kota Tidore tidak pernah berubah-ubah,

tetap seperti itu.... saya tidak usah bicara di tempat lain, di wilayah kecamatan yang saya pimpin ini, mulai dari (Desa) Kaiyasa sampai (Desa) Kusu di atas, terdapat banyak potensi pariwisata. Tetapi sampai dunia tani (saat) ini, objek wisata di wilayah ini tidak disentuh oleh Dinas Pariwisata.... objek-objek wisata tersebut mempunyai nilai ekonomi bila dikelola secara baik. Untuk itu, harapan saya, Dinas Pariwisata harus serius urus potensi pariwisata di daerah ini, termasuk yang ada di daerah Sofifi ini....” (Wawancara, 30 September 2015).

Menyimak apa yang disampaikan oleh informen di atas tergambar bahwa, pihak kecamatan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap objek wisata yang ada di wilayahnya. Rasa memiliki dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan dan perhatian mereka untuk pengembangan objek wisata untuk pembangunan ekonomi daerah.

Merujuk pada penjelasan Bapak Tao di depan, yang menjelaskan bahwa Kantor Kelurahan juga mempunyai andil dalam proses pembangunan di daerah. Untuk melihat bagaimana peran kelurahan dalam proses pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Berikut beberapa informen menjelaskan tentang proses tersebut. Menurut Bapak Ris bahwa.

“....di Kelurahan Soa Sio ini terdapat banyak sekali objek wisata, terutama objek wisata sejarah. Di sini (Kelurahan Soa Sio) ada Kadaton Keslutan, terus Masjid Kesultanan, Dermaga Kesultanan, Musium, Benteng Tahula, Benteng Torre, terus Makam Para Sultan-sultan.... saya secara pribadi dan kami pihak kelurahan selalu menjaga berabagai warisan sejarah tersebut. Kami menjaga kemanannya, agar terlindungi dan tidak rusak....” (Wawancara, 26 November 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ris tersebut di atas. Bapak San menjelaskan tentang peran pihak kelurahan dalam pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....untuk pengembangan beberapa objek wisata di kelurahan ini, memang beberapa kali kami usulkan di Musrembang Kelurahan. Misalnya kami usulkan pemeliharaan Benteng Ts Tjobe dan Tugu Pendaratan Juan Sebastian De Elcano.... saya secara pribadi mempunyai pemikiran untuk mengembangkan lokasi Tugu Pendaratan. Lokasi tersebut dibuat seperti anjungan begitu. Karena lokasi tersebut cukup bagus pemandangannya....” (Wawancara, 10 Desember 2015).”

Menyimak penjelasan informen di atas maka dapat dijelaskan bahwa, pada kelurahan-kelurahan yang di dalam wilayahnya terdapat objek wisata mempunyai perhatian dan memiliki terhadap objek wisata di wilayahnya. Tidak hanya itu, pihak kelurahan mempunyai kemauan untuk membangun dan mengembangkan objek wisata yang ada di wilayah kelurahannya. Relaitas tersebut menunjukan bahwa kelurahan secara kelembagaan mempunyai harapan untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakatnya.

Merujuk pada data yang tersaji di depan, tergambar bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perumusan kebijakan daerah tentang perencanaan pembangunan pariwisata di daerah tersebut tidak melibat beberapa pihak yang secara konseptual harus dilibatkan dalam proses tersebut. Sebagaimana dipahami, secara konseptual, pihak-pihak yang harusnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan, dalam internal pemerintahan diantaranya adalah organinasi perangkat daerah yang terkait dengan kepariwisataan. Diantara, organinasi perangkat daerah yang harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan adalah Dinas Perindustriaan, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan.

Namun demikian, berdasarkan data yang tersaji di depan, terbaca berbagai stakeholders internal pemerintahan tersebut tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan. Terkait dengan ketidak ikutsertaan berbagai stakeholders internal pemerintahan daerah dalam proses tersebut dijelaskan oleh Bapak Dab sebagai berikut:

“....sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa urusan pariwisata itu tidak hanya ruang tanggung jawab salah satu dinas saja. Banyak pihak yang terlibat di situ, termasuk Dinas kami.... Kami yang tidak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh

Dinas Pariwisata. Menurut saya ini merupakan mis-presepsi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan BAPPEDA. Mungkin BAPPEDA dan Dinas Pariwisata memahami bahwa urusan pariwisata hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata....” (Wawancara, 11 November 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas dapat dijelaskan bahwa, menurut Bapak Dab, ketidak terlibatan beberapa stakeholders penting dalam bidang kepariwisataan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Mungkin disebabkan terjadi kurang kesepahaman antara organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Artinya terjadi kurang koordinasi antara organisasi perangkat daerah, sehingga terjadi kesalahpahaman antara masing-masing organisasi perangkat daerah. Terjadi ego sektoral yang antara masing-masing organisasi perangkat daerah.

Penjelasan Bapak Dab tersebut di atas, berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Fas. Menurut bapak Fas, “pembentukan Tim Eksekutif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pembangunan pariwisata Kota Tidore Kepulauan berdasarkan arahan pimpinan”. (Wawancara, 11 November 2015).

Penjelasan informen tersebut terbaca bahwa, pihak-pihak (Tim Eksekutif, sebagaimana terdapat pada tabel 5.5) yang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata Kota Tidore Kepulauan atas arahan pimpinan daerah. Artinya, ketidak terlibatan beberapa stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan pariwisata bukan merupakan suatu mis-presepsi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan BAPPEDA sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dab, tetapi merupakan arahan pimpinan daerah.

Namun demikian, dalam konteks perencanaan daerah, BAPPEDA sebagai lembaga daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan

perencanaan daerah, idealnya mampu mengarahkan dan mengkoordinasi berbagai organisasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Baik perencanaan pembangunan yang bersifat umum strategis, maupun perencanaan yang bersifat sektoral.

Merujuk pada berbagai data di depan maka dapat gambarkan bahwa: pertama, pada tingkat pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terdapat banyak stakeholder kelembagaan yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut.

Kedua, terdapat beberapa instansi dan kantor yang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, tetapi mempunyai rasa tanggung jawab dan perhatian serta mempunyai harapan dan kemauan untuk membangun pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

5.5.2 Sektor Swasta dan Pelaku Usaha

Pengusaha daerah merupakan salah satu stakeholder pembangunan di daerah. Eksistensi dan keterlibatan pengusaha atau sektor bisnis (*private sector*) dalam pembangunan, utamanya pembangunan daerah sangat penting. *Private secktor* merupakan salah satu mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, baik program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Keterlibatan *private sector* dalam pelaksanan pembangunan, utamanya pembanguan daerah, idealnya tidak hanya pada saat implementasi program yang telah direncanan. Tetapi keterlibatan *private sector* dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan harus mulai dari awal, yaitu perencanaan. Harapan tersebut agar pengusaha daerah tidak hanya bertanggungjawan terhadap proses pelaksanaan membangunnya, tetapi pengusaha daerah turut mengawasi dan

memelihara apa yang dihasilkan dari pembangunan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015), terdapat berbagai badan usaha swasta yang mengembangkan usaha di Kota Tidore Kepulauan. Data tentang badan usaha swasta di Kota Tidore Kepulauan, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Jumlah Badan Usaha di Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Izin Yang Dikeluarkan Tahun 2010-2014

Tahun	Bentuk Usaha			
	PT	CV	KOP	UP dan IR
2010	6	18	5	197
2011	11	29	9	211
2012	3	48	4	263
2013	6	18	2	227
2014	12	21	4	180
Jumlah	38	134	24	1078

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015)

Merujuk pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa, secara kuantitatif jumlah Perseroan Terbatas (PT) di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan izin yang dikeluarkan, mulai tahun 2010-2014 berjumlah 38 badan usaha, CV berjumlah 134 badan usaha, Koperasi berjumlah 24 badan usaha, dan Usaha Perorangan (UP) dan Industri Rumahan (IR) berjumlah 1078 usaha. Berdasarkan data yang sama, pertumbuhan badan usaha pada masing-masing jenis atau bentuk usaha bersifat fluktuatif setiap tahunnya.

Berkaitan dengan studi ini, dimana perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah, harusnya melibatkan para pengusaha daerah yang berkaitan dengan industri pariwisata. Diikutsertakannya pengusaha daerah yang berkaitan dengan industri pariwisata tersebut dalam kerangka untuk mendorong perkembangan dan kemajuan industri pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk mengetahui seperti apa keterlibatan pengusaha daerah yang berkaitan

dengan industri pariwisata, seperti perhotelan dan penginapan, restoran dan rumah makan, pengusaha pengrajin, dan pedagang dalam pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan disajikan data-data sebagai berikut.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah hotel di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1 (satu) buah, yang berada di Desa Gusale (Sofifi). Sedangkan penginapan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 5 (lima) buah, masing 2 (dua) berada di Kota Tidore dan 3 (tiga) berada di Sofifi.

Keberadaan pengusaha daerah yang bergerak pada bidang akomodasi, seperti perhotelan dan penginapan dalam proses pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan dijelaskan oleh Bapak Dun sebagai berikut.

“....memang, kalau kita berbicara tentang pembangunan kepariwisataan maka salah satu hal penting adalah kebutuhan akan fasilitas akomodasi seperti hotel dan penginapan. Karena hotel dan penginapan merupakan kebutuhan bagi orang-orang yang berwisata.... saya melihat kenapa pariwisata Kota Tidore terkesan berjalan di tempat, karena di daerah ini hampir belum ada hotel-hotel berbintang. Karena saya melihat belum adanya hotel di daerah ini sehingga saya mencoba membangun Bolote Hotel ini....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Lebih lanjut Bapak Dun menjelaskan bahwa.

“....harapan saya, pemerintah daerah harus serius mengurus dan mengembangkan pariwisata di daerah ini. Karena menurut saya, Kota Tidore ini mempunyai kekayaan pariwisata yang cukup banyak. Mulai dari yang ada di Tidore di sana samapi di daratan Oba (kecamatan-kecamatan yang berada di Pulau Halmahera) ini. Dan objek wisatanya cukup indah....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Menyimak penjelasan informan di atas tergambar bahwa, pengusaha hotel cukup memberikan perhatian terhadap perkembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, pengusaha hotel mengharapkan agar pemerintah daerah mempunyai perhatian lebih untuk mengembangkan potensi pariwisata di

daerah tersebut. Karena para pengusaha hotel di Kota Tidore Kepulauan menilai di daerah tersebut mempunyai potensi pariwisata yang cukup banyak.

Selain ketersediaan hotel sebagai fasilitas pendukung kepariwistaan, keberadaan restoran merupakan fasilitas yang penting pada suatu destinasi pariwisata. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015); dan BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah usaha restoran di Kota Tidore Kepulauan baruh 1 (satu) buah. Sedangkan usaha rumah makan sebanyak 14 (empat belas) buah.

Dalam konsep pembangunan pariwisata, selain fasilitas pendukung seperti hotel dan penginapan, serta restoran dan rumah makan, diperlukan juga fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang harus disediakan di daerah destinasi pariwisata. Transportasi merupakan media yang digunakan oleh para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata. Terkait dengan fasilitas transportasi, berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah kendaraan umum di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) unit. Kendaraan umum yang ada di Kota Tidore Kepulauan tersebut merupakan usaha milik perorangan. Para pengusaha kendaraan umum di Kota Tidore Kepulauan, dalam amatan penulis tergabung dalam asosiasi Organda Kota Tidore Kepulauan.

Selain kendaraan umum, amatan penulis, terdapat kendaraan pribadi yang berpalt hitam digunakan oleh masyarakat sebagai taksi atau kendaraan sewaan untuk melayani masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Kendaraan sewaan tersebut biasanya berpangkalan di sekitar terminal pelabuhan Rum Tidore Utara, terminal Pasar Sarimalah di Pusata Kota, pelabuhan Gota, pelabuhan Sofifi Oba Utara, dan pelabuhan penyeberangan feery Sofifi Oba Utara.

Selain fasilitas transportasi darat, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah kepulauan, maka transportasi laut merupakan fasilitas penting di daerah tersebut. Untuk transportasi laut, amatan penulis, meunjukkan bahwa terdapat badan usaha koperasi yang memayungi para pengusaha speedboat yang berada di Kota Tidore Kepulauan. Koperasi dimaksud adalah “Koperasi Sadar” yang berkantor di Kelurahan Rum. Dalam aktifitasnya, Koperasi Sadar melakukan penjualan tiket speedboat dari Tidore ke Ternate.

Selain berbagai pihak swasta dengan badan usahanya yang mempunyai peran penting dalam pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana di sebutkan dan dijelaskan di depan. Pada sisi yang lain, berdasarkan amatan penulis, terdapat beberapa industri rumahan (*home industry*) yang bergerak di bidang kerajinan mempunyai peran penting dalam pengembangan industri pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. *Home industry* kerajinan tersebut diantaranya adalah pengrajin “Kalaodi Marasai” di Kelurahan Kalaodi Tidore Timur, dan pengrajin “Togona Mandiri” di Kelurahan Cobodoe Tidore Timur.

Produk dari para pengrajin tersebut berupa miniatur peralatan pertanian khas masyarakat Tidore. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nab sebagaiberikut.

“....pada hal hasil dari torang (kami) punya kelompok ini, seperti sovenir *saloi* kecil (miniatur alat yang digunakan oleh petani atau masyarakat Tidore untuk membawa hasil pertanian, yang biasa didendong di punggung), deng (dengan) koropo melinjo (krepek melinjo) selalu di dibeli oleh Dinas Koperasi....” (Wawancara, 7 Desember 2015).

Selain itu, para pengrajin juga menghasilkan karya seni hiasan rumah berupa bunga yang sangat indah dan mempunyai nilai seni yang cuku bagus. Hasl tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rin sebagai berikut.

“....torang pe kelompok ini (kelompok kami ini) biking bunga dengan karaya-karaya lainnya.... torang pe klemompok (kelompok kami) mendapat bantuan dari Dinas Koperasi satu lemari kaca untuk taru torang pe (kami punya) bunga-bunga yang so jadi (bunga-bunga yang suda jadi)....” (Wawancara, 7 Desember 2015).”



Gambar 5.32 Hasil Karaya Seni Para Pengrajin *Home Industry* Kota Tidore Kepulauan
Sumber: Foto Penulis, 2015

Amatan penulis, produk dari *home industry* yang dihasil berupa miniatur peralatan pertanian dan perabot rumah tangga tradisional masyarakat Tidore, serta perhiasan rumah seperti bunga mempunyai nilai senih yang tinggi. Selin itu, bahan baku yang digunakan oleh *home industry* ini adalah bambu dan kayu yang mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Dari sisi keramahan terhadap lingkungan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Terkait dengan usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata, salah satu sektor usaha yang sangat penting adalah usaha perdagangan. Pengusaha yang bergerak pada sektor jasa perdagangan merupakan bagian terpenting dari industri pariwisata. Pada sektor jasa perdagangan inilah kebutuhan konsumtif wisatawan dipenuhi. Dengan demikian, eksistensi jasa perdagangan dalam industri pariwisata sangat fital.

Berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), jumlah pedagang di daerah tersebut berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) pedagang. Jumlah

tersebut, diklasifikasi berdasarkan ukurannya terdiri dari pedagang besar 2 (dua) pedagang, sedang 13 (tiga belas) pedagang, dan kecil 235 (dua ratus tiga puluh lima) pedagang. Dari sisi sebarannya, para usaha perdagangan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tidore Kepulauan.

Pada sisi yang, dengan merujuk pada data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (2015) di depan menunjukkan bahwa badan usaha swasta yang mengembangkan usaha di daerah tersebut secara kuantitatif relatif banyak. Namun demikian, dalam catatan penulis belum ada lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata memberikan perhatian terhadap pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Realitas tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Ara sebagai berikut.

“....untuk perhatian lembaga swasta terhadap pembangunan pariwisata di daerah, menurut saya boleh dikata hampir tidak ada. Karena selama ini saya tidak pernah melihat atau mendengar ada pengusaha swasta yang melakukan kegiatan yang bernuansa pariwisata di daerah ini.... memang di sisi pernah beberapa kali diadakan *even* olahraga seperti balap motor. Tetapi itu inisiatif dan dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan dilakukan oleh pihak swasta....” (Wawancara, 6 September 2015).

Menyimak penjelasan informan di atas maka dapat dipahami bahwa, perhatian lembaga swasta dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore belum ada. Daerah pernah melakukan *even* olahraga yang bersifat hiburan dan dapat menarik orang berkunjung di Kota Tidore Kepulauan seperti *even* olahraga balap motor, tetapi *even* tersebut diadakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang tersaji di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, secara kuantitas terdapat beberapa lembaga atau badan usaha swasta yang berusaha di Kota Tidore Kepulauan. Kedua, dalam konteks industri

pariwisata terdapat beberapa jenis usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Lemabag atau badan usaha tersebut meliputi, usaha akomodasi (hotel dan penginapan), restoran dan rumah makan, asosiasi tarnsportasi (darat dan laut), usara pengrajan atau industri rumahan (*home industry*), dan usaha perdagangan. Namun demikian, belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata.

5.5.3 Masyarakat Daerah

Dalam pembangunan kepariwisataan, masyarakat diharapkan aktif dan bertindak sebagai pengelola, karena diperlukan kegiatan yang bersifat tetap dan berkesinambungan (Kementrian Koperasi dan UKM RI, 2016: 39). Masyarakat, baik kelembagaan maupun individu merupakan salah satu komponen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata. Secara konseptual, para *stakeholders* masyarakat yang harus terlibat dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata di daerah adalah lembaga pendidikan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan adat, Sosial media atau media masa, LSM, dan Lembaga donor.

Untuk kepentingan penelitian ini, dan berdasarkan data yang terhimpun, penulis mengidentifikasi terdapat lembaga sosial dan kemasyarakatan di Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Berikut adalah penyajian data yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan daerah. Karena, salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah adalah kemajuan lembaga pendidikan. Berdasarkan data BPS (2015) jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Tidore Kepulauan adalah

sebanyak 77 sekolah yang terdiri dari 22 TK negeri dan 55 TK swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 102 yang terdiri dari 101 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 39 sekolah yang terdiri dari 28 sekolah negeri dan 11 sekolah swasta. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tidore Kepulauan berjumlah 20 sekolah yang terdiri dari 12 SMA negeri dan 8 SMA swasta, sedangkan jumlah SMK di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 7 sekolah yang terdiri dari 5 SMK negeri dan 2 SMK swasta. Jumlah Madrasah Ibtidayah 12 sekolah yang terdiri dari 6 sekolah negeri dan 6 swasta, Madrasah Tsanawiyah 11 sekolah yang terdiri dari 3 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta, sedangkan Madrasah Aliyah sebanyak 6 sekolah yang terdiri dari 1 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta.

Jenjang pendidikan tinggi, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 perguruan tinggi yaitu Universitas Nuku, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Tidore Mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), dan Universitas Bumi Hijrah (BPS, 2014). Keempat perguruan tinggi tersebut semuanya adalah perguruan tinggi swasta. Dalam sisi usia, keempat perguruan tinggi tersebut masih sangat muda. Universitas Nuku dan STIMIK Tidore Mandiri berdiri pada tahun 2001, dan STIKES berdiri pada tahun 2005, dan Universitas Bumi Hijrah berdiri pada tahun 2012. Dengan usia yang relatif muda tersebut, membuat keempat institusi perguruan tinggi tersebut masih memiliki keterbatasan, baik fasilitas infrastruktur maupun sumber daya manusianya.

Eksistensi dan kemajuan lembaga pendidikan di daerah tidak hanya sebagai indikator kemajuan daerah. Pada sisi yang lain, kehadiran dan keikutsertaan dalam proses pembangunan dan memajukan daerah merupakan bagian dari tanggungjawab lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan

diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yan sebagai berikut.

“....dalam pemahaman saya itu seperti begini, membangun pendidikan itu adalah bagian dari membangun daerah. Dan membangun daerah berarti kita juga harus membangun pendidikan. Artinya, membangun daerah dan membangun pendidikan itu sama dengan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memajukan pendidikan, dan pada sisi yang lain, peran lembaga pendidikan dalam pembangunan sangat penting dan strategis. Artinya, lembaga pendidikan juga mempunyai tanggungjawab untuk menyukseskan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah....” (Wawancara, 25 November 2015).

Namun demikian, berdasarkan amatan penulis dan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta dokumen daerah lainnya, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat lembaga pendidikan yang secara khusus membangun dan menyiapkan sumberdaya manusia daerah tentang kepariwisataan. Realitas tersebut merupakan salah satu kelemahan pembangunan sumberdaya manusia daerah pada sektor pariwisata. Realitas tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yan sebagai berikut.

“....dalam usaha pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di daerah ini, salah satu kelemahan kita adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang profesional dalam bidang pariwisata. Lemahnya sumberdaya manusia kita di bidang pariwisata tersebut, salah satu faktornya adalah di daerah ini belum ada lembaga pendidikan yang secara khusus membuka jurusan yang berkaitan dengan pariwisata, baik pada tingkat lanjutan atas seperti SMK, maupun perguruan tinggi....” (Wawancara, 25 November 2015).

Selain lembaga pendidikan, organisasi non pemerintah (*Non Government Organization/NGOs*), atau dalam konteks Indonesia, yang bisa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga-lembaga lainnya yang sejenis, mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Eksistensi dan peran organisasi non pemerintah dalam pembangunan bangsa, baik yang dilakukan

oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan. Pemerintah (pusat dan daerah) memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, terutama pada sisi sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan berbagai *NGOs* dapat membantu meringankan tugas dan beban kerja pemerintah pada bidang dan sektor tertentu, untuk memberdayakan masyarakat.

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang relatif masih berusa muda, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sangat membutuhkan peran dan serta keterlibatan *NGOs*. Harapan dari kehadiran dan keberadaan *NGOs* di tengah-tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam upaya untuk membantu daerah dalam membangun daerah tersebut. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan (2014), terdapat 14 (empat belas) lembaga suadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di instansi tersebut. Namun, menurut Ibu Sur “....tidak semua LSM tersebut melakukan perpanjangan izinnya. Hanya terdapat beberapa LSM saja yang dinyatakan aktif berdasarkan izin yang kami keluarkan....” (Wawancara, 30 September 2015).

Tabel 5.9 Daftar Lembaga Suadaya Masyarakat Yang Terdaftar di Kota Tidore Kepulauan per 2014

No.	Nama Lembaga	Bidang Kegiatan	Satus Berdasarkan Izin
1.	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LAPM)	Hukum dan Sosila	Tidak Aktif
2.	Suara Oba (The Voice of Oba)	Sosial	Tidak Aktif
3.	Masyarakat Transparansi Malut (MATA-MU)	Pengawasan	Tidak Aktif
4.	Lembaga Pegembangan Pertanian Maluku Utara (LP2-MU)	Pertanian	Tidak Aktif
5.	Yayasan Muhammad Asyik Thalib	Pendidikan	Aktif
6.	Lembaga INDEPENDENSIA	Sosial	Aktif
7.	Dewan Kesehatan Rakyat Kota Tidore Kepulauan	Kesehatan	Aktif
8.	Komunitas Konservasi Alam Maluku Utara, DPC Kota Tidore Kepulauan	Lingkungan	Aktif

No.	Nama Lembaga	Bidang Kegiatan	Satus Berdasarkan Izin
9.	Lembaga Mitra Publik Maluku Utara	Sosial	Aktif
10.	LSM Rorano Maluku Utara	Sosial	Aktif
11.	Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Pendidikan Maluku Utara	Pengawasan dan Pendidikan	Aktif
12.	Armada Pena	Pendidikan dan Sosial	Aktif
13.	Lembaga Mitra Maritim Indonesia	Kelautan dan Perikanan	Aktif
14.	LSM GAHARU	Sosial	Aktif

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, (2014)

Dengan menggunakan data yang tersaji pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, dari 14 (empat belas) LSM yang terdaftar pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, terdapat 4 (empat) LSM yang dinyatakan tidak aktif berdasarkan izin yang dikeluarkan. Berkaitan dengan fokus utama dari studi ini, yaitu perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Dengan menggunakan data yang ada pada tabel tersebut di atas maka, tidak terdapat LSM yang ada di Kota Tidore Kepulauan yang bergerak secara husu pada bidang atau sektor pariwisata. Namun demikian, penulis menyajikan data tentang perhatian beberapa LSM/NGOs di Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut.

Ibu Run menjelaskan tentang perhatian NGOs di Kota Tidore Kepulauan, khususnya lembaga yang ia pimpin, berkaitan dengan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagai sebagai berikut.

“....sebenarnya lembaga kami ini, tidak secara khusus bergerak di bidang pariwisata. Lembaga kami bergerak pada bidang konservasi alam. Dan untuk kegiatan di Kota Tidore, secara kebutuhan kami ada di Sofifi jadi kegiatan yang sering kami lakukan adalah perlindungan dan penghijauan atau penanaman pohon mangrove di Dana Gurua Marasai di Guraping ini.... dan kami selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat (Kelurahan) Guraping untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di

dana tersebut, karena hutan mangrove yang ada di dana tersebut termasuk spesies tumbuhan mangrove yang langka di Indonesia....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Lebih lanjut Ibu Run menjelaskan bahwa.

“....untuk pembangunan pariwisata, khususnya wisata alam, kami secara internal pernah mendiskusikan tentang itu, terutama objek wisata yang ada di daratan Oba ini, seperti Danau Gurau Marasai bersama Hutan Mangrovenya. Kemudian Pulau Sibu yang ada di depan sana, kemudian Taman Nasional Aketajawe, dan lainnya....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Senada dengan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Run di atas, Bapak Sio menjelaskan tentang perhatian LSM/NGOs, terutama lembaganya dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....lembaga kami ini bergerak pada bidang kemaritiman atau kelautan. Dan salah satu konsen kami adalah perlindungan lingkungan kelautan dan habitatnya, selain itu, kami juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat pesisir.... harapannya kami dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, terutama berkaitan dengan bidang kelautan, dan pembinaan masyarakat pesisir....” (Wawancara, 4 Desember 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas tergambar bahwa, di Kota Tidore Kepulauan terdapat LSM mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Wujud perhatian LSM daerah terhadap pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan adalah melakukan perlindungan terhadap lingkungan alam.

Secara konseptual, selain lembaga pendidikan dan LSM, lembaga informal seperti lembaga adat beserta pemimpinnya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, berikut adalah penyajian data tentang eksistensi lembaga adat di Kota Tidore Kepulauan dan perhatiannya tentang pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan telah dijelaskan di depan, Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan warisan peradaban sejarah Tidore sebelumnya. Kota Tidore Kepulauan secara historis merupakan daerah kerajaan, dan eksistensi kerajaan di Tidore masi ada hingga sekarang, yang dikenal dengan Kesultanan Islam Tidore. Sebagai daerah kesultanan yang kemudian memperkaya khasanah peradaban budaya di Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan amatan penulis, di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di Pulau Tidore, terdapat beberapa perkampungan adat yang masih tetap menjaga adat, tradisi dan budaya. Adat, tradisi dan budaya yang hidup di perkampungan tersebut sangat kuat dan menjadi bagian dari filosofi kehidupan masyarakat. Adat, tradisi dan budaya yang menjadi filosofi kehidupan masyarakat tersebut mempunyai tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam adat, tradisi dan budaya tersebut terdapat sistem dan struktur organisasi, yang dipimpin oleh seorang pemimpin adat, yang biasa disebut "*Sowohi* dan/atau *Fomanyira*". Perkampungan adat yang terdapat di Tidore seperti, perkampungan Kalaodi, yang pemimpin adatnya disebut *Sowohi*. Perkempungan adat Gurabunga, pemimpin adatnya disebut *Sowohi*. Selanjutnya, perkampungan adat Afa-Afa dan Toma You, pemimpin adatnya disebut *Fomanyira* atau *Nyira*. Perkampungan adat Jai, sapaan pemimpin adatnya adalah *Fomanyira* atau *Nyira*.

Perhatian lembaga adat dan para pemimpin informal dalam pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, Bapak Abd menjelaskannya sebagai berikut.

"....sebenarnya saya dan kami pihak Kesultanan menginginkan ada atauran yang mengatur hubungan formal antara Kesultanan dengan Pemda. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kami (Kesultanan Tidore) melakukan kunjungan ke Kesultanan Jogja (Yogyakarta). Dan kami

menemukan di Jogja itu terdapat Perda yang mengatur hubungan formal antara Pemda dengan Kesultanan. Dalam Perda tersebut mengatur pembagian kewenangan anatar Pemda dengan pihak Kesultanan....” (Wawancara, 11 November 2015).

Berkaitan dengan membangun hubungan formal antara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore, lebih lanjut Bapak Abd menjelaskannya sebagai berikut.

“....dalam usaha untuk mendorong membangun hubungan formal anatar Pemda dengan Kesultanan maka, sekarang ini kami berinisiatif bertemu dengan DPRD untuk membicarakan masalah tersebut.... hal ini kami lakukan karena kami belajar dari Kesultanan Jogja tadi.... uapaya kami ini agara terdapat landasan hukum yang jelas, yang mengatur hubungan Pemda dengan Kesultanan. Kalau tidak kan, Pemda hanya menggunakan keberadaan kesultanan untuk kepentingan mereka.... misalnya, perayaan Hari Jadi Tidore. Kegiatan tersebut kan kegiatan kesultanan. Tetapi Pemda menjadikan *event* budaya untuk promosi wisata daerah....” (Wawancara, 11 November 2015).

Lebih lanjut Bapak Abd menjelaskan bahwa.

“....berkaitan dengan pariwisata di daerah ini, sebenarnya saya punya ide untuk membangun kampung budaya. Ide ini pernah saya bicarakan secara internal dalam *Kadato* (Karaton Kesultanan Tidore). Tujuan uatam dari ide ini adalah untuk mempertahankan dan membudayakan bahasa Tidore. Menurut saya ini penting karena bahasa Tidore pada kalangan anak-anak sekarang suda hampir hilang. Artinya, anak-anak serang hampir suda tidak tau lagi bahasa Tidore. Instrumennya, kita usulkan ke Dinas Pendidikan menjadikan bahasa Tidore sebagai muatan kurikulum di sekolah SD.... selain itu, ya mungkin saja kampung budaya ini bisa dijadikan sebagai objek wisata di daerah oleh Dinas Pariwisata.... kampung budaya tersebut diantaranya Kalaodi, Gurabunga, Lada Ake, Topo, Afa-Afa, Jai, dan beberapa kampung lainnya....” (Wawancara, 11 November 2015).

Selain apa yang dijelaskan oleh Bapak Abd di atas. Berkaitan dengan perhatian pemimpin informal dalam pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, juga dijelaskan oleh Bapak Mul sebagai berikut.

“....memang saya pernah *bacarita* (bincang-bincang) dengan Pa Lurah. Dan Pa Lurah ceritah bahwa, Kelurahan Kalaodi ini menjadi salah satu tempat wisata di Tidore ini. Dan saya *lia* (lihat) setiap hari libur, macam hari sabtu-minggu itu ada orang datang di sisni dan *dorang pi di Luku Celeng* (mereka ke Air Terjuan Luku Celeng).... kalau kegiatan budaya itu, *torang pernah biking* (kami pernah buat) unapacara adat *Paca Goya* (membersihkan tempat-tempat keramat). Dan pada acara puncak *Paca*

Goya itu torang (kami) undang Pa Walikota dengan Wakil Walikota, Pa Sultan (Tidore). Dan dorang (mereka) datang....” (Wawancara, 5 November 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas terbaca bahwa, lembaga adat dan para pemimpin informal di Kota Tidore Kepulauan mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Bentuk perhatian lembaga adat dan pemimpin informal dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan adalah berusaha membangun hubungan formasi anatar pemerintah daerah dengan lembaga informal. Selain itu, para pemimpin informal berusaha menjaga dan melestarikan berabagi kebudayaan yang hidup di masyarakat untuk menjaga eksistensi nilai-nilai budaya agar tetap hidup.

Masyarakat secara individual mempunyai peran penting dalam pembangunan negara dan daerah. Dalam konteks pembangunan pariwisata, keberadaan dan peran masyarakat sangat diperlukan. Terkait dengan keberadaan dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata tersebut. Berikut penulis menyajikan bagaimana perhatian masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Bapak Ara menjelaskan tentang perhatian masyarakat, terutama pribadinya dalam pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“Saya bukan siapa-siapa di daerah ini. Cuma karena mungkin saya mempunyai kemampuan berbahasa Inggris sehingga banyak wisatawan asing berkenalan dengan saya melalui media sosial, sehingga ketika mereka berkunjung ke Tidore mereka selalu menghubungi saya, dan meminta saya memandu mereka untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di daerah ini.... seperti yang pernah saya ceritakan, banyak wisatawan asing yang datang ke Tidore ketemu dengan saya. Mungkin banyak wisatawan asing yang datang dan bertemu dengan saya dan bahkan mereka menginap di rumah saya, sehingga mungkin ada anggota dewan (DPRD Kota Tidore Kepulauan) yang tau, sehingga beberapa waktu lalu ada beberapa anggota dewan berkunjung ke rumah saya, dan kami

bercerita tentang pariwisata di Kota Tidore....” (Wawancara, 1 Desember 2015).

Lebih lanjut Bapak Ara menjelaskan bahwa.

“....untuk pembangunan pariwisata, mungkin seperti yang pernah kita diskusikan, saya mempunyai konsep pembangunan pariwisata di Kota Tidore ini. Tetapi saya tidak bisa berbuat banyak karena kita sebagai masyarakat ini tidak dilibatkan dalam hal-hal seperti itu. Mungkin pemahaman pemerintah daerah menganggap masyarakat itu tidak tau hal-hal seperti itu.... kerana selama ini, yang terjadi di daerah itu masyarakat dianggap tidak tau tentang masalah-masalah seperti itu oleh pemerintah.... harapan saya, kalau saya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerah ini maka saya tawarkan beberapa konsep saya untuk membangun tempat-tempat wisata yang dianggap baik di Kota Tidore ini. Saya tau beberapa tempat wisata yang sangat disukai oleh turis.... tetapi sayangnya di tempat-tempat tersebut masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah....” (Wawancara, 1 Desember 2015).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ara di atas, Bapak Aih menjelaskan bahwa.

“....saya pernah membaca di koran, dan saya tau kalau di Kalaodi ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata di Kota Tidore.... memang, saya pernah juga tanya-tanya (bertanya) ke orang-orang yang datang di sini, secara umum dorang (mereka) menjelaskan bahwa Kalaodi ini pemandangannya sangat indah.... kami masyarakat Kalaodi bersama pihak kelurahan berusaha untuk menjaga lingkungan yang ada di sini, terutama air terjun Luku Celeng, agar air itu tidak mati, dengan cara menanam pohon-pohon di sekitar air terjun Luku Celeng....” (Wawancara, 25 Oktober 2015).

Merujuk pada penjelasan informen di atas tergambar bahwa, terdapat masyarakat Kota Tidore Kepulauan mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Perhatian masyarakat secara individu dalam pembangunan pariwisata tersebut merupakan salah satu modal yang dimiliki oleh daerah dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan pariwisata.

Berdasarkan data yang telah disajikan dan paparan di depan maka tertangkap beberapa hal penting terkait dengan keberadaan lembaga sosial dan

kemasyarakatan dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan dalam yang mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga suda ya masyarakat (LSM), lembaga adat berserta para pemimpin informal, dan masyarakat secara individu.

5.6 Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap negara degan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dalam bidang apapun pada hakikatnya mengharapkan terjadinya keseimbangan dan keadilan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Dalam case Indonesia, uapay pemerintah untuk meujudkan harapan tersebut maka lailah desentralisasi pemerintahan yang dipraktekan dalam bentuk otonomi daerah.

Pembangunan negara dalam pelaksanaannya merupakan sebuah praktek sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artian bahwa, pembangunan merupakan instrumen yang dilukukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam upaya untuk mencapai tujuan negara. Namun demikian, dalam konsep negara moderen pelaksanaan pembangunan terdapat juga domain masyarakat. Artinya dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat, baik secara individual maupun secara institusional.

Konsep yang bersifat umum menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan (mulai dari perencanaan hingga evaluasi), utamanya

pembangunan daerah harus melibatkan *local goverment*, *private sector*, dan *civil society* datau *NGOs*. Namun untuk kepentingan studi ini, ketiga pihak tersebut diperinci secara spesifik oleh penulis dengan menggunakan konsep dari Kementrian Koperasi dan UKM RI (2016: 39), tentang para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pembangunan pariwisata. Para pemangku kepentingan tersebut dipetakan sebagai berikut.

1. Pemerintah, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: BAPPENAS, Kementrian Pariwisata, Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM daerah. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Kemenrian terkait dan Dinas Terkait.
2. Swasta, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: Tour Operator, Bisnis unggulan, Bisnis pariwisata, dan Asosiasi Pengusaha Pariwisata. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Media dan Asosiasi Transpotrasi.
3. Masyarakat lokal, yang terdiri dari. Pertama, pemangku kepentingan utama: Lembaga pendidikan, Sekolah Pariwisata, *Destination Management Organization* (DMO), Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan adat. Kedua, pemangku kepentingan sekunder: Sosial media, LSM, dan Lembaga donor.

Dengan merujuk pada data yang terdapat dalam pembahasan tentang kelembagaan di depan maka teridentifikasi beberapa lembaga atau pemangku kepentingan yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian untuk membahas sub fokus koordinasi anatar *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan potensi

di Kota Tidore Kepulauan, maka penulis akan menyajikan data tentang keterlibatan dan partisipasi para stakeholders tersebut dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata daerah tersebut.

5.6.1 Organisasi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan domain pemerintah secara umum. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar dan aktif dalam setiap perencanaan pembangunan, baik perencanaan pembangunan tingkatan kewilayahan, maupun bersifat sektoral. Dalam konteks pembangunan daerah, utamanya pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, maka pemerintah daerah (*local givernment*) mempunyai kewenangan dalam setaip tahapan dan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Dalam case Indoneisa, pemerintah daerah (*local givernment*) diberikan ruang oleh berbagai regulasi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di daerah tersebut. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan dalam upaya memajukan daerahnya baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral. Dalam paraktek perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA sebagai pelaku utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum kewilayahan, sedangkan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dilakukan oleh instansi atau oragnisasi perangkat daerah masing-masing sesuai bidang tugas. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tao sebagai berikut.

“Secara umum, perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh BAPPEDA, itu berdasarkan aturan. Tetapi, BAPPEDA dalam pelaksanaan

perencanaan tidak berjalan sendiri. Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi daerah.... BAPPEDA hanya melakukan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum, yang kemudian hasilnya dalam bentuk Perda RTRW, Perda RPJP daerah, RPJMD serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).... untuk perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dilakukan oleh setiap instansi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.... seperti perencanaan pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk melakukan perencanaan di bidang pariwisata, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tao di atas, Bapak Aim menjelaskan bahwa.

“....dalam konteks perencanaan umum pembangunan daerah dilakukan oleh BAPPEDA, dan itu merupakan tupoksinya mereka (BAPPEDA). Tetapi perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral itu selalu dilakukan oleh setiap SKPD. Oleh karena itu, untuk perencanaan pembangunan pariwisata maka kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melakukan itu. Dan hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Urusan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Penjelasan Bapak Aim tersebut di atas merujuk pada Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dalam Peraturan Walikota tersebut menyebutkan bahwa.

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungan tugasnya; pembinaan, pengembangan serta pengawasan di bidang kebudayaan dan pariwisata”.

Melalui penjelasan informen dan Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan tersebut tergambar bahwa: pertama, perencanaan pembangunan yang bersifat umum dalam bentuk RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh BAPPEDA berkoordinasi dengan seluruh instansi organisasi perangkat daerah. Kedua, untuk perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral

dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas setiap instansi tersebut. Ketiga, pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang bersifat sektoral, sehingga yang melakukan perencanaan pembangunan pariwisata dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Berkaitan dengan keterlibatan dan keikutsertaan organisasi perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informen dari berbagai instansi organisasi perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pariwisata.

Sebagaimana dijelaskan di depan, BAPPEDA merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian, walaupun pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang bersifat sektor dan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melibatkan BAPPEDA. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tao sebagai berikut.

“....sebagaimana saya sebutkan tadi, berdasarkan aturan atau undang-undang, BAPPEDA adalah lembaga pembuat rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, semua instansi daerah dalam menyusun rencana pembangunan sektoral seharusnya melibatkan dan mengikutsertakan BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan yang mereka buat.... untuk perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melibatkan kami dalam proses tersebut.... Kami (BAPPEDA) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa instansi lainnya belum terlalu lama ini telah bersama-sama menyusun rencana induk pembangunan pariwisata, karena perencanaan induk itu sangat penting bagi pembangunan pariwisata daerah....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Pejelasan informen tersebut memberikan gambaran bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut melibatkan BAPPEDA sebagai institusi penanggung jawab pembuatan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, tidak hanya BAPPEDA yang dilibatkan dalam proses tersebut, terdapat beberapa instansi organisasi perangkat daerah yang dilibatkan dalam proses tersebut.

Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan suatu aktifitas yang bersifat lintas sektoral. Banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan kepariwisataan tidak hanya menjadi domain dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semata, secara internal pemerintah. Instansi dan lembaga pemerintahan lain juga mempunyai tanggungjawab atas keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian, selain BAPPEDA sebagaimana di jelaskan di depan, terdapat instansi lain yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, merupakan salah satu instansi daerah yang mempunyai tanggungjawab untuk ikutserta dalam pembangunan pariwisata di daerah. Melalui instansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM daerah membangun manajemen industri dan pemasaran daerah. Dalam konteks kepariwisataan keberadaan dan kehadiran sarana dan prasarana pariwisata merupakan bagian terpenting dalam pembangunan industri kepariwisataan. Berkaitan dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari instansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, utamanya sarana pariwisata.

Demikian, keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan merupakan suatu keharusan.

Keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut sangat penting. Keterlibatan instansi tersebut berkaitan dengan manajemen pengembangan industri dan perdagangan di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dab sebagai berikut.

“....menyangkut dengan pengembangan usaha industri dan perdagangan, baik yang skala kecil, menengah dan besar, serta pengembangan usaha koperasi merupakan tanggungjawab kami (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan). Tanggungjawab kami tersebut dalam upaya memberdayakan dan memajukan berbagai kegiatan industri dan perdagangan agar lebih baik, dan hal itu merupakan Tupoksi kami.... terus menyangkut dengan pengembangan pariwisata di daerah ini, yang saya pahami adalah dalam upaya pembangunan pariwisata tersebut terdapat berbagai kegiatan yang melibatkan kegiatan industri dan perdagangan. Misalnya, ketika orang berwisata ke Tidore pasti memerlukan hotel untuk menginap atau rumah makan untuk makan dan sebagainya. Nah, untuk menyediakan sarana-sarana tersebutkan menjadi urusan kami, bukan urusan Dinas Pariwisata....” (Wawancara, 11 November 2015).

Penjelasan informen tersebut tergambar bahwa, seluruh urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha industri dan perdagangan, baik yang skala kecil, menengah dan besar, serta pengembangan usaha koperasi merupakan tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan. Penjelasan informen tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

walikota melalui sekretaris daerah, dalam pelaksanaan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan mempunyai fungsi diantaranya: Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Pembinaan dan pengawasan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Merujuk pada penjelasan informen dan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tersebut di atas, tergambar peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan pariwisata daerah tersebut sangat penting dan strategis. Berkaitan dengan keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore dijelaskan oleh Bapak Dab sebagai berikut.

“....menyangkut dengan keterlibatan kami (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan) dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata di daerah ini, secara formal kami tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Artinya begini, kami Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diundang secara khusus oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membicarakan tentang bagaimana membangun pariwisata di daerah ini tidak pernah. Yang sering kami ketemu untuk membahas program dan kegiatan, ya pada saat forum Musrembang Daerah.... Kalau dipikir-pikir seharusnya kami secara institusi harus dilibatkan dalam proses perencanaan, terutama perencanaan-perencanaan yang bersifat jangka panjang....” (Wawancara, 11 November 2015).

Menyimak penjelasan informen tersebut di atas dapat dipahami bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Ideal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan secara institusional harus dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut.

Salah satu sektor penting dalam pembangunan pariwisata daerah adalah sektor perhubungan. Organisasi perangkat daerah yang mempunyai peran penting dan vital pada sektor tersebut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di tingkat daerah. Eksistensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai institusi yang bertanggungjawab atas kelancaran lalulintas arus barang, jasa dan manusia. Industri pariwisata daerah sangat membutuhkan fasilitas transportasi dan komunikasi sebagai media untuk mobilisasi dan aktifitas lalulintas barang, jasa dan manusia. Dengan demikian, eksistensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di daerah sangat penting dan strategis dalam pembangunan pariwisata daerah. Keterlibatan dan keikutsertaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata daerah adalah suatu keharusan.

Kota Tidore Kepulauan yang secara konseptual telah mengopsesikan dirinya menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata di Provinsi Maluku Utara, dan bahkan kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, jaringan transportasi untuk memudahkan akses wisatawan untuk mencapai objek wisata merupakan suatu kebutuhan infrastruktur daerah yang harus dipenuhi oleh daerah. Untuk membangun jaringan transportasi dan aksesibilitas tersebut merupakan ruang tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan. Ruang kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Dalam Peraturan Walikota tersebut menyebutkan bahwa, tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan adalah merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pendidikan dan pelatihan teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan mempunyai fungsi, diantaranya: Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan Penyelenggaraan perizinan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Merujuk pada tugas pokok dan kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan tersebut di atas maka, keterlibatan dan keikutsertakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut sangat diperlukan. Pentingnya keterlibatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rak sebagai berikut.

“....iya, berkaitan dengan masalah pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah ini merupakan kewenangan kami. Sehingga berkaitan dengan masalah pembangunan pariwisata daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan. Memang, untuk pembangunan pariwisata di daerah ini merupakan kewenangannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi bicara berkaitan dengan perhubungan, transportasi dan informasi itu bukan kewenangannya mereka (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), itu tugas

kami.... masalahnya adalah, selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak pernah melibatkan kami secara formal untuk membicarakan hal itu....” (Wawancara, 7 Oktober 2015).

Menyimak penjelasan informen tersebut, terbaca bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut tidak melibatkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan. Harapan dan keinginan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melibatkan instansinya.

Selain dinas-dinas terkait yang harus dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Sebaiknya instansi daerah seperti kecamatan dan kelurahan harus dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tao sebagai berikut.

“....Dalam proses pembangunan daerah, semua pihak yang dianggap terkait dengan sektor tersebut harus dilibatkan, baik dinas-dinas, maupun instansi-instansi lainnya.... misalnya yang saat ini kita bicarakan tentang pembangunan pariwisata. Maka semua dinas, instansi, dan kantor yang dianggap bersentuhan dengan pariwisata ya harus dilibatkan, tidak bisa tidak.... iyah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Karena tempat-tempat wisata tersebut ada di wilayah mereka....” (Wawancara, 5 Agustus 2015).

Penjelasan imformen tersebut di atas tergambar bahawa, selain dinas-dinas, pihak kecamatan dan kelurahan dimana tempat objek wisata berada harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Keterlibatan kecamatan dan kelurahan secara formal dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Bapak Amu:

“....berkaitan dengan keterlibatan atau dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata daerah ini, terutama rencana pengembangan dan pengelolaan tempat-tempat wisata di wilayah ini, kami pihak kecamatan tidak dilibatkan secara resmi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....” (Wawancara, 18 Oktober 2015).

Berkaitan dengan keterlibatan Kantor Kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Senada dengan Bapak Amu di atas, Bapak Hab menjelaskan bahwa.

“....untuk masalah keterlibatan kami (Kantor Kecamatan) dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saya ingin mengatakan seperti ini. Kami tidak di undang atau dilibatkan secara resmi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam kegiatan perencanaan.... yang kami ketemu secara formal hanya pada saat kegiatan Musrembang Daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA....” (Wawancara, 30 September 2015).

Merujuk pada penjelasan Bapak Tao di depan, yang menjelaskan bahwa Kantor Kelurahan juga mempunyai andil dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Untuk melihat bagaimana keterlibatan kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Berikut beberapa informen menjelaskan tentang proses tersebut. Menurut Bapak Ris bahwa.

“Sebenarnya begini, berkaitan dengan keterlibatan kami dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saya harus mengakui bahwa kami tidak dilibatkan secara institusional kelurahan.... dalam pemikiran saya itu seperti ini, di Kelurahan Soa Sio ini terdapat banyak sekali objek wisata, terutama objek wisata sejarah. Di sini (Kelurahan Soa Sio) ada Kadaton Kesultanan, terus Masjid Kesultanan, Dermaga Kesultanan, Musium, Benteng Tahula, Benteng Torre, terus Makam Para Sultan-sultan.... tetapi selama ini, dalam pengembangan dan pengelolaan tempat-tempat tersebut yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melibatkan kami.... jangan kan cerita perencanaan pembangunannya, pengelolaannya saja kami tidak dilibatkan. Keinginan saya sebagai lurah itu, paling tidak kami dilibatkan dalam pembicaraan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan objek-objek wisata tersebut....” (Wawancara, 26 November 2015).

Senada dengan Bapak Ris, Bapak Rus menjelaskan bahwa.

“....begini, saya terbuka saja bahwa selama ini Dinas Pariwisata Kota Tidore tidak pernah bertemu saya sebagai lurah untuk membicarakan tentang rencana pembangunan pariwisata, terutama tempat wisata di Kelurahan Guraping ini. Dan sebelum saya jadi lurah pun tidak pernah. Karena begini, saya sebelum menjadi lurah pun saya dinggap tokoh oleh masyarakat di kelurahan ini. Jadi setiap masalah yang berkaitan dengan kelurahan saya selalu dindang oleh kelurahan untuk membicarakannya.... Jadi sampai saat ini kami pihak kelurahan belum pernah diajak oleh Dinas Pariwisata untuk membahas perencanaan pembangunan pariwisata di daerah ini.... setelah saya jadi lurah, sekarang saya mencoba mengusulkan ke Dinas Pariwisata Provinsi untuk mengembangkan Danaw Gurau Marasai dan Hutang Mangrove, serta Pulau Sibul....” (Wawancara, 30 September 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas terbaca bahwa, terdapat berbagai instansi stakeholders pariwisata internal pemerintah yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Ketidakterlibatannya berbagai instansi stakeholders pariwisata internal pemerintah daerah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan tersebut terlihat dalam lampiran Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030. Pada lampiran naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah terlihat hanya beberapa instansi pemerintah daerah yang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Sisi yang, dalam dokumen daerah tersebut terdapat instansi daerah yang tidak terkait dengan kepariwisataan dilibatkan dalam proses tersebut. Sebagai contoh, Bagian Hukum dan HAM, Inspektur Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Tidore Kepulauan (instansi-instansi daerah yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pariwisata Kota Tidore dapat dilihat pada tabel 5.7 atau lampiran).

Ketidak terlibatnya beberapa instansi pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan kepariwisata daerah di Kota Tidore sebagaimana dijelaskan di depan, menunjukkan bahwa secara internal pemerintahan daerah masih terdapat kelemahan koordinasi dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata tersebut, berdasarkan amatan penulis terjadi egosektoral yang terjadi dalam instansi pemerintah daerah. Artinya, pada masing-masing instansi atau dinas menganggap bahwa instansinya yang lebih penting dibandingkan dengan instansi yang lain. Selain itu, terbangun pola pikir sektoral yang kemudian menafikan keberadaan dan peran instansi lain dalam proses pembangunan daerah. Pemahaman yang keliru seperti ini menjadi salah satu faktor ketidak holistiknya perencanaan pembangunan daerah. Akibat negatifnya pemikiran tersebut adalah produk akhir dari konsep perencanaan pembangunan daerah yang bersifat parsial dan terjadi tumpang tindih program pembangunan daerah pada masing-masing sektor.

Merujuk pada berbagai data dan penjelasan informen tersebut di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melibatkan BAPPEDA sebagai lembaga perencana daerah dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Selain BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melibatkan berbagai instansi organisasi perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Kedua, pembangunan potensi pariwisata daerah merupakan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral yang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, dalam proses perencanaan pembangunan

potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melibatkan organisasi paerangkat daerah terkait dengan industri pariwisata seperti, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan instansi daerah tersebut dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Ketiga, Kantor Kecamatan dan Kelurahan seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam proses perencanaan dikarenakan mereka merupakan salah satu stakeholders pariwisata daerah. Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

5.6.2 Keterlibatan Pengusaha Daerah

Pengusaha daerah merupakan salah satu stakeholder pembangunan di daerah. Eksistensi dan keterlibatan pengusaha atau sektor bisnis (*private sector*) dalam pembangunan, utamanya pembangunan daerah sangat penting. *Private secktor* merupakan salah satu mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, baik program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Keterlibatan *private sector* dalam pelaksanan pembangunan, utamanya pembanguan daerah, idealnya tidak hanya pada saat implementasi program yang telah direncanan. Tetapi keterlibatan *private sector* dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan harus mulai dari awal, yaitu perencanaan. Harapan

tersebut agar pengusaha daerah tidak hanya bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan membangunnya, tetapi pengusaha daerah turut mengawasi dan memelihara apa yang dihasilkan dari pembangunan.

Berkaitan dengan studi ini, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai perencana pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut, harusnya melibatkan para pengusaha daerah yang berkaitan dengan industri pariwisata. Diikutsertakannya pengusaha daerah yang berkaitan dengan industri pariwisata tersebut dalam kerangka untuk mendorong perkembangan dan kemajuan industri pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk mengetahui seperti apa keterlibatan pengusaha daerah yang berkaitan dengan industri pariwisata, seperti perhotelan dan penginapan, restoran dan rumah makan, pengusaha pengrajin, dan pedagang dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan disajikan data-data sebagai berikut.

Keterlibatan pengusaha daerah yang bergerak pada bidang akomodasi, seperti perhotelan dan penginapan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijelaskan oleh Bapak Dun sebagai berikut.

“....berkaitan dengan dilibatkan kami dalam pembicaraan atau pembauatan rencana untuk pembangunan pariwisata di Kota Tidore oleh Dinas Pariwisata, selama ini tidak pernah. Sejak saya membangun usaha ini sejak 2013 sampai sekarang belum ada Dinas Pariwisata mengundang atau menghubungi kami untuk berbicara tentang pembangunan pariwisata di daerah ini....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dun di atas, Ibu Saf menjelaskan sebagai berikut.

“....begini ya, seperti apa yang saya bilang tadi, Penginapan Seroja ini merupakan salah satu penginapan pertama dan tertua di Tidore ini. Dan sejak mengembangkan usaha ini sampai saat ini, saya tidak pernah

diundang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk berbicara tentang rencana pembangunan pariwisata.... Dinas Pariwisata tidak pernah melibatkan kami sebagai pengusaha penginapan untuk berbicara tentang pembangunan pariwisata. Saya tidak tau, kalau penginapan-penginapan yang lain....” (Wawancara, 26 September 2015).

Selain hotel dan penginapan, eksistensi restoran, rumah makan dan usaha jajan mempunyai peran penting dalam pengembangan pariwisata daerah. Untuk melihat seperti apa keterlibatan para pengusaha kuliner tersebut dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Berikut hasil penyajian dayanya. Menurut ibu Saf:

“....sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya sebagai pemilik usaha penginapan dan restoran ini tidak pernah mendapat undangan dari Dinas Pariwisata.... kalau dorang (mereka, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) datang ke sini atau menghubungi saya hanya berkaitan dengan keperluan penyediaan makanan untuk acara-acara tertentu atau tamu-tamu yang datang di Tidore itu sering....” (Wawancara, 26 September 2015).

Menyimak penjelasan informen di atas tergambar bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut tidak melibatkan pengusaha akomodasi dan kuliner daerah. Selain pengusaha akomodasi dan kuliner, para pengrajin daerah mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan pariwisata daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah penjelasan informen berkaitan dengan keterlibatan para pengrajin dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Ibu Nab menjelaskan sebagai berikut.

“....kalau masalah itu (keterlibatan pengusaha pengrajin) tarang tara tau (kami tidak tauhu), karena selama usaha torang (kami) ini ada, torang tara pernan dapa undang (kami tidak pernah mendapat undangan) dari Dinas Pariwisata jadi torang tara tau (jadi kami tidak tauhu)....” (Wawancara, 7 Desember 2015).

Lebih lanjut, Ibu Nab menjelaskan bahwa.

“....pada hal hasil dari torang (kami) punya kelompok ini, seperti sovenir *saloi* kecil (miniatur alat yang digunakan oleh petani atau masyarakat Tidore untuk membawa hasil pertanian, yang biasa didendong di punggung), deng (dengan) koropo melinjo (krepek melinjo) selalu di dibeli oleh Dinas Koperasi....” (Wawancara, 7 Desember 2015).

Senada dengan Ibu Nab di atas, Ibu Rin menjelaskan sebagai berikut.

“....kalau itu saya tara (tidak) tau. Karena torang pe kelompok (kelompok kami) tara pernah dapa undang (tidak pernah dapat undangan), jadi yasa tara tau (jadi saya tdak tauhu).... selama ini torang pe klemompok (semla ini kelompok kami) mendapat bantuan dari Dinas Konperasi satu lemari kaca untuk taru torang pe (kami punya) bunga-bunga yang so jadi (bunga-bunga yang suda jadi)....” (Wawancara, 7 Desember 2015).

Amatan penulis, produk dari *home industry* yang dipimpin oleh Ibu Rin adalah berupa miniatur peralatan pertanian dan perabot rumah tangga tradisional masyarakat Tidore, serta perhiasan rumah seperti bunga. Bahan baku yang digunakan oleh *home industry* ini adalah bambu dan kayu yang mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Pengusaha yang bergerak pada sektor jasa perdagangan merupakan bagian terpenting dari industri pariwisata. Pada sektor jasa perdagangan inilah kebutuhan konsumtif wisatawan dipenuhi. Dengan demikian, eksistensi jasa perdagangan dalam industri pariwisata sangat fital. Untuk melihat keterlibatan pengusaha jasa perdagangan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Berikut pejelasan Bapak Sul sebaga berikut.

“....saya sebagai pengusaha, dan saya mempunyai beberapa toko, tetapi yang berkaitan dengan apa yang Pa Man (Penulis) tanya itu, selama ini tidak perna ada.... maksud saya itu begini, saya tidak pernah diminta atau diundang sebagai pengusaha tidak pernah. Kalau kapasitas saya sebagai Anggota Dewan (DPRD Kota Tidore Kepulauan), kami membahas tentang Perda-Perda yang berkaitan dengan kepariwisataan daerah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan BAPPEDA itu iya, tetapi sebagai pengusaha tidak pernah, saya tidak tau kalau dengan pengusaha-pengusaha lain.... menurut saya, seharusnya Dinas Pariwisata melibatkan para pengusaha daerah dalam proses penyusunan rencana tersebut....” (Wawancara, 27 September 2015).

Berdasarkan data yang tersaji di depan maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, para pengusaha daerah mengharapkan eksistensinya dilihat dan diterima oleh pemerintah daerah sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Kedua, pengusaha perhotelan menilai, salah satu penyebab melambatnya perkembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan adalah masih kurangnya sarana pariwisata seperti hotel dan penginapan. Ketiga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan pengusaha daerah yang bergerak pada sektor-sektor yang berkaitan dengan industri kepariwisataan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata daerah. Keempat, sosialisasi dan melibatkan pengusaha kerajinan souvenir dalam pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak ada, yang menyebabkan para pengrajin tidak mengetahui tentang peranan penting mereka dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

5.6.3 Keterlibatan Lembaga Pendidikan

Eksistensi dan kemajuan lembaga pendidikan di daerah tidak hanya sebagai indikator kemajuan daerah. Pada sisi yang lain, kehadiran dan keikutsertaan dalam proses pembangunan dan memajukan daerah merupakan bagian dari tanggungjawab lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Terkait dengan keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, Bapak Yan menjelaskannya sebagai berikut.

“....sepengetahuan saya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak diundang atau dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pariwisata.... beberapa bulan lalu saya pernah dengan Kepala BAPPEDA bicara tentang pembahasan Ramperda tentang pembangunan pariwisata. Tetapi saya hanya mendengarnya saja, dan saya tidak tau prosesnya seperti apa dan sebagainya, karena kami tidak dilibatkan....” (Wawancara, 25 November 2015).

Lebih lanjut Bapak Yan menjelaskan bahwa.

“....sebenarnya harapan saya, seharusnya mereka melibatkan Dinas Pendidikan. Karena saya yakin, dalam konsep pembangunan pariwisata pasti ada bicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan instansi yang punya tanggungjawab besar masalah itu ada kami.... paling tidak kita bicara tentang bagaimana strategi membangun sumber daya manusia yang mempunyai skil yang berkaitan dengan kepariwisataan dan sebagainya.... memang sepengetahuan saya, di Kota Tidore ini belum ada penyelenggara pendidikan yang berkaitan profesi pariwisata. Tetapi kalau daerah ini sudah menyatakan bahwa Kota Tidore menjadikan pariwisata sebagai landasan pembangunan ekonomi maka strategi pembangunan manusianya harus disiapkan....” (Wawancara, 25 November 2015).

Penjelasan informen tersebut, tergambar bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Ketidak terlibatnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut, juga terlihat dalam tabel tentang Tim Eksekutif Pemda Kota Tidore Kepulauan Dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030.

Selain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab penyelenggara pendidikan di daerah, harus dilibatkan dalam perencanaan potensi pariwisata daerah. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah. Berkaitan dengan terlibatan

lembaga-lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, berikut penjelasan Bapak Yas.

“....secara konseptual mungkin kita semua paham bahwa lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah. Lembaga pendidikan tinggi memainkan peran terkait dengan pembangunan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan. Di Kota Tidore ini sebagaimana kita ketahui, pendidikan masyarakat secara umum masih rendah. Oleh karena itu, peran-peran masyarakat dalam pembangunan seperti perencanaan dan pengawasan masih sangat minim. Melihat kenyataan tersebut, maka perguruan tinggi harus memainkan peran-peran tersebut....” (Wawancara, 28 November 2015).

Lebih lanjut Bapak Yas menjelaskan bahwa.

“....husus perencanaan pembangunan pariwisata, kebutuhan kemarin kami bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Tidore menyusun naskah akademik pembangunan pariwisata daerah. Dan kerjasama tersebut dilakukan oleh Fakultas Hukum, kalau tidak salah dengan Dinas Pariwisata....” (Wawancara, 28 November 2015).

Penegasan keterlibatan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yas di atas, dijelaskan oleh Ibu Mam sebagai berikut.

“....iya, untuk perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, kemarin kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan untuk menyusun naskah akademik Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.... sebenarnya dalam kerjasama tersebut kami hanya sebagai pihak ketiga. Karena pemenang tender pembuatan naskah akademik tersebut adalah salah satu CV. Dan kami diminati oleh CV tersebut untuk membuat naskah akademik tersebut.... Untuk memudahkan kami dalam proses pekerjaan tersebut maka kami berkoordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mendapatkan berbagai dokumen dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pariwisata di daerah ini....” (Wawancara, 3 Desember 2015).

Menyimak penjelasan informen tersebut di atas terbaca bahwa keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan hanya sebatas penyusunan naskah akademik. Idialnya

adalah keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan daerah tidak terbatas pada penyusunan naskah akademiki. Tetapi harus lebih dari itu sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yas “....lembaga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah. Lembaga pendidikan tinggi memainkan peran terkait dengan pembangunan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan.”

Berkaitan dengan keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Sin sebagai berikut.

“....tidak hanya perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Selama ini pemerintah daerah tidak pernah melibatkan kami dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Saya pun tidak paham apa yang dipikirkan oleh pemerintah daerah.... Memang saya akui, bahwa institusi ini masih kecil dan masih mudah. Tetapi paling tidak kita diajak berbicara dan berdiskusi tentang pembangunan di daerah ini. Salah satu tujuan dari institusi ini dilahirkan adalah bagaimana kita membangun daerah ini....” (Wawancara, 1 Desember 2015).

Berdasarkan data yang telah disajikan di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan sebagai penanggungjawab penyelenggara lembaga pendidikan di daerah tersebut tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Kedua, lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan tinggi, yang seharusnya mempunyai peran penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Ketiga, keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan hanya sebatas penyusunan naskah akademik. Keempat, harapan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah seharusnya instansi tersebut dilibatkan dalam perencanaan

pembangunan potensi pariwisata daerah, dikarenakan dalam proses tersebut pasti berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan lembaga yang bertanggungjawab tentang masalah tersebut adalah instansinya. Kelima, lembaga pendidikan tinggi di Kota Tidore Kepulauan mengharapkan eksistennya diakui dan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pengawsan dan evaluasi).

5.6.4 Keterlibatan Organisasi Non Pemerintah atau LSM

Eksistensi dan peran organisasi non pemerintah dalam pembangunan bangsa, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan. Pemerintah (pusat dan daerah) memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, terutama pada sisi sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan berbagai *NGOs* dapat membantu meringankan tugas dan beban kerja pemerintah pada bidang dan sektor tertentu, untuk memberdayakan masyarakat.

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang relatif masih beruisa muda, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sangat membutuhkan peran dan serta keterlibatan *NGOs*. Harapan dari kehadiran dan keberadaan *NGOs* di tengah-tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam upaya untuk membantu daerah dalam membangun daerah tersebut. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan (2014), terdapat 14 (empat belas) lembaga suadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di instansi tersebut (daftar lembaga suadaya masyarakat (LSM) terdapat pada tabel 5.9 dan juga terdapat pada lampiran).

Dengan menggunakan data yang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan maka, tidak

terdapat LSM yang ada di Kota Tidore Kepulauan yang bergerak secara husu pada bidang atau sektor pariwisata. Namun demikian, penulis menyajikan data tentang keterlibatan LSM/NGOs di Kota Tidore Kepulauan dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut.

Ibu Run menjelaskan tentang partisipasi dan keterlibatan *NGOs* di Kota Tidore Kepulauan, khususnya lembaga yang ia pimpin, berkaitan dengan perencanaan pembangunan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebagai berikut.

“....untuk masalah partisipasi atau keterlibatan kami dalam perencanaan pembangunan pariwisata, kami secara kelembagaan atau saya secara pribadi tidak mendapatkan permintaan oleh pemerintah daerah.... Memang saya pernah mendengar bahwa Pemda dan DPRD sedang membahas rencana pembangunan pariwisata daerah.... untuk pembangunan pariwisata, khususnya wisata alam, kami secara internal pernah mendiskusikan tentang itu, terutama objek wisata yang ada di daratan Oba ini, seperti Danau Gurau Marasai bersama Hutan Mangrovenya. Kemudian Pulau Sibuy yang ada di depan sana, kemudian Taman Nasional Aketajawe, dan lainnya....” (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Senada dengan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Run di atas, Bapak Sio menjelaskan tentang keterlibatan atau partisipasi LSM/NGOs, terutama lembaganya dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....mungkin seperti begini. Untuk berkaitan dengan perencanaan pembangunan pariwisata, kami tidak mengetahuinya. Karena mungkin saja lembaga kami ini tidak berkaitan langsung dengan bidang pariwisata, sehingga kami tidak dilibatkan dalam masalah tersebut.... memang lembaga kami ini bergerak pada bidang kemaritiman atau kelautan. Dan salah satu konsen kami adalah perlindungan lingkungan kelautan dan habitatnya, kami juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat pesisir. Tetapi sejauh ini kami tidak diundang oleh pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata untuk berbicara tentang perencanaan pembangunan pariwisata.... harapannya kami dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, terutama berkaitan dengan bidang kelautan, dan pembinaan masyarakat peisir....” (Wawancara, 4 Desember 2015).

Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dalam konteks otonomi daerah sangat penting dan bersifat strategis. Selain itu, partisipasi publik dalam pembangunan daerah adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan daerah otonom. Penjelasan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Isi sebagai berikut.

“....kalau berkaitan dengan perencanaan pembangunan potensi pariwisata, kami tidak dilibatkan. Memang kami pernah ketemu dengan Pak Wakil Walikota, dengan DPRD, dan kami memintah kepada mereka agar publik dilibatkan dalam proses pembangunan daerah.... Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dalam konteks otonomi daerah sangat penting dan itu bersifat strategis untuk kepentingan pembangunan daerah kedepan. Dan tidak hanya perencanaannya saja, tetapi juga pengawasan. Selain itu, menurut saya, partisipasi publik dalam pembangunan daerah adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan daerah otonom. Terutama Kota Tidore Kepulauan, yang notabenenya meruapakan daerah yang dalam proses membangun....” (Wawancara, 4 Desember 2015).

Terkait dengan keterlibatan lembaga suadaya masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan matan penulis, tidak dilibatkannya lembaga suadaya masyarakat dalam proses perencanaan daerah (khususnya perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan) disebabkan karena citra negatif pemerintah daerah terhadap lembaga suadaya masyarakat. Dalam pandangan pemerintah daerah keberadaan lembaga suadaya masyarakat hanya sebagai lembaga pengejar proyek untuk pentingan pribadi atau kelompok tertentu, bahkan menjadi penghambat berjalannya program pemerintah daerah. Selain itu, lembaga suadaya masyarakat di daerah belum memiliki nilai tawar yang positif untuk pembangunan daerah.

Merujuk pada hasil data yang tersaji di depan maka dapat dijesakan bahwa. Pertama, Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan (2014), terdapat 14 (empat

belas) lembaga suadaya masyarakat (LSM/NGOs) yang terdapat di instansi tersebut. Namun, tidak semua lembaga tersebut aktif berdasarkan izin, hanya terdapat 10 (sepulu) lembaga yang aktif. Kedua, secara umum, LSM/NGOs yang ada di Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ketiga, harapan dari LSM/NGOs adalah mereka dilibatkan dalam proses pembangunan daerah, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pengawasan. Lahirnya harapan tersebut karena mereka berpemikiran bahwa partisipasi publik dalam pembangunan daerah merupakan kebutuhan dan suatu keniscayaan dalam konteks otonomi daerah. Namun pada sisi yang lain lembaga suadaya masyarakat di daerah belum memiliki nilai tawar yang kuat dan baik dalam pembangunan daerah.

5.6.5 Keterlibatan Pemimpin Informal

Sebagaimana dijelaskan telah dijelaskan di depan, Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan warisan peradaban sejarah Tidore sebelumnya. Kota Tidore Kepulauan secara historis merupakan daerah kerajaan, dan eksistensi kerajaan di Tidore masi ada hingga sekarang, yang dikenal dengan Kesultanan Islam Tidore. Sebagai daerah kesultanan yang kemudian memperkaya khasanah peradaban budaya di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam konsep pariwisata terdapat objek wisata budaya. Dalam praktek kepariwisataan, pengelola atau pelaksan wisata budaya adalah komunitas atau perkampungan adat yang terdapat pada destinasi wisata tersebut. Berkaitan dengan pembahasan keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, penulis

akan menyajikan data primer yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai berikut.

Keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, Bapak Abd menjelaskannya sebagai berikut.

“....untuk perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Pemda, kami pihak Kesultanan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Mungkin dalam hal ini, kami pihak Kesultanan tidak memiliki hubungan secara formal dengan Pemda sehingga Pemda tidak pernah melibatkan kami dalam kegiatan-kegiatan formal mereka.... sebenarnya saya dan kami pihak Kesultanan menginginkan ada atauran yang mengatur hubungan formal antara Kesultanan dengan Pemda. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kami (Kesultanan Tidore) melakukan kunjungan ke Kesultanan Jogja (Yogyakarta). Dan kami menemukan di Jogja itu terdapat Perda yang mengatur hubungan formal antara Pemda dengan Kesultanan. Dalam Perda tersebut mengatur pembagian kewenangan anatar Pemda dengan pihak Kesultanan....” (Wawancara, 11 November 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abd di atas, Bapak Sas menjelaskan bahwa.

“....iya, saya ini termasuk salah satu Bobato (staf) di Kadato (Kraton). Dan Sultan itu, kalau ada tamu yang datang ke Kadato, atau ada undangan dari Pemerint Daerah, torang (kami) ini selalu dihubungi oleh Sultan melalui Jou Jau (Perdana Mentri) untuk datang ke Kadato untuk melakukan persiapan-persiapan berkaitan dengan itu. Tetapi selama ini, torang tara (kami tidak) pernah dengan Sultan atau Jou Jau bicara masalah itu....” (Wawancara 7 November 2015).

Selain apa yang dijelaskan oleh Bapak Abd dan Sas di atas. Berkaitan dengan keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, juga dijelaskan oleh Bapak Mul sebagai berikut.

“....kalau masalah itu saya *tara* (tidak) tau. Karena memang *torang tara* (kami tidak) pernah *dapa* (dapat) undangan dari Pemda.... memang saya pernah *bacarita* (bincang-bincang) dengan Pa Lurah. Dan Pa Lurah ceritah bahwa, Kelurahan Kalaodi ini menjadi salah satu tempat wisata di Tidore ini. Dan saya *lia* (lihat) setiap hari libur, macam hari sabtu-minggu itu ada orang datang di sisni dan *dorang pi di Luku Celeng* (mereka ke Air Terjuan Luku Celeng).... kalau kegiatan budaya itu, *torang pernaha biking* (kami

pernah buat) unapacara adat *Paca Goya* (membersihkan tempat-tempat keramat). Dan pada acara puncak *Paca Goya* itu torang (kami) undang Pa Walikota dengan Wakil Walikota, Pa Sultan (Tidore). Dan dorang (mereka) datang....” (Wawancara, 5 November 2015).

Selanjutnya, penjelasan Bapak Lan berkaitan dengan keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....saya ini kan cuma *Nyira* (pemimpin adat) di kampung ini. Kalau hal yang begitu-begitu saya *tara tau* (tidak tau). Karena selama ini saya tara (tidak) pernah dapa undang (dapat undangan) tentang hal-hal begitu.... memang kalau *torang biking* (kami buat) upacara adat *Legu Dou* (Sukuran) itu, torang undang (kami mengundang) Pa Walikota.... tetapi tentang hal perencanaan pembangunan pariwisata itu saya *tara tau* (tidak tau)....” (Wawancara, 10 Desember 2015).

Merujuk pada data primer yang berkaitan dengan keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, dalam konteks budaya, Kota Tidore Kepulauan merupakan warisan peradaban kebudayaan Kesultanan Tidore. Hal ini lah yang kemudian memperkaya khasana nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup pada masyarakat Tidore saat ini. Dengan nilai-nilai sosial dan budaya tersebut yang kemudian membentuk struktur masyarakat secara organisatoris, dan melahirkan para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Para pemimpin informal ini lah yang mengarahkan masyarakat untuk menghargai dan memelihara nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Kedua, secara formal pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan pemimpin informal yang ada di daerah tersebut. Ketiga, berdasarkan data primer, terdapat pemimpin informal mempunyai ide dan

konsep tentang pembangunan budaya daerah, yang tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara budaya daerah. Namun ide dan konsep tersebut tidak dapat diaktualisasikan dikarenakan tidak mempunyai ruang berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan ide dan konsep yang dimilikinya.

5.6.6 Keterlibatan Masyarakat

Pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah (pusat dan daerah) sebagai penyelenggara negara merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan negara dan masyarakatnya ke kondisi yang lebih baik. Masyarakat atau warga negara merupakan salah satu unsur negara dan merupakan syarat terbentuk sebuah negara. Dengan demikian eksistensi masyarakat dalam sebuah negara adalah suatu kebutuhan negara. Kebutuhan negara akan masyarakat seharusnya tidak hanya sebagai syarat terbentuknya negara, tetapi negara dalam seluruh aktifitasnya menghadirkan dan melibatkan masyarakat di dalamnya, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan sebagai sebuah iktiar untuk merubah kondisi negara dan masyarakatnya ke kondisi yang lebih baik, dan dilakukan secara terencana dan terukur. Untuk melakukan proses tersebut maka sinergitas antara negara dan masyarakat sebuah keharusan. Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) merupakan sebuah kebutuhan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan termasuk perencanaan pembangunan merupakan perwujudan dari kebutuhan negara dan kesadaran masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang usianya masih relatif muda berusaha membangun daerah.

Pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan tersebut memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam proses pembangunan di daerah tersebut merupakan kebutuhan daerah, dan pada sisi yang lain merupakan bentuk tanggungjawab masyarakat terhadap daerahnya.

Berkaitan dengan sub fokus dari studi ini, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, berikut penulis menyajikan data-data yang berkaitan dengan sub fokus tersebut. Bapak Ara menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....untuk pembangunan pariwisata, mungkin seperti yang pernah kita diskusikan, saya mempunyai konsep pembangunan pariwisata di Kota Tidore ini. Tetapi saya tidak bisa berbuat banyak karena kita sebagai masyarakat ini tidak dilibatkan dalam hal-hal seperti itu. Mungkin pemahaman pemerintah daerah menganggap masyarakat itu tidak tau hal-hal seperti itu.... kerana selama ini, yang terjadi di daerah itu masyarakat dianggap tidak tau tentang masalah-masalah seperti itu oleh pemerintah.... harapan saya, kalau saya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerah ini maka saya tawarkan beberapa konsep saya untuk membangun tempat-tempat wisata yang dianggap baik di Kota Tidore ini. Saya tau beberapa tempat wisata yang sangat disukai oleh turis.... tetapi sayangnya di tempat-tempat tersebut masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah....” (Wawancara, 1 Desember 2015).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ara di atas, Bapak Aih menjelaskan bahwa.

“....saya pernah membaca di koran, dan saya tau kalau di Kalaodi ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata di Kota Tidore.... memang, saya pernah juga tanya-tanya (bertanya) ke orang-orang yang datang di sini, secara umum dorang (mereka) menjelaskan bahwa Kalaodi ini pemandangannya sangat indah.... kami masyarakat Kalaodi bersama pihak kelurahan berusaha untuk menjaga lingkungan yang ada di sini, terutama air terjun Luku Celeng, agar air itu tidak mati, dengan cara menanam

pohon-pohon di sekitar air terjun Luku Celeng.... tetapi untuk kami sebagai masyarakat tidak tau, kalau pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan pariwisata.... kalau diacara Musrembang Kelurahan kami pernah mengusulkan tentang pengembangan Luku Celeng ke pemerintah daerah. Tetapi sampai saat ini tidak lihat hasilnya....” (Wawancara, 25 Oktober 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aih tersebut di atas.

Bapak San menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.

“....perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, kami tidak tahu masalah itu, dan kami tidak dilibatkan.... tetapi untuk pengembangan beberapa objek wisata di kelurahan ini, memang beberapa kali kami usulkan di Musrembang Kelurahan. Misalnya kami usulkan pemeliharaan Benteng Ts Tjobe dan Tugu Pendaratan Juan Sebastian De Elcano. Tetapi itu, sampai sekarang (2015) usulan itu tidak pernah direalisasikan.... sebenarnya harapan kami, kalau bisa kami harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pariwisata tersebut. Karena saya secara pribadi mempunyai pemikiran untuk mengembangkan lokasi Tugu Pendaratan. Lokasi tersebut dibuat seperti anjungan begitu. Karena lokasi tersebut cukup bagus pemandangannya....” (Wawancara, 10 Desember 2015).

Merujuk pada data primer yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak hanya itu, masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak mengetahui tentang perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kedua, masyarakat pemerhati pariwisata Kota Tidore Kepulauan mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Namun ide dan konsep yang dimiliki masyarakat tidak dapat dikembangkan dan direalisasikan, dikarenakan masyarakat tidak mempunyai ruang dan media untuk menyampaikan ide dan konsep tersebut.

Ketiga, masyarakat mempunyai harapan agar mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, persepsi pemerintah daerah tentang ketidak tahuan masyarakat tentang pembangunan daerah dihilangkan. Karena, pada masyarakat tertentu telah memiliki kesadaran tentang kepartisipasian masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

5.7. Model Empiris Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Tidore Kepulauan

Model empiris (*existing model*) yang dibangun dalam penelitian ini merujuk pada temuan-temuan dari hasil studi yang tersaji di depan. Temuan-temuan dari hasil studi tersebut merupakan deskripsi dan elaborasi dari fokus utama dan beberapa sub fokus yang dirumuskan pada bab sebelumnya (bab IV). Fokus utama dari studi ini adalah “perencanaan pembangunan destinasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan daerah di Kota Tidore Kepulauan”. Melalui fokus utama tersebut kemudian melahirkan empat sub fokus yaitu: Penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan; Fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan; Pembangunan fasilitas umum pendukung di Kota Tidore Kepulauan; Kelembagaan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; Koordinasi dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan; dan Menemukan model inovasi daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan temuan dan hasil studi yang berdasarkan fokus penelitian sebagaimana tersaji di depan maka *existing model* yang terbangun dari studi sebagai berikut.

5.7.1 Objek Wisata Kota Tidore Kepulauan

Merujuk pada berbagai data hasil penelitian yang tersaji di depan maka dapat ditangkap beberapa gambaran tetag ketersediaan objek wisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut: pertama, secara kuantitatif, berdasarkan data sekunder dari BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) objek. Menurut Perda RTRW, jumlah objek wisata di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 35 (tiga puluh lima) objek. Sedangkan menurut Ranperda tentang RIPPDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 88 (delapan puluh delapan). Selain jumlah objek wisata berdasarkan ketiga sumber tersebut. Berdasarkan data primer yang penulis himpun, terdapat 10 (sepuluh) potensi objek wisata yang belum teridentifikasi dan terkover oleh ketiga dokumen tersebut. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa, Kota Tidore Kepulauan memiliki ketersediaan objek dan daya tarik wisata yang banyak dan keragaman jenis.

Kedua, sumber kekayaan objek wisata adalah: pertama, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah kepulauan. Dengan daerah kepulauan ini lah yang kemudian Kota Tidore Kepulauan dianugrahi berbagai potensi alam yang kaya, termasuk kekayaan objek wisata alam; kedua, eksistensi Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan warisan peradaban sejarah Kerajaan Islam Kesultanan pada masa lampau. Dengan demikian Kota Tidore Kepulauan saat ini telah mewarisi berbagai peradaban seni dan budaya, dan peradaban seni dan budaya tersebut masih hidup dan dijaga oleh masyarakat hingga saat ini, yang kemudian memperkaya objek wisata sejarah kerajaan, dan seni dan kebudayaan masyarakat; ketiga, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah kedatangan para penjajah pada zaman penjajahan, karena kekayaan alam dan hasil perkebunan pala dan cengkeh. Sebagai daerah penjajahan tersebut

membuat Kota Tidore Kepulauan memiliki beberapa peninggalan para penjajah seperti benteng. Dengan peninggalan sejarah tersebut memperkaya objek wisata sejarah di daerah tersebut.

Ketiga, BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan belum memiliki data yang akurat tentang objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut terlihat perbedaan data dari berbagai dokumen yang menyajikan data tentang objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Keempat, perencanaan pembangunan sektoral pariwisata merupakan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Namun dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sektoral tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan BAPPEDA sebagai institusi perencana daerah dan berbagai organisasi perangkat daerah.

Kelima, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan menggunakan dokumen daerah dan data terkait dari BAPPEDA, namun data tersebut diverifikasi dan dianalisis kembali sesuai dengan kebutuhan perencanaan dinas. Keenam, hasil identifikasi objek pariwisata di Kota Tidore yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih banyak dari sisi jenis objek dan varian wisata. Hasil identifikasi ini berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap berbagai data dan informasi tentang potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan data wisata unggulan daerah yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang telah disebutkan dan dideskripsikan di depan memberikan gambaran bahwa: pertama, di Kota Tidore Kepulauan terdapat berbagai objek pariwisata unggulan. Secara kuantitatif, menurut data Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, terdapat 20 objek wisata unggulan. Selain itu, berdasarkan data primer yang penulis himpun, terdapat 3 (tiga) objek wisata unggulan yang tidak teridentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Berbagai objek wisata unggulan yang terdapat di Kota Tidore Kepulauan tersebut siap dan layak dikembangkan.

Kedua, berbagai objek wisata unggulan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bila dikembangkan dan dikelola secara profesional dan industrial. Nilai ekonomis yang terdapat dalam objek wisata tersebut dikelola secara profesional dan industrial maka akan berdampak pada perekonomian daerah dan masyarakat. Namun demikian, di beberapa objek wisata unggulan yang diidentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan belum dikelola secara baik dan belum ada fasilitas sebagaimana objek wisata pada umumnya.

Ketiga, terdapat beberapa objek wisata unggulan tidak terjaga dan terlindungi dengan baik sehingga berpotensi rusak. Kerusakan yang timbul tersebut akibat ulah manusia (masyarakat di sekitar objek wisata dan pengunjung), dan kerusakan akibat pemeliharaan lingkungan yang tidak baik.

Dalam konsep pembangunan destinasi kepariwisataan, diperlukan kesiap masyarakat dan lingkungan di daerah destinasi wisata. Dengan demikian, merujuk pada berbagai data yang tersaji di depan maka dapat dijsakan bahwa. Pertama, secara sosial kultural, masyarakat Kota Tidore Kepulauan merupakan masyarakat yang majemuk. Namun kemajemukan tersebut tidak menghalangi masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam beraktifitas sosial dan ekonominya. Selain kemajemukan sosial kultural, masyarakat Kota Tidore Kepulauan memiliki

kemajemukan sosial keagamaan. Namun keragaman kepercayaan tersebut tidak menghalangi aktifitas sosial keseharian masyarakat.

Kedua, keragaman sosial kultural dan keagamaan masyarakat Kota Tidore Kepulauan telah ada sejak zaman kerajaan. Keragaman dan kemajemukan kultur dan agama yang terdapat pada masyarakat Kota Tidore Kepulauan saat ini merupakan bagian dari warisan peradaban sejarah Kesultanan Tidore. Artinya, toleransi antara sesama yang tercipta dan terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Tidore Kepulauan saat ini telah ada pada zaman kerajaan dan par Indonesia.

Ketiga, dengan kehidupan yang penuh toleransi tersebut membuat Kota Tidore Kepulauan relatif aman dari berbagai kejahatan. Terjadinya konflik fertikal di tengah-tengah masyarakat tidak bersumber dari masalah yang bersifat suka, agama, ras, antara golongan (SARA), tetapi bersumber dari masalah politik. Rentannya konflik yang bersumber dari masalah politik tersebut disebabkan tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih minim, dan ketidak mampuan tokoh dan elit politik daerah memberikan pencerahan kepada masyarakat pengikutnya.

Keempat, Kota Tidore Kepulauan masih lemah dalam sisi ketersediaan sumberdaya manusia yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Selain itu, belum terdapat lembaga pendidikan, baik formal maupun non forma yang terkait langsung dengan kepariwisataan.

Kelima, dalam sisi lingkuman alam, Kota Tidore Kepulauan ditakdirkan sebagai daerah kepulauan yang kemudian memperkaya potensi pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, pulau-pulau yang berada di Kota Tidore Kepulauan

dengan topografi berbukit dan lembah dan dihiasi dengan hutan tropis yang hijau membuat daerah ini tampak asri dan indah.

Dalam pembangunan kepariwisataan, manajemen penataan ruang destinasi pariwisata merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan penataan ruang yang baik dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan para wisatawan dalam berwisata. Merujuk pada penyajian data tentang tata laksana infrastruktur pariwisata yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pembangunan pariwisata yang dijalankan oleh Kota Tidore Kepulauan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Hal tersebut dapat terlihat dimana, Kota Tidore Kepulauan belum mempunyai landasan yuridis berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Artinya, Kota Tidore Kepulauan belum mempunyai dokumen perencanaan sebagai landasan dan pijakan baik secara hukum maupun pengara dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata daerah. Namun demikian, Kota Tidore Kepulauan terus melakukan pembenahan, baik landasan hukum dan konsep pembangunan pariwisata, dan pada waktu yang bersamaan daerah tersebut melakukan pembangunan secara fisik prasarana dan sarana pariwisata.

Kedua, untuk menata ruang pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, maka daerah tersebut mendesain tata laksana infrastruktur pariwisata daerah dengan tiga konsep pembangunan yaitu, rencana pengembangan kawasan wisata terpadu; rencana struktur tata ruang wisata; dan rencana rute perjalanan wisata.

5.7.2 Fasilitas Penunjang dan Pendukung Pariwisata

Dalam konsep kepariwisataan, sarana pendukung dan pendukung pariwisata adalah fasilitas kebutuhan mendasar yang harus tersedia di daerah

destinasi wisata. Selain sebagai fasilitas kebutuhan wisatawan, sarana pariwisata merupakan faktor pendukung dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian, sarana wisata merupakan fasilitas pendukung dari suatu destinasi wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Secara konseptual berbagai sarana pendukung dan pendukung wisata yang harus disediakan di daerah destinasi wisata dalam pembangunan kepariwisataan adalah hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Kota Tidore Kepulauan yang telah mengkonsepkan dirinya sebagai daerah pariwisata, dan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerah maka penyediaan fasilitas sarana pendukung dan pendukung pariwisata merupakan kebutuhan yang harus disediakan oleh daerah. Artinya, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan daerah sebagaimana yang dikonsepskan jika sarana pendukung dan pendukung pariwisata tidak dibangun dan disediakan oleh daerah.

Berdasarkan data yang tersaji di depan menunjukkan bahwa, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah destinasi pariwisata masih memiliki keterbatasan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan penginapan. Secara kuantitatif jumlah hotel di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1 (satu) buah, yang berada di Desa Gusale (Sofifi). Sedangkan penginapan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 5 (lima) buah, masing 2 (dua) berada di Kota Tidore dan 3 (tiga) berada di Sofifi.

Selain keterbatasan sarana akomodasi, Kota Tidore Kepulauan memiliki keterbatasan sarana restoran dan rumah makan. Secara kuantitatif, di Kota Tidore Kepulauan baru terdapat 1 (satu) restoran sebagai sarana pendukung pariwisata.

Untuk usaha rumah makan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 14 (empat belas) rumah makan.

5.7.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dalam berwisata. Dengan demikian keberadaan sarana dan prasarana transportasi dalam konteks pembangunan pariwisata harus disiapkan dan diadakan oleh daerah destinasi wisata. Berdasarkan data yang tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana transportasi sebagai salah satu fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan relatif cukup tersedia dan baik, baik secara kualitas dan maupun kuantitasnya.

Walaupun Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun tidak ada daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan terisolasi dari transportasi. Semua daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan bisa dijangkau dengan berbagai model transportasi, baik laut maupun darat. Pada transportasi darat terdapat beberapa model transportasi seperti kendaraan umum mini bus, ojek dan becak bermotor (bentor). Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa alternatif kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi penyebarangan antar pulau, seperti kapal feri, kapal motor, dan speedboat.

Dalam konteks sarana dan prasarana transportasi sebagai fasilitas pendukung pariwisata telah tersedia dengan baik. Namun pada sisi yang lain, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat sarana pariwisata seperti biro perjalanan. Biro perjalanan sebagai salah satu media pendukung bagi wisatawan dalam melakukan aktifitas berwisata.

5.7.4 Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung

Konsep pembangunan pariwisata menjelsakan bahwa dalam sistem kepariwisataan diperlukan fasilitas umum pendukung. Ketersediaan fasilitas umum pendukung dalam sistem kepariwisataan merupakan kebutuhan pendukung atau penunjang untuk para wisatawan. Fasilitas umum pendukung yang harus tersedia pada destinasi pariwisata adalah ketersediaan air bersih, sarana telekomunikasi, bank, rumah sakit, apotik, dan pusat perbelanjaan.

Ketersediaan fasilitas umum pendukung dalam pembangunan destinasi pariwisata agar perjalanan wisatawan tetap aman dan nyaman berada di destinasi wisata. Oleh karena itu, daerah destinasi wisata harus mempersiapkan fasilitas umum pendukung pariwisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Keberadaan fasilitas umum pendukung wisata tersebut perlu dibangun dan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang tersaji di depan maka tergambar bahwa, Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya. Penyediaan berbagai fasilitas umum tersebut dalam upaya untuk membangun seluruh sektor dan bidang pembangunan di daerah tersebut, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim.

5.7.5 Kelembagaan Pengembangan Destinasi Wisata

Secara umum, pemerintah mempunyai peran yang signifikan dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, utamanya pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, maka pemerintah daerah (*local goverment*) mempunyai kewenangan dalam setiap tahapan dan

proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Dalam case Indoneisa, pemerintah daerah (*local givernment*) diberikan ruang oleh berbagai regulasi untuk melaksanakan pembangunan di daerah, termasuk perencanaan pembangunan.

Paraktek perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pelaku utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum kewilayahan, sedangkan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dilakukan oleh instansi atau oragnisasi perangkat daerah masing-masing sesuai bidang tugas.

Merujuk pada data yang telah disajikan di depan maka dapat gambarkan bahwa, pada tingkat pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terdapat 20 (dua puluh) instansi daerah yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut. Namun terdapat beberapa instansi dan kantor yang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokomen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, tetapi mempunyai rasa tanggung jawab dan perhatian serta mempunyai harapan dan kemauan untuk membangun potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Selain pemerintah, terdapat lembaga swasta mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulaua. Berdasarkan data yang tersaji di depan dapat dijelsakan bahwa, secara kuantitas terdapat beberapa lembaga atau badan usaha swasta yang berusaha di Kota Tidore Kepulauan. Dalam industri pariwisata terdapat beberapa jenis usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Lemabag atau badan usaha tersebut meliputi, usaha akomodasi (hotel dan penginapan), restoran dan rumah makan, asosiasi tarnsportasi (darat dan laut), usara pengrajian atau industri rumahan (*home industry*), dan usaha perdagangan. Berdasarkan data yang ada, lembaga-lembaga swasta tersebut

mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Namun demikian, belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata.

Selain lembaga swasta, keberadaan dan keterlibatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan cukup penting. Berdasarkan data yang telah disajikan dan paparkan di depan maka tertangkap beberapa hal penting terkait dengan keberadaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan dalam yang mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga suda ya masyarakat (LSM), lembaga adat berserta para pemimpin informal, dan masyarakat secara individu.

5.7.6 Koordinasi dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pembangunan negara dalam pelaksanaannya merupakan sebuah praktek sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artian bahwa, pembangunan merupakan instrumen yang dilukukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam upaya untuk mencapai tujuan negara. Namun demikian, dalam konsep negara moderen pelaksanaan pembangunan terdapat juga domain masyarakat. Artinya dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat, baik secara individual maupun secara institusional.

Konsep yang bersifat umum menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan (mulai dari perencanaan hingga evaluasi), utamanya

pembangunan daerah harus melibatkan *local goverment*, *private sector*, dan *civil society* datau NGOs.

Merujuk pada berbagai data yang tersebut dipaparkan di depan maka dapat dijelaskan bahwa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melibatkan BAPPEDA sebagai lembaga perencana daerah dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Selain BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melibatkan berbagai instansi organisasi perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Pembangunan potensi pariwisata daerah merupakan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral yang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melibatkan organisasi paerangkat daerah terkait dengan industri pariwisata seperti, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan instansi daerah tersebut dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Kantor Kecamatan dan Kelurahan seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam proses perencanaan dikarenakan mereka merupakan salah satu stakeholders pariwisata daerah. Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan kecamatan dan kelurahan

dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Selain pemerintah daerah, para pengusaha daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya, para pengusaha daerah mengharapkan eksistensinya dilihat dan diterima oleh pemerintah daerah sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Pengusaha perhotelan menilai, salah satu penyebab melambatnya perkembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan adalah masih kurangnya sarana pariwisata seperti hotel dan penginapan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan pengusaha daerah yang bergerak pada sektor-sektor yang berkaitan dengan industri kepariwisataan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata daerah. Sosialisasi dan melibatkan pengusaha kerajinan souvenir dalam pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak ada, yang menyebabkan para pengrajin tidak mengetahui tentang peran penting mereka dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Pembangunan sumberdaya manusia dalam konteks pembangunan pariwisata merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar. Namun, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan sebagai penanggungjawab penyelenggara lembaga pendidikan di daerah tersebut tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata. Lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan tinggi, yang seharusnya mempunyai peran penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Keterlibatan lembaga

pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan hanya sebatas penyusunan naskah akademik. Harapan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah seharusnya instansi tersebut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata daerah, dikarenakan dalam proses tersebut pasti berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Lembaga yang bertanggungjawab tentang masalah tersebut adalah instansinya. Lembaga pendidikan tinggi di Kota Tidore Kepulauan mengharapkan eksistennya diakui dan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi).

Keberadaan lembaga suadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan daerah cukup penting. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan (2014), terdapat 14 (empat belas) lembaga suadaya masyarakat (LSM/NGOs) yang terdapat di instansi tersebut.

Namun, tidak semua lembaga tersebut aktif berdasarkan izin, hanya terdapat 10 (sepuluh) lembaga yang aktif. Secara umum, LSM/NGOs yang ada di Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Harapan dari LSM/NGOs adalah mereka dilibatkan dalam proses pembangunan daerah, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pengawasan. Lahirnya harapan tersebut karena mereka berpemikiran bahwa partisipasi publik dalam pembangunan daerah merupakan kebutuhan dan suatu keniscayaan dalam konteks otonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan lembaga adat dan para pemimpin informal yang ada ditengah-tengah masyarakat daerah merupakan

modal dan sumberdaya pembangunan daerah. Berkaitan dengan keterlibatan pemimpin informal dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tersaji di depan maka dapat dijelaskan bahwa. Dalam konteks budaya, Kota Tidore Kepulauan merupakan warisan peradaban kebudayaan Kesultanan Tidore. Hal ini lah yang kemudian memperkaya khasana nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup pada masyarakat Tidore saat ini. Dengan nilai-nilai sosial dan budaya tersebut yang kemudian membentuk struktur masyarakat secara organisatoris, dan melahirkan para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Para pemimpin informal ini lah yang mengarahkan masyarakat untuk menghargai dan memelihara nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Secara formal, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan pemimpin informal yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan data primer, terdapat pemimpin informal mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan budaya daerah, yang tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara budaya daerah. Namun ide dan konsep tersebut tidak dapat diaktualisasikan dikarenakan tidak mempunyai ruang berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan ide dan konsep yang dimilikinya.

Selain lembaga dan tokoh adat, masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah. Terkait dengan bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, maka dapat dijelaskan bahwa. Pertama, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore

Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak hanya itu, masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak mengetahui tentang perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kedua, masyarakat pemerhati pariwisata Kota Tidore Kepulauan mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Namun ide dan konsep yang dimiliki masyarakat tidak dapat dikembangkan dan direalisasikan, dikarenakan masyarakat tidak mempunyai ruang dan media untuk menyampaikan ide dan konsep tersebut.

Ketiga, masyarakat mempunyai harapan agar mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, persepsi pemerintah daerah tentang ketidak tahuan masyarakat tentang pembangunan daerah harus dihilangkan. Karena, pada masyarakat tertentu telah memiliki kesadaran tentang kepartisipasian masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Selanjutnya penulis menyajikan hasil studi ini dalam bentuk matriks yang merupakan representasi dari rumusan masalah penelitian, fokus penelitian dan hasil penelitian sebagai berikut.

Tabel 5.10 Matriks Hasil Penelitian dan Model Empiris Yang Terbangun

No.	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bagaimanakah penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan?	Penyiapan objek daya tarik destinasi pariwisata. 1. Penyiapan objek pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.	1. Kota Tidore Kepulauan memiliki objek pariwisata yang kaya dan sanagt ragam. Objek-objek wisata tersebut terdiri atas objek wisata bahari, alam, sejarah, seni dan budaya, agrowisata, dan kuliner. Secara kuantitatif, berdasarkan data BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) objek. Menurut Perda RTRW, jumlah objek wisata di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 35 (tiga puluh lima) objek. Menurut Ranperda tentang RIPPDA Kota Tidore Kepulauan, objek wisata di daerah tersebut berjumlah 88 (delapan puluh delapan). Namun belum semua potensi pariwisata diidentifikasi oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan data primer yang penulis himpun, terdapat 10 (sepuluh) potensi objek wisata yang belum teridentifikasi dan tercover oleh ketiga dokumen daerah tersebut.

		2. Penyiapan obyek wisata unggulan yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan. 3. Kesiapan masyarakat dan lingkungan di Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan pariwisata. 4. Perencanaan tata laksana infrastruktur destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.	2. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, di daerah tersebut terdapat 20 objek wisata unggulan. Namun belum semua objek wisata diidentifikasi oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan data yang penulis himpun, terdapat 3 (tiga) objek wisata unggulan yang tidak teridentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Banyak objek wisata unggulan yang di Kota Tidore Kepulauan belum dikelola secara baik dan belum ada fasilitas sebagaimana objek wisata pada umumnya. Terdapat beberapa objek wisata unggulan tidak terjaga dan terlindungi dengan baik sehingga berpotensi rusak. 3. Secara sosial kultural masyarakat Kota Tidore Kepulauan merupakan masyarakat yang majemuk, baik kemajemukan sosial kultural dan sosial keagamaan. Namun kemajemukan tersebut tidak menghalangi masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam beraktifitas sosial dan ekonominya. Kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tersebut membuat Kota Tidore Kepulauan relatif aman dari berbagai kejahatan. Dalam sisi lingkungan alam, Kota Tidore Kepulauan ditakdirkan sebagai daerah kepulauan yang kemudian memperkaya potensi pariwisata di daerah tersebut. 4. Tata laksana infrastruktur pembangunan pariwisata yang dijalankan oleh Kota Tidore Kepulauan saat ini masi dalam tahap perencanaan. Untuk menata ruang pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, maka daerah tersebut mendesain tata laksana infrastruktur pariwisata daerah dengan tiga konsep pembangunan yaitu, rencana pengembangan kawasan wisata terpadu; rencana struktur tata ruang wisata; dan rencana rute perjalanan wisata.
2.	Bagaimanakah fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?	Melihat ketersediaan fasilitas penunjang dan pendukung wisata di Kota Tidore Kepulauan, berupa akomodasi dan restoran.	Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah destinasi pariwisata masih memiliki keterbatasan sarana akomodari pariwisata seperti hotel dan penginapan. Secara kuantitatif jumlah hotel di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1 (satu) buah, yang berada di Desa Gusale (Sofifi). Sedangkan penginapan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 5 (lima) buah, masing 2 (dua) berada di Kota Tidore dan 3 (tiga) berada di Sofifi. Selain keterbatasan sarana akomodasi, Kota Tidore Kepulauan memiliki keterbatasan sarana restoran dan rumah makan. Secara kuantitatif, di Kota Tidore Kepulauan baru terdapat 1 (satu) restoran sebagai sarana pendukung pariwisata. Untuk usaha rumah makan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 14 (empat belas) rumah makan. Selain itu, pada sisi yang lain, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat sarana pariwisata seperti biro perjalanan.
3.	Bagaimanakah pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan?	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, yang meliputi: pelabuhan, terminal, rute atau jalur transportasi dan moda transportasi yang digunakan untuk mencapai objek wisata.	Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun tidak ada daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan terisolasi dari transportasi. Semua daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan bisa dijangkau dengan berbagai model transportasi, baik laut maupun darat. Pada transportasi darat terdapat beberapa model transportasi seperti kendaraan umum mini bus, ojek dan becak bermotor (bentor). Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa alternatif kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi penyeberangan antar pulau, seperti kapal ferry, kapal motor, dan speedboat.
4.	Bagaimanakah pembangunan fasilitas umum pendukung di Kota Tidore Kepulauan?	Pembangunan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, rumah sakit, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.	Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya. Penyediaan berbagai fasilitas umum tersebut dalam upaya untuk membangun seluruh sektor dan bidang pembangunan di daerah tersebut, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim. Khusus fasilitas pendukung seperti mall dan toko souvenir belum ada.
5.	Bagaimanakah kelembagaan pengembangan destinasi wisata di Kota Tidore?	Kelembagaan pengembangan destinasi pariwisata. 1. Pemerintah Daerah.	1. Pada unsur pemerintah daerah, terdapat 20 (dua puluh) instansi daerah yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut, dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata. Namun, terdapat beberapa instansi dan kantor yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata, tetapi mempunyai rasa tanggung jawab dan perhatian, serta mempunyai harapan dan

	Kepulauan?	2. Sektor swasta dan pelaku usaha. 3. Masyarakat Daerah	kemauan untuk membangun pariwisata Kota Tidore Kepulauan. 2. Terdapat beberapa pihak swasta dan pelaku usaha yang terkait dengan industri pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Para pelaku usaha tersebut, meliputi: pelakusaha akomodasi (hotel dan penginapan), restoran dan rumah makan, asosiasi transportasi (darat dan laut), usaha pengrajin atau industri rumahan (<i>home industry</i>), dan usaha perdagangan. Namun demikian, belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata. 3. Proses pembangunan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan, terdapat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga suda masyarakat (LSM), lembaga adat berserta para pemimpin informal, dan masyarakat individu.
6.	Bagaimanakah koordinasi dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?	Koordinasi pembangunan destinasi. 1. Organisasi Pemerintah Daerah. 2. Swasta dan pelaku usaha pariwisata. 3. Lembaga pendidikan. 4. Lembaga Suda Masyarakat (LSM). 5. Lembaga dan Tokoh Adat. 6. Masyarakat pemerhati pariwisata.	1. Terdapat 20 (dua puluh) instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Namun demikian, terdapat beberapa instansi daerah yang seharusnya terlibat dalam perencanaan pembangunan pariwisata tidak dilibatkan. Instansi tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan. 2. Dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, pihak swasta dan pelaku usaha pariwisata tidak dilibatkan. Tidak melakukan sosialisasi dan melibatkan pengusaha kerajinan souvenir dalam pembangunan pariwisata daerah, yang menyebabkan para pengrajin tidak mengetahui tentang peran penting mereka dalam pembangunan kepariwisataan daerah. 3. Lembaga pendidikan tinggi, yang seharusnya mempunyai peran penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan hanya sebatas penyusunan naskah akademik. 4. Secara umum, LSM/NGOs yang ada di Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut. Harapan dari LSM/NGOs adalah mereka dilibatkan dalam proses pembangunan daerah, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pengawasan. 5. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan hidup penuh dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan nilai-nilai sosial dan budaya tersebut yang kemudian membentuk struktur masyarakat secara organisatoris, dan melahirkan para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian pemerintah daerah tidak melibatkan pemimpin informal yang ada di daerah tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat pemimpin informal mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan budaya daerah, yang tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara budaya daerah. 6. Masyarakat daerah adalah salah satu unsur dari daerah, namun demikian masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak mengetahui tentang perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat pemerhati pariwisata Kota Tidore Kepulauan mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan mempunyai harapan agar mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Presepsi pemerintah daerah tentang ketidak tahuan masyarakat tentang pembangunan daerah harus dihilangkan.
7.	Bagaimanakah model	Menemukan model inovasi dalam perencanaan	Model empiris yang terbagun dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan

	inovasi daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?	pembangunan pariwisata yang komprehensif, efektif dan efisien di Kota Tidore Kepulauan.	Pariwisata Kota Tidore Kepulauan adalah: 1. Melakukan identifikasi dan mapping terhadap seluruh potensi objek wisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Melakukan analisis terhadap potensi wisata unggulan yang ada di Kota Tidore Kepulauan melalui suatu tim yang dibentuk oleh dinas. Selain itu, daerah menyiapkan masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan pariwisata, dan daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan mendesain konsep pembangunan tata laksana infrastruktur pariwisata daerah. 2. Menyiapkan ketersediaan fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata berupa akomodasi serta restoran dan rumah makan. 3. Menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, yang meliputi: pelabuhan, terminal, rute atau jalur transportasi dan modanya untuk mencapai objek wisata. 4. Menyediakan dan menyiapkan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, rumah sakit, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. 5. Menyiapkan lembaga pengembangan destinasi pariwisata. 6. Melakukan koordinasi dalam proses pembangunan destinasi.
--	---	---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016).

Mujuk pada deskripsi yang tersaji dalam tabel di atas terbaca bahwa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut berhasil mengidentifikasi lebih banyak objek pariwisata, dibandingkan dengan terdapat dalam dokumen BAPPEDA tahun 2015, serta yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melalui timnya, berhasil mengidentifikasi 20 (dua puluh) objek wisata unggulan di daerah tersebut. Pada sisi lain, penulis juga berhasil mengidentifikasi 10 (sepuluh) objek pariwisata potensial di Kota Tidore Kepulauan yang belum teridentifikasi oleh pemerintah daerah. Dari 10 (sepuluh) potensi pariwisata tersebut, terdapat 3 (tiga) objek wisata unggulan.

Dalam upaya membangun destinasi pariwisata daerah di Kota Tidore Kepulauan maka harus menyiapkan daya dukung daerah, seperti kesiapan masyarakat dan lingkungan. Selaintu, agar pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara baik diperlukan perencanaan tata ruang infrastruktur kepariwisataan. Namun demikian, tata laksana infrastruktur pembangunan

pariwisata di Kota Tidore Kepulauan saat ini masi dalam tahap perencanaan. Untuk menata ruang pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, maka daerah tersebut mendesain tata laksana infrastruktur pariwisata daerah dengan tiga konsep pembanguan yaitu, rencana pengembangan kawasan wisata terpadu; rencana struktur tata ruang wisata; dan rencana rute perjalanan wisata.

Agar pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan dapat berkembang dengan baik maka diperlukan ketersediaan fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata berupa saran akomodasi serta restoran dan rumah makan. Namun demikain, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah destinasi pariwisata masih memiliki keterbatsan sarana akomodari pariwisata sperti hotel dan penginapan. Secara kuantitatfi jumlah hotel di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1 (satu) buah, yang berada di Desa Gusale (Sofifi). Sedangkan penginapan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 5 (lima) buah, masing 2 (dua) berada di Kota Tidore dan 3 (tiga) berada di Sofifi. Selain keterbatasan sarana akomodasi, Kota Tidore Kepulauan memiliki keterbatsan sarana restoran dan rumah makan. Secara kuantitatif, di Kota Tidore Kepulauan baru terdapat 1 (satu) restoran sebagai saran pendukung pariwisata. Untuk usaha rumah makan, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 14 (empat belas) rumah makan.

Dalam konsep pembangunan pariwisata diperlukan sarana dan prasarana transpotrasi, yang meliputi: pelabuhan, terminal, rute atau jalur transpotrasi dan moda transportasi yang digunakan untuk mencapai objek wisata. Secara geografis Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun demikian, tidak ada daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan terisolasi dari sisi transportasi, karena prasaran dan sarana transportasi telah tersedia dengan baik. Semua daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan bisa dijangkau dengan

berbagai model transportasi, baik laut maupun darat. Pada transportasi darat terdapat beberapa model transportasi seperti kendaraan umum mini bus, ojek dan becak bermotor (bentor). Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa alternatif kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi penyebarangan antar pulau, seperti kapal feri, kapal motor, dan speedboat. Namun pada sisi yang lain, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat sarana pariwisata seperti biro perjalanan.

Selain sarana dan prasarana transportasi, dalam konsep pembangunan pariwisata diperlukan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan dalam aktivitas berwisata, seperti: bank, telekomunikasi, rumah sakit, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya. Penyediaan berbagai fasilitas umum tersebut dalam upaya untuk membangun seluruh sektor dan bidang pembangunan di daerah tersebut, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim. Khusus fasilitas pendukung seperti mall dan toko souvenir belum ada.

Kesiapan kelembagaan dalam pembangunan pariwisata sangat penting. Secara umum lembaga yang harus ada dan dilibatkan dalam pembangunan daerah adalah pemerintah daerah, pihak swasta dan pelaku usaha, dan masyarakat daerah. Pada unsur pemerintah daerah, terdapat 20 (dua puluh) instansi daerah yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan potensi pariwisata di daerah tersebut, dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata. Namun, terdapat beberapa instansi dan kantor yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata, tetapi

mempunyai rasa tanggung jawab dan perhatian, serta mempunyai harapan dan kemauan untuk membangun pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Instansi dan kantor tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; serta Koantor Kecamatan dan Kelurahan.

Terdapat beberapa pihak swasta dan pelaku usaha yang terkait dengan industri pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Para pelaku usaha tersebut, meliputi: pelakusaha akomodasi (hotel dan penginapan), restoran dan rumah makan, asosiasi transportasi (darat dan laut), usaha pengrajan atau industri rumahan (*home industry*), dan usaha perdagangan. Namun demikian, belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata.

Proses pembangunan kepariwisataan di Kota Tidore Kepulauan, terdapat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga suda ya masyarakat (LSM), lembaga adat berserta para pemimpin informal, dan masyarakat secara individu.

Agar proses pembangunan pariwisata di daerah dapat berjalan dengan baik diperlukan koordinasi antara sesama lembaga pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Namun demikian, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut tidak melibatkan seluruh instansi dan kantor yang harusnya dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, pihak swasta dan pelaku usaha pariwisata tidak dilibatkan. Lembaga pendidikan tinggi, yang seharusnya mempunyai peran penting dan

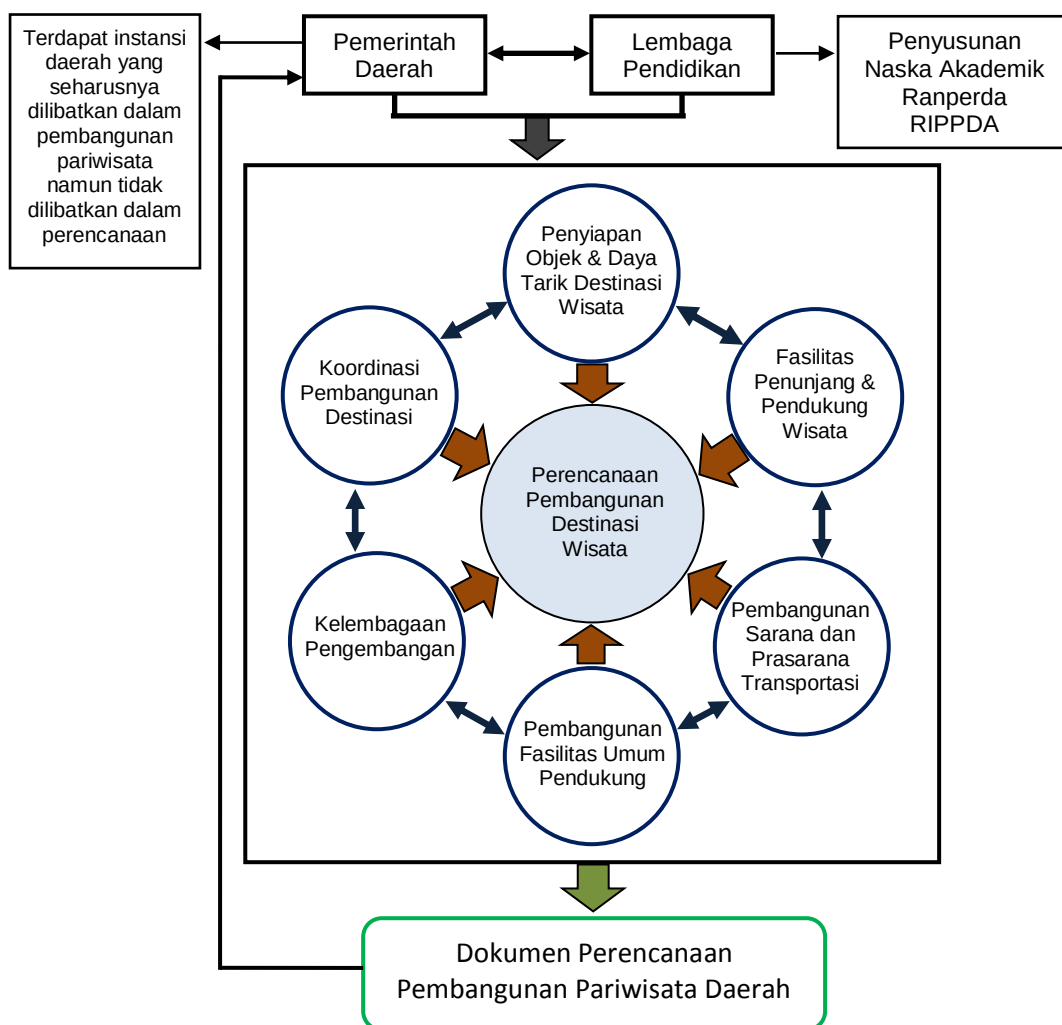
strategis dalam proses pembangunan daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam perencanaan pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan hanya sebatas penyusunan naskah akademik.

Secara umum, LSM/NGOs yang ada di Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Harapan dari LSM/NGOs adalah mereka dilibatkan dalam proses pembangunan daerah, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pengawasan. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan hidup penuh dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan nilai-nilai sosial dan budaya tersebut yang kemudian membentuk struktur masyarakat secara organisatoris, dan melahirkan para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian pemerintah daerah tidak melibatkan pemimpin informal yang ada di daerah tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat pemimpin informal mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan budaya daerah, yang tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara budaya daerah.

Masyarakat daerah adalah salah satu unsur dari daerah, namun demikian masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak mengetahui tentang perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat pemerhati pariwisata Kota Tidore Kepulauan mempunyai ide dan konsep tentang pembangunan potensi pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan mempunyai harapan agar mereka dilibatkan dalam proses

perencanaan pembangunan daerah. Presepsi pemerintah daerah tentang ketidak tahuan masyarakat tentang pembangunan daerah harus dihilangkan.

Berdasarkan hasil studi yang tersaji di depan, maka model empiris (*existing model*) perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.



Gambar 5.33 Model Empiris Perencanaan Pembangunan Potensi Pariwisata Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan hasil penyajian data di depan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Kota Tidore Kepulauan memiliki objek pariwisata yang kaya dan ragam. Kekayaan objek wisata Kota Tidore Kepulauan sangat sempurna,

dikarenakan daerah tersebut memiliki seluruh objek wisata, yaitu objek wisata alam, bahari, sejarah, seni dan budaya, serta agrowisata. Dari sekian banyak kekayaan objek wisata tersebut, terdapat objek wisata unggulan yang akan dikembangkan oleh daerah. Namun demikian, terdapat permasalahan terkait dengan pengembangan objek wisata yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan, yaitu terdapat beberapa objek wisata unggulan yang belum dikelola secara baik.

Selain memiliki kekayaan objek wisata, lingkungan sosial kultural masyarakat Kota Tidore Kepulauan relatif kondusif, walaupun masyarakat yang majemuk. Lingkungan sosial masyarakat daerah yang kondusif tersebut merupakan salah satu modal bagi Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya, termasuk pembangunan pariwisata. Kondisi yang kondusif tersebut lahir dari kesadaran masyarakat. Pada sisi yang lain, dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, daerah telah medesain rencana tata laksana pembangunan infrastruktur pendukung dan penunjang kepariwisataan. Namun, prosesnya masih dalam pembahasan.

Kedua, dalam pembangunan kepariwisataan, salah satu unsurnya adalah ketersediaan fasilitas penunjang dan pendukung wisata seperti fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan atau dalam bentuk lainnya), serta restoran dan rumah makan, dan sarana pendukung seperti biro perjalanan (travel). Realitas empirik menunjukkan bahwa, di Kota Tidore Kepulauan telah tersedia fasilitas penunjang wisata berupa hotel, penginapan, restoran dan rumah makan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, dalam konteks kepariwisataan, di Kota Tidore Kepulauan belum tersedia jasa biro perjalanan.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu unsur dan kebutuhan dalam konteks pembangunan kepariwisataan daerah

secara khusus, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara geografis, Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun tidak ada wilayah atau daerah di Tidore Kepulauan yang terisolir. Sarana dan prasarana transportasi telah tersedia dengan baik dan layak, baik pada transportasi darat maupun laut. Terdapat berbagai model alat transportasi di daerah ini. Pada transportasi darat, terdapat kendaraan umum berupa mini bus angkutan dalam kota dan angkutan antara kota di provinsi Maluku Utara, khususnya di pulau Halmahera. Selain itu, terdapat becak bermotor dan ojek yang melayani aktivitas masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Untuk transportasi laut, terdapat beberapa model transportasi seperti, kapal kayau, speed boat, kapal ferry, dan kapal penumpang lainnya. Model transportasi laut tersebut yang melayani pelayaran antar pulau dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan dan juga pelayaran antara pulau dari dan ke daerah-daerah yang ada di provinsi Maluku Utara dan kawasan Timur Indonesia.

Keempat, pembangunan fasilitas umum pendukung. Dalam konsep pembangunan pariwisata diperlukan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan dalam aktivitas berwisata di daerah destinasi wisata, seperti: bank, telekomunikasi, rumah sakit, listrik, air bersih, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim. Khusus fasilitas pendukung seperti mall dan toko souvenir belum tersedia.

Kelima, kelembagaan pengembangan. Secara kelembagaan seluruh stakeholders daerah baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat mempunyai perhatian terhadap pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Namun

belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata. Keenam, koordinasi antara lembaga dalam pembangunan destinasi pariwisata. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, pemerintah daerah sebagai pelaksana tidak melibatkan semua institusi pemerintahan yang seharusnya dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Pada sisi yang lain, semua stakeholders di luar pemerintah tidak dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut, hanya satu lembaga pendidikan tinggi yang dilibatkan dalam proses tersebut. Keterlibatan lembaga tersebut hanya sebagai pembuatan naskah akademik RIPPDA.

Menyimak penjelasan di depan maka dapat dipahami bahwa dari keenam unsur pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, secara strategis terdapat 3 (tiga) unsur yang cukup kuat, yaitu penyiapan objek dan daya tarik destinasi wisata, sarana dan prasarana transportasi, dan kelembagaan pengembangan. Unsur penyiapan objek dan daya tarik destinasi wisata dinilai kuat, dikarenakan Kota Tidore Kepulauan memiliki kekayaan objek wisata yang cukup banyak secara kuantitas, dan beragam. Untuk sarana dan prasarana transportasi, telah tersedia dengan baik sarana dan prasarana transportasi, baik darat maupun laut. Sedangkan unsur kelembagaan pengembangan, seluruh lembaga stakeholders daerah mempunyai perhatian dan mempunyai kemauan untuk membangun pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

Selain kekuatan yang dimiliki tersebut, pada model empiris yang terbangun di depan terdapat 3 (tiga) kelemahan yang dialami dan dihadapi Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan pariwisata, yaitu fasilitas penunjang dan pendukung wisata, pembangunan fasilitas umum pendukung, dan koordinasi pembangunan destinasi. Ketersediaan fasilitas penunjang dan pendukung wisata

berupa ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan, serta sarana pendukung seperti biro perjalanan masih sangat terbatas. Untuk fasilitas umum pendukung berupa bank, telekomunikasi, rumah sakit, listrik, air bersih, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya, masih sangat kurang. Serta koordinasi antara lembaga dalam pembangunan destinasi pariwisata masih sangat kurang. Kurangnya koordinasi antara lembaga tersebut terlihat, dimana hampir semua stakeholders pariwisata tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut.

Selain hal tersebut, berdasarkan gambar model empirik yang terbagun di depan menunjukan bahwa: pertama, terdapat kelemahan pada sisi koordinasi perencanaan. Tidak semua stakeholders pariwisata daerah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan destinasi. Kedua, keterlibatan lembaga pendidikan dalam proses perencanaan hanya sebatas penyusunan Naska Akademik RIPPDA.